

KUNJUNGAN PIMPINAN MPR, DPR, DPD KE TANAH PAPUA

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI



MAJELIS

MPR RUMAH KEBANGSAAN



EDISI NO.04/TH.XIV/APRIL 2020

MELAWAN VIRUS CORONA

PANCASILA SEJATINYA BERPERAN PENTING



ISSN 0854-6371



9 770854 637158

06 **Perspektif**
Peran MPR dalam
Pemberantasan Korupsi

22 **Nasional**
Seminar Liga Muslim Dunia
Dialog Membangun Kesepahaman

39 **Selangan**
Kisah Wabah Penyakit
Pernah Melanda Dunia

60 **Sosialisasi**
Putri Indonesia 2020
Ditetapkan Jadi Duta MPR



MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT

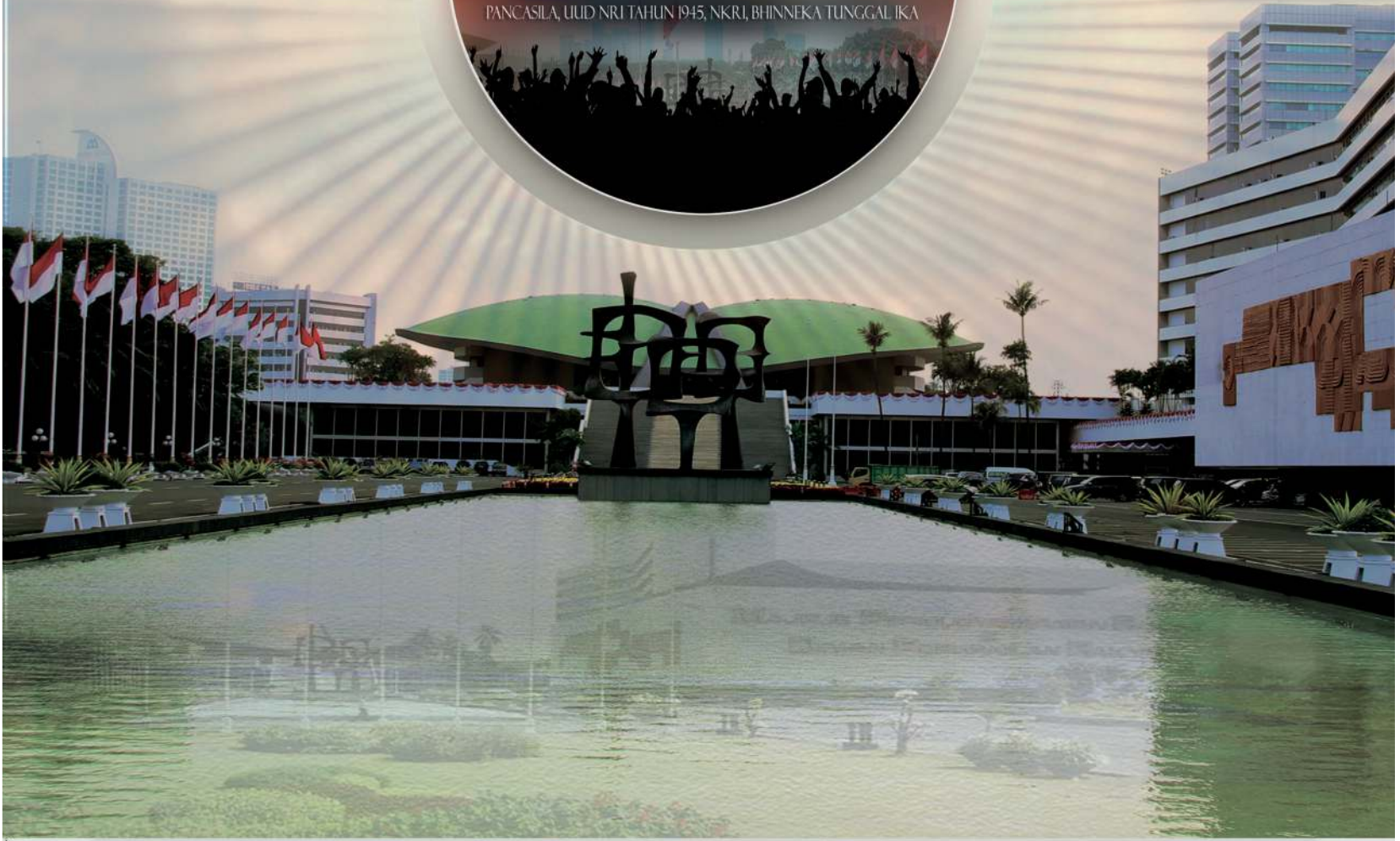


EMPAT PILAR MPR
PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA



INDONESIA
MPR RUMAH KEBANGSAAN PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA DAN KEDAULATAN RAKYAT

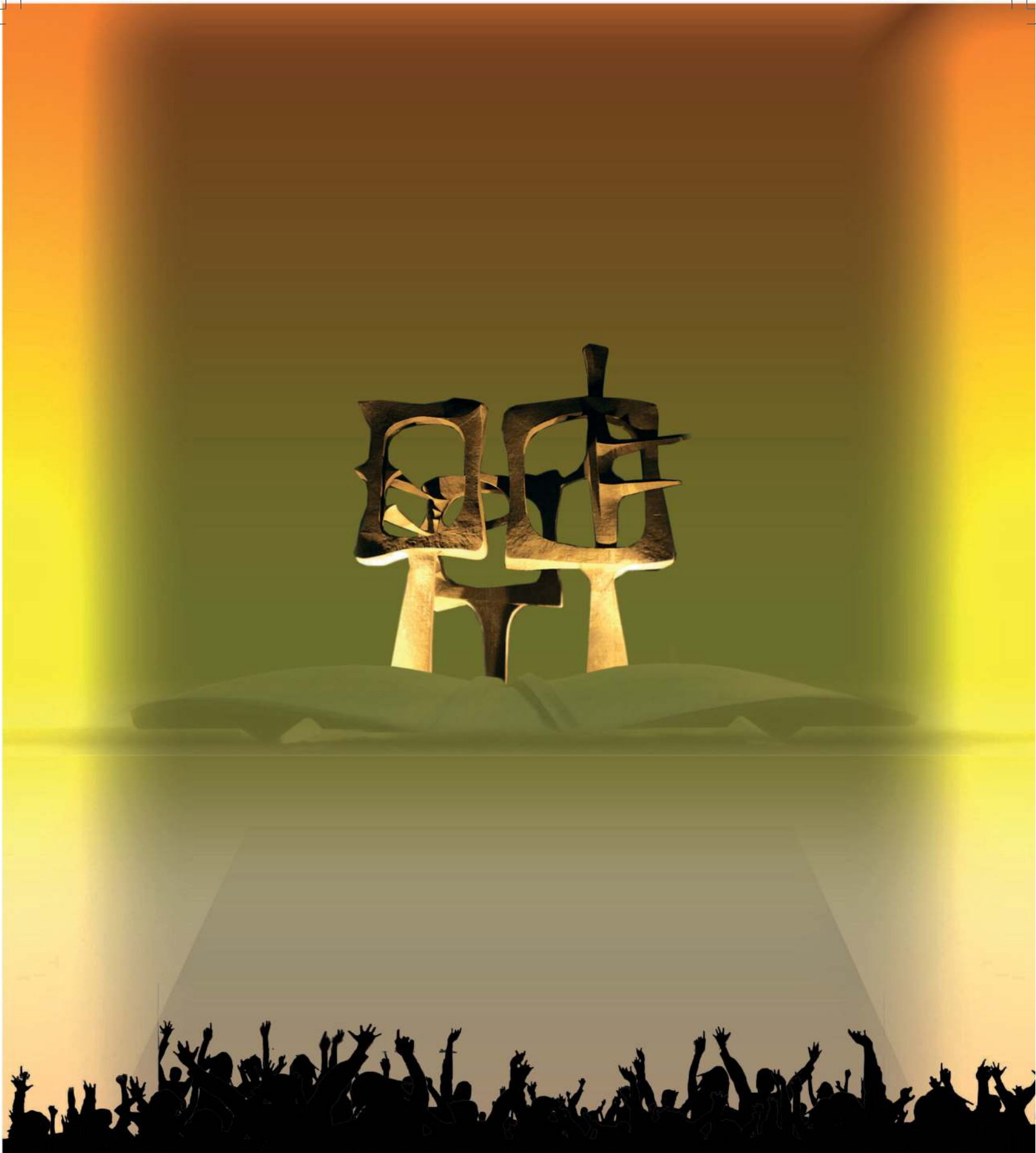
**MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT**



INI BARU
INDONESIA
DARI MPR RI UNTUK NKRI



INDONESIA
MPR RUMAH KEBANGSAAN PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA DAN KEDAULATAN RAKYAT



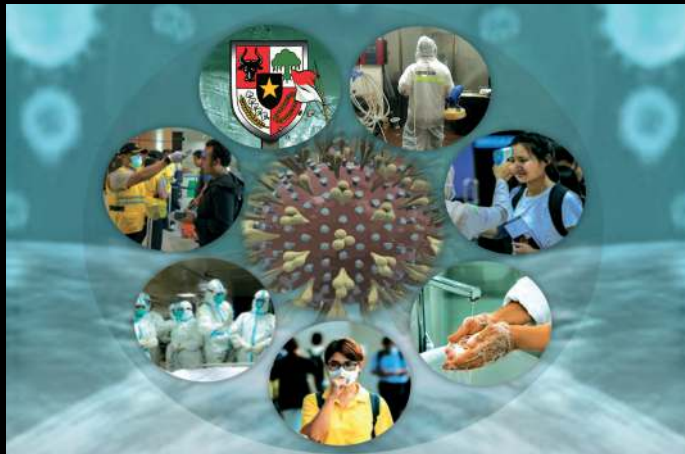
EMPAT PILAR MPR
PANCASILA, ULUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA



INDONESIA
MPR RUMAH KEBANGSAAN PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA DAN KEDAULATAN RAKYAT

Daftar Isi

EDISI NO.04/TH.XIV/APRIL 2020



08 BERITA UTAMA

Pandemi Covid-19 Momentum Implementasikan Pancasila

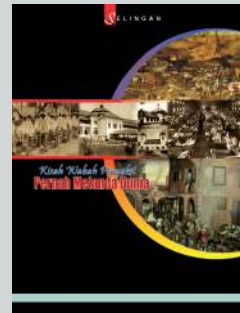
Menghadapi wabah Covid-19 menjadi momentum mengimplementasikan Pancasila secara nyata. Seluruh warga masyarakat mesti meningkatkan gotong-royong, tenggang rasa, toleransi, solidaritas, saling mengingatkan, dan saling membantu.



18 Nasional
Pimpinan Parlemen Meninjau Tanah Papua



60 Sosialisasi
Putri Indonesia 2020 Ditetapkan Jadi Duta MPR

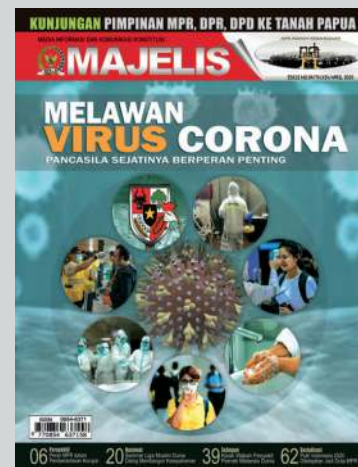


39 SELINGAN
Wabah Penyakit Melanda Dunia



78 Ragam
Balkondes Borobudur

Pengantar Redaksi	04
Perspektif	06
Kolom	24
Rehal	35
Aspirasi Masyarakat	47
Gema Pancasila	70
Varia MPR	72
Wawancara	74
Figur	76
Dari Rumah Kebangsaan	80
Rehal	82



COVER
Edisi No.04/TH.XIV/April 2020
Kreatif: Jonni Yasrul - Foto: Istimewa



Budi Muliawan
Redaktur Pelaksana

Pengantar Redaksi

Nilai-Nilai Pancasila dan Penanganan Virus Corona

INDONESIA masih bergelut melawan virus Corona. Pemerintah mengumumkan kasus pertama Covid-19 pada 2 Maret 2020. Awalnya ditemukan dua kasus positif Corona, keduanya warga Depok, perbatasan dengan DKI Jakarta, kemudian bertambah menjadi belasan, lalu puluhan, dan sekarang (data pada Sabtu, 28 Maret 2020) jumlah kasus positif Corona mencapai 1.155 kasus. Sementara korban meninggal dunia sebanyak 102 orang, dan pasien sembuh sebanyak 59 orang.

Tentu kita semua prihatin dan ikut berbelasungkawa atas jatuhnya ratusan korban meninggal dunia akibat virus Corona ini. Kita juga berharap mereka yang terpapar virus Corona (pasien dalam pengawasan/PDP maupun orang dalam pengawasan/ODP) saat ini mendapat bantuan kesehatan dari pemerintah sehingga mereka bisa pulih kembali dan bisa berkumpul dan bercengkerama bersama keluarga.

Kita pun mengapresiasi pemerintah yang telah berupaya sekuat tenaga membuat langkah-langkah untuk menangani pandemi Corona ini, di antaranya dengan menyiapkan rumah sakit rujukan dan tenaga medis, mengkampanyekan *social distancing*, *physical distancing*, belajar dan bekerja dari rumah (*work from home*), hingga anjuran harus sering mencuci tangan, menjaga kebersihan, dan menjaga kesehatan dengan makanan bergizi. Memang diperlukan kedisiplinan masyarakat untuk mengikuti dan mematuhi anjuran pemerintah ini.

Tapi, tak bisa dipungkiri juga, tingkat dan wilayah persebaran virus Corona sangat masif. Awalnya kasus virus Corona diketahui lewat penyakit misterius yang melumpuhkan kota Wuhan, Cina. Tragedi pada akhir 2019 terus berlanjut hingga penyebaran virus Corona

mewabah ke seluruh dunia. Sudah lebih 190 negara di dunia terjangkiti Covid-19 yang mempunyai gejala mirip flu ini. WHO pun menetapkan wabah virus Corona sebagai pandemi.

Di Indonesia, semula hanya dideteksi di Jakarta (meski yang terjangkit pertama adalah warga Depok), lalu menjalar ke kota-kota lain di Jawa Barat, meluas hingga Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan daerah-daerah lain. Penyebaran virus Corona menunjukkan tren yang sungguh benar-benar drastis dan mencengangkan. Tak heran bila jumlah kasus positif Corona masih terus bertambah hingga saat ini.

Apalagi masa penjangkitan di Indonesia boleh dibilang masih pada fase awal. Ketika wabah virus Corona di Cina menunjukkan tanda-tanda mereda, di Indonesia seolah baru saja melewati garis start. Jumlah orang yang terinfeksi virus Corona semakin hari makin membengkak, korban yang meninggal dunia pun kian bertambah, dan wilayah persebarannya semakin meluas. Bukan tidak mungkin, tanpa langkah-langkah pencegahan dan kedisiplinan serta penegakkan hukum yang tegas, angka kasus positif Covid-19 bisa melonjak.

Wabah virus Corona adalah masalah serius yang dihadapi bangsa Indonesia. Karena itu untuk menghadapi masalah diperlukan kegotong-royongan dan solidaritas di antara anak bangsa. Gotong royong, saling berbagi, saling mendukung, dan saling sinergi mengatasi masalah virus Corona. Inilah momentum untuk mewujudkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sikap gotong royong adalah sari pati nilai Pancasila hendaknya tetap hidup di hati masyarakat Indonesia. □



PENASEHAT

Pimpinan MPR-RI

PENANGGUNG JAWAB

Ma'ruf Cahyono

PEMIMPIN REDAKSI

Siti Fauziah

DEWAN REDAKSI

Yana Indrawan, Dyastasita,
Heri Herawan, Maifrizal

REDAKTUR PELAKSANA

Budi Muliawan

KOORDINATOR REPORTASE

Budi Muliawan

REDAKTUR FOTO

Oni Arief Benyamin,
Sucipto, Slamet Eko Suprayitno

REPORTER

Ana Suzana, Bayu Nugroho,
Tengku Novan Muda Mulya,
Yenita Revi, Ikhwani Bimo F,
Amelia Rubinta

FOTOGRAFER

Ahmad Suryana, Frinda,
Restu, Suprianto, Sugeng, Wira,
A. Ariyana, Agus Darto

PENANGGUNG JAWAB

DISTRIBUSI

Elen Magdalena

KOORDINATOR DISTRIBUSI

Cucu Riwayat

STAF DISTRIBUSI

Ati Oktafia, Amiruddin,
Anggun Permana, Armansyah,
Dhita Fitasari Junaid

SEKRETARIS REDAKSI

Djarot Widiarto

TIM AHLI

Syahril Chili, Jonni Yasrul,
Ardi Winangun, Budi Sucahyo,
Derry Irawan, M. Budiono

ALAMAT REDAKSI

Bagian Pemberitaan dan Layanan Informasi, Biro Humas, Sekretariat Jenderal MPR-RI Gedung Nusantara III, Lt. 5 Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6, Senayan, Jakarta 10270. Telp. (021) 57895237, 57895238 Fax.: (021) 57895237 Email: pemberitaan@setjen.mpr.go.id



Implementasi Sila-sila Pancasila



- Berhenti saling menyakiti, mulailah saling menghargai
- Berhenti saling merendahkan, mulailah menghormati perbedaan
- Berhenti takabur, mulailah bersyukur



- Stop marah-marah, mulailah bersikap ramah
- Berhenti memaki, mulailah memakai hati
- Berhenti curiga, mulailah menyapa.



- Berhenti berseteru, mulailah bersatu
- Berhenti memaksakan, mulailah berkorban
- Berhenti mencari perbedaan, mulailah bergandeng tangan



- Berhenti silang pendapat, mulailah mencari mufakat
- Berhenti besar kepala, mulailah bertampang dada
- Berhentilah bersilat lidah, mulailah bermusyawarah



- Berhenti malas, mulailah bekerja keras
- Stop diskriminasi, mulailah toleransi
- Berhenti menang sendiri, mulailah berbagi

MANIFESTO

Masih Indonesiakah kita setelah sekian banyak jatuh bangun setelah sekian banyak tertimpa dan tertimpa setelah sekian banyak terbentur dan terbentur

Masihkah kita meletakkan harapan di atas kekecewaan persatuan di atas perselisihan musyawarah di atas amarah kejujuran di atas kepengertian

Ataukah ke-Indonesia-an kita telah pudar dan hanya tinggal slogan dan gambar?

Tidak!

Karena mulai kini nilai-nilai itu kita lahirkan kembali Kita bunyikan dan kita bumikan menjadi jiwa dan raga setiap manusia Indonesia

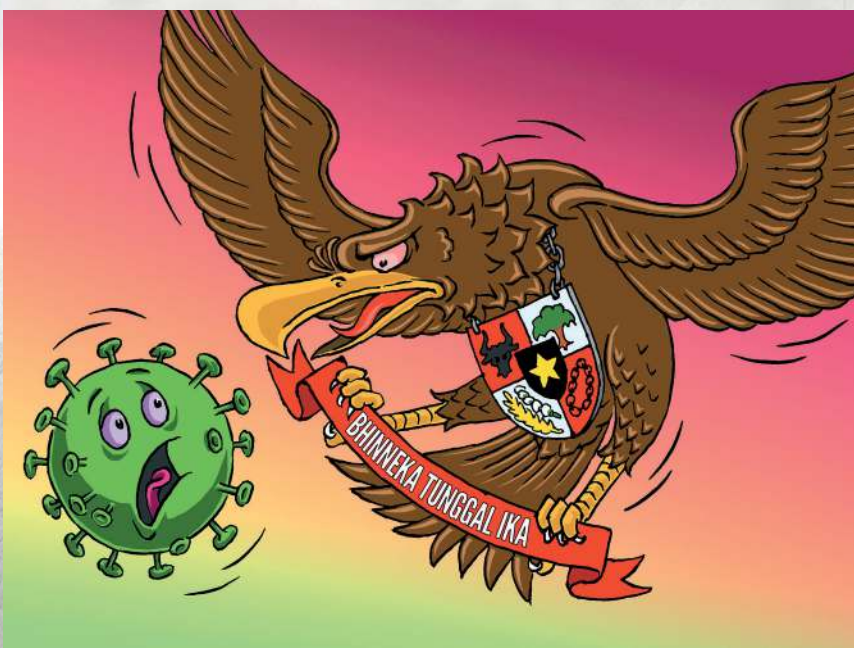
Dari Sabang sampai Merauke kita akan melihat lebih banyak lagi syukur ramah dan tegur sapa gelong royong dan tolong menolong kesantunan bukan anjuran tapi kebiasaan kepedulian menjadi dorongan

Dari terbit hingga terbenamnya matahari kita melihat orang-orang berpeluh tanpa mengeluh berkering karena semangat kerja keras menjadi ibadah ketepatan menjadi kesadaran kejujuran menjadi bagian harga diri dan kehormatan

Wajah mereka adalah wajah Indonesia yang sebenarnya tangan mereka adalah tangan Indonesia yang sejati keluhuran budi mereka adalah keluhuran Indonesia yang sesungguhnya

Hari ini kita gemakan, Ini Baru Indonesia!

INI BARU
INDONESIA



ILUSTRASI: SUSTHANTO

Peran MPR dalam Pemberantasan Korupsi

PADA Senin, 9 Maret 2020, Pimpinan MPR mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam kunjungan itu Ketua MPR Bambang Soesatyo didampingi para Wakil Ketua MPR, yakni: Ahmad Basarah, Jazilul Fawaid, Hidayat Nur Wahid, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad. Pimpinan MPR diterima Ketua KPK Firli Bahuri serta para komisioner Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, dan Alexander Marwata. Pertemuan kedua lembaga ini merupakan hal yang positif dalam rangka membangun sinergi berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi. Ini juga sebuah komitmen MPR RI untuk terus mendukung KPK dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi.

Bangunan sinergi itu diejawantahkan dalam bentuk kesepakatan bersama berupa Memorandum of Understanding (MoU) antara MPR RI dan KPK, yaitu menyosialisasikan Empat Pilar MPR RI. MPR RI akan melibatkan KPK dalam sosialisasi Empat Pilar dengan tujuan untuk memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilandasi nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. MPR ikut dalam pencegahan korupsi sekaligus sosialisasi Empat Pilar MPR.

Empat Pilar itu adalah Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara dan Ketetapan MPR, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Ideologi dan dasar negara Pancasila serta juga konstitusi UUD NRI Tahun 1945 merupakan dua hal yang sangat penting untuk memandu kehidupan berbangsa dan bernegara. *Pertama*, di dalam konstitusi ada ideologi. Itulah jati diri bangsa kita. Pancasila ada dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Isi pembukaan UUD juga cukup luas terkait dengan jati diri bangsa. Pancasila menjadi dimensi yang sangat penting.

Kedua, konstitusi UUD NRI Tahun 1945 memiliki kedudukan yang sangat penting. Di dalam konstitusi berisi berbagai dimensi pengaturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bab-bab dan pasal-pasal dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945 mengatur seluruh aspek kehidupan kita. *Ketiga*, terkait dengan komitmen kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). *Keempat*, kita berbeda-beda tetapi harus bersatu. Oleh karena itu prinsip Bhinneka Tunggal Ika menjadi sebuah keniscayaan.

MPR periode 2009 – 2014 dan berlanjut pada periode 2014 –

2019, sesuai amanat UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), melaksanakan sosialisasi Empat Pilar MPR. Sosialisasi ini menasar seluruh kelompok masyarakat. Dengan visinya sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat, MPR RI terus-menerus melakukan internalisasi Empat Pilar, tidak hanya nilai-nilainya tetapi juga sosialisasi terhadap normanya.

Bukan hanya Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, MPR juga melakukan sosialisasi norma-norma Ketetapan MPR (Tap MPR). Sebelum reformasi dan bahkan pasca reformasi, Ketetapan MPR adalah juga haluan negara. Pancasila, konstitusi UUD NRI Tahun 1945, dan Tap-Tap MPR yang masih berlaku berdasarkan Tap MPR No. I Tahun 2003 merupakan tiga hal yang sangat penting terkait dengan dimensi-dimensi yang mendasar dan strategis bagi bangsa kita.

Sedikitnya ada lima Tap MPR yang membuktikan MPR tidak memberikan ruang kepada korupsi untuk hidup dan berkembang di Indonesia. Pertama, Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Tap MPR ini merupakan salah satu agenda utama era reformasi. Kedua, Tap MPR No. XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sebelum perubahan Pasal 7 UUD 1945 tentang masa jabatan presiden, MPR telah terlebih dahulu mengeluarkan Tap tersebut.

Pembatasan masa jabatan sangat penting agar menghindari berapa kali seorang Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih kembali menurut UUD sehingga MPR mengeluarkan Tap itu. Dalam Tap itu, MPR menetapkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Ketiga, berkaitan dengan aktualisasi nilai-nilai keteladanan dalam sikap dan berperilaku oleh pemimpin negara, pejabat dan tokoh masyarakat, MPR mengeluarkan Tap MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Etika Kehidupan Berbangsa merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan

Dr. H. Ma'ruf Cahyono, SH., MH.
Sekretaris Jenderal MPR RI



bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa.

Rumusan Tap ini disusun dengan maksud untuk membantu memberikan penyadaran tentang arti penting tegaknya etika dan moral dalam kehidupan berbangsa. Etika Kehidupan Berbangsa dirumuskan dengan tujuan menjadi acuan dasar untuk meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta berkepribadian Indonesia dalam kehidupan berbangsa.

Keempat, Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Ketetapan ini dijadikan arah kebijakan yang harus dilakukan pemerintah dalam menghadapi persoalan korupsi. Rekomendasi arah kebijakan ini dimaksudkan untuk mempercepat dan lebih menjamin efektivitas pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yaitu, dengan mempercepat proses hukum terhadap aparatur pemerintahan, terutama aparatur penegak hukum dan penyelenggara negara yang diduga melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dapat dilakukan tindakan administratif untuk memperlancar proses hukum.

Kelima, Tap No II/MPR/2002 tentang Rekomendasi Kebijakan untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional. Tap ini menekankan pemulihan ekonomi nasional. MPR melihat adanya KKN menjadi permasalahan penting yang menghambat pemulihan ekonomi nasional. Tap ini bertujuan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional untuk terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang diikuti oleh stabilitas harga dan nilai tukar rupiah, serta penyelesaian utang negara, penciptaan lapangan kerja, penanggulangan pengangguran, dan pengurangan kemiskinan.

Dari lima hal itu, MPR memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Sejatinya perilaku dan

tindak pidana korupsi adalah mengambil hak-hak orang lain (yang bukan menjadi haknya). Mengambil hak orang lain merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi orang lain. Sebuah pelanggaran hak asasi juga merupakan pelanggaran konstitusi. Jika seseorang mematuhi konstitusi maka ia tidak akan melakukan tindak pidana korupsi.

Pemberantasan korupsi juga berdasarkan asas yang terkandung dalam Pancasila. Angka (indeks) korupsi di Indonesia harus bisa ditekan. Dengan menekan angka (indeks) korupsi maka kesejahteraan rakyat (keadilan sosial) pun bisa terwujud. Pelaksanaan atau pemberantasan korupsi juga harus dengan asas kemanusiaan yang adil dan beradab (Sila Kedua Pancasila).

Jadi, ada kaitan antara Empat Pilar MPR dengan pemberantasan korupsi. Kaitan antara Pancasila, konstitusi UUD NRI Tahun 1945 dengan pemberantasan atau pencegahan korupsi. Dengan memahami dan mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, memahami konstitusi secara baik, termasuk peraturan perundang-undangan, maka dengan sendirinya perilaku koruptif tidak mungkin terjadi.

Sosialisasi Empat Pilar MPR melalui internalisasi nilai-nilai dan norma-norma merupakan upaya supaya bisa mencegah perbuatan korupsi. Karena itu, internalisasi nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam Pancasila dan konstitusi bisa menjadi satu instrumen untuk meminimalisir bahkan menghilangkan sama sekali pikiran-pikiran untuk melakukan perilaku koruptif. Itulah cara yang telah dilakukan MPR. Semua cara dan metode dilakukan MPR mulai dari cara dan metode yang konvensional sampai cara dan metode era digital pada hari ini. Di sinilah diperlukan integritas dan kesadaran berkonstitusi untuk menumbuhkan perilaku anti korupsi. □

Pandemi Covid-19

Momentum Implementasikan Nilai-Nilai Pancasila



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Menghadapi wabah Covid-19 menjadi momentum mengimplementasikan Pancasila secara nyata. Seluruh warga masyarakat mesti meningkatkan gotong-royong, tenggang rasa, toleransi, solidaritas, saling mengingatkan, dan saling membantu.

KURSI-KURSI berbalut kain putih disusun berjejer dengan jarak satu meter satu dengan yang lain. Anggota Komunitas Ojek Online (Ojol) dan para jurnalis Koordinatoriat Wartawan Parlemen menduduki kursi-kursi yang telah tersedia. Pimpinan MPR, yaitu Ketua MPR Bambang Soesatyo didampingi para wakil ketua, antara lain: Ahmad Basarah, Jazilul Fawaid, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad juga sudah hadir. Semua yang hadir mengenakan masker. Bahkan ada di antaranya yang menggunakan sarung tangan. Tidak ada jabat tangan, apalagi cipika-cipiki.

Di Lobi Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari itu, Senin 23 Maret 2020, digelar kegiatan “MPR Peduli, Bersama Melawan Corona”. Penyelenggara kegiatan ini MPR bekerja sama KADIN, Motor Besar Indonesia (MBI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Gabungan Aksi Roda Dua (Garda), dan Gerak BS. Dalam kegiatan ini Ketua MPR Bambang Soesatyo membagikan seribu paket penunjang kesehatan, terdiri dari masker yang bisa dicuci, zaitun hand gel, jamu dalam kemasan, vitamin, sarung tangan, serta beberapa paket lain guna mencegah penularan wabah Corona. Paket

diberikan kepada driver ojek online dan wartawan.

Selain Pimpinan MPR, kegiatan ini juga dihadiri pimpinan Fraksi PPP MPR RI Syaifullah Tamliha; Ketua Umum KADIN Indonesia Rosan P. Roeslani; Ketua Umum PWI Pusat Atal Depari; Ketua PWI Jaya; Koordinator Wartawan Parlemen Romdoni Setiawan; Anggota DPD RI Yorrys Raweyai; Pengurus Yayasan Puteri Indonesia Mustika Ratu Mega Angkasa; Puteri Indonesia yang juga Duta MPR RI Ayu Maulisa Putri dan Kalista Iskandar; serta Ketua Umum Gerak BS Aroem Alzier.

“Memang jumlahnya tak seberapa. Hanya seujung kuku. Namun, setidaknya bisa memotivasi sesama anak bangsa untuk meningkatkan solidaritas saling membantu, bergotong-royong, khususnya membantu para wartawan dan driver ojek online, yang masih harus berjibaku mencari nafkah di jalanan untuk keluarga di tengah pandemi wabah COVID-19,” ujar Bamsuet saat memberikan bantuan.

Menurut Ketua DPR 2014 – 2019 ini, para wartawan dan ojek online merupakan salah satu ujung tombak masyarakat. Di tengah wabah Corona yang melanda, insan pers tetap harus mencari berita



di lapangan untuk memberitahukan informasi perkembangan segala kejadian yang ada kepada masyarakat Indonesia dan dunia.

Sementara para driver ojek online harus tetap berada di jalanan, selain untuk mencari

nafkah keluarganya juga sebagai garda terdepan dalam memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat melalui online service. Berbeda dengan pegawai kantor yang bisa bekerja dari rumah (work from home).

Bamsoet juga memuji gotong-royong warga dari berbagai kalangan yang sudah aktif mendonasikan uangnya untuk membeli berbagai alat medis untuk para tenaga medis di berbagai rumah sakit. Sikap gotong-royong sebagai saripati nilai Pancasila ini, masih tetap hidup di hati masyarakat.

Kegiatan penyerahan bantuan paket pendukung kesehatan itu dilaksanakan di tengah-tengah pandemi wabah Corona. Seperti negara-negara lain di dunia, Indonesia pun masih bergelut melawan virus Corona hingga saat ini. Kasus virus Corona diketahui lewat penyakit misterius yang melumpuhkan kota Wuhan, Cina. Tragedi pada akhir 2019 tersebut terus berlanjut hingga penyebaran virus Corona mewabah ke seluruh dunia.

Dunia sempat tak percaya bahwa Indonesia untuk sekian lama masih nihil temuan kasus virus dengan nama baru Covid-19 itu, sementara negara-negara tetangga ter-



Presiden Joko Widodo

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

dekat sudah terjangkit. Tetapi, pada Senin, 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan dua warga Indonesia terkonfirmasi terinfeksi virus Corona. Kabar ini mengejutkan sekaligus mencemaskan. Kasus pertama ini penularannya justru pada warga Depok, kota yang berbatasan dengan Jakarta.

Sejak itu, jumlah kasus positif Corona terus bertambah dari hari ke hari. Awalnya dua, bertambah menjadi belasan, lalu puluhan, kemudian ratusan, dan sekarang (data pada Sabtu, 28 Maret 2020) sudah melewati angka 1.000 kasus positif Corona (tepatnya 1.155 kasus) dan angka itu terus meningkat. Sementara korban meninggal dunia juga sudah melewati 100 orang (tepatnya 102 orang), dan pasien dinyatakan sembuh hingga hari itu 59 orang. Melihat data korban yang ada, terjadi lonjakan berlipat-lipat atau hampir 500 kali hanya dalam waktu 26 hari.

Pada saat wabah virus Corona di Cina menunjukkan tanda-tanda mereda dan di beberapa negara lain mulai terlihat terkendali, di Indonesia seolah-olah baru saja melewati garis start. Masa penjangkitan di Indonesia masih fase awal. Cepat atau lambat fase awal ini segera terlewati dan pasti mencapai tahap puncak. Jumlah orang terinfeksi membengkak, pasien yang meninggal dunia bertambah, dan wilayah persebaran meluas.

Betapa masif tingkat dan wilayah per-

sebaran virus Corona ini. Mulanya dideteksi di Jakarta, meski kasus pertama terjangkit adalah warga Depok, lalu menjalar ke kota-kota lain di Jawa Barat, meluas hingga Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan provinsi lainnya. Trennya benar-benar meningkat drastis dan mencengangkan. Jika tak ada tindakan yang drastis, bukan mustahil jumlah yang terpapar Covid-19 pada puncak penjangkitan Corona di Indonesia ini bisa mencapai lebih dari 2.000 kasus pada April 2020.

Untuk mengatasi pandemi ini pemerintah telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Setiap hari Gugus

Tugas ini selalu mengupdate perkembangan wabah Corona di Indonesia, di antaranya info mengenai jumlah kasus positif, korban meninggal, dan pasien Corona yang sembuh. Tak hanya itu, Gugus Tugas ini juga menyampaikan (mengampanyekan) langkah-langkah pencegahan penyebaran virus Corona seperti *social distancing*, *physical distancing*, selalu mencuci tangan, mengonsumsi makanan sehat, beraktivitas, belajar, dan bekerja dari rumah.

Tragedi

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid menyatakan keprihatinan atas wabah Corona di Indonesia yang telah menimbulkan lebih dari



Jazilul Fawaid

100 orang meninggal. “Wabah Covid-19 ini adalah tragedi buat bangsa kita. Wabah Corona memang tidak kita sangka-sangka, bahkan dunia pun tidak menduga. Kita semua tidak siap mengantisipasi datangnya Covid-19 yang sudah menjadi pandemi global ini,” katanya kepada *Majelis*.

Anggota MPR lainnya juga menyampaikan keprihatinan atas kondisi jumlah kasus positif Corona dan korban meninggal yang melonjak drastis. Anggota MPR dari Fraksi Partai Gerindra, Putih Sari, menyampaikan keprihatinan atas bencana pandemi di Indonesia ini. Langkah yang perlu dilakukan adalah mengendalikan penyebaran virus Corona ini.

“Saya sangat prihatin atas bencana pandemi ini. Tentu tidak satu pun yang

juga membaca penelitian yang dikeluarkan perguruan tinggi di luar negeri, memang data kasus positif Corona yang sesungguhnya di lapangan bisa lebih besar dari data yang disampaikan pemerintah ke publik,” katanya kepada *Majelis*.

“Tapi saya tidak melihat pemerintah sedang menyembunyikan data. Pemerintah sejauh ini hanya mengungkap fakta yang diperoleh dari laporan-laporan sekalipun fakta di lapangan sesungguhnya jauh lebih besar dari yang dilaporkan,” sambungnya.

Anggota MPR dari Fraksi Gerindra lainnya, dr. Suir Syam, juga menduga jumlah penderita Covid-19 jauh lebih banyak daripada yang dilaporkan pemerintah, karena suspect Corona yang diperiksa

dalam menangani virus Corona ini. Sebab, beberapa kebijakan pemerintah seperti pemeriksaan cepat atau rapid test Covid-19, jumlah mereka yang diperiksa masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia sebesar 265 juta. “Selain itu tidak ada ketegasan dari kebijakan yang dikeluarkan, misalnya meminta masyarakat untuk melakukan *social distancing*. Tapi beberapa pekerja di kawasan industri masih beraktivitas normal,” sebutnya.

Anggota Komisi IX DPR ini juga melihat masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya virus Corona ini. Masih terlihat warga masyarakat yang berkerumun dan berkumpul, berkeliaran di jalan (tidak berdiam diri di rumah). Karena itu Putih Sari



Putih Sari

menginginkan pandemi ini. Berapa pun jumlah kasus positif dan korban meninggal, harus dijadikan antisipasi penanganan yang lebih baik. Yang diperlukan sekarang adalah mengendalikan penyebaran virus Corona ini,” katanya kepada *Majelis*.

Menurut Putih Sari, terjadinya peningkatan jumlah kasus positif Corona karena penularan jenis virus ini memang sangat cepat. Itulah sebabnya WHO menyatakan sebagai pandemi. Sudah sekitar 190 negara yang terjangkit virus ini.

Di sisi lain, anggota MPR dari Fraksi PAN, Saleh Daulay Partaonan, menduga angka kasus positif Corona di Indonesia jauh lebih besar dibandingkan data yang diungkap pemerintah. “Dugaan saya bisa lebih. Saya

masih terbatas dengan laboratorium kesehatan yang terbatas pula. Bahkan Suir Syam menyebutkan, pemerintah terlambat dalam menangani pandemi Corona ini. Ketika korban sudah banyak berjatuh pemerintah baru mulai memikirkan langkah untuk mengatasi penyebaran virus Corona ini.

Suir Syam juga mengakui, imbauan pemerintah untuk melakukan *physical distancing* kurang dipatuhi masyarakat karena masyarakat kurang mendapatkan informasi tentang apa yang dimaksud dengan *physical distancing*. Sosialisasi kepada masyarakat dirasakan masih kurang. Masyarakat juga terlihat panik menghadapi pandemi ini.

Tak jauh berbeda, di mata Putih Sari, pemerintah seharusnya bisa lebih maksimal



Saleh Partaonan Daulay

meminta pemerintah, termasuk aparat pemerintah di bawahnya (aparatur Pemda hingga yang paling bawah di tingkat RT/RW), untuk terus menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat secara benar soal virus Corona ini.

Itulah sebabnya, Saleh Daulay berharap, pemerintah bisa mengambil kebijakan-kebijakan strategis yang dibutuhkan dalam rangka menuntaskan masalah penyebaran virus Corona ini. “Kita berharap pemerintah jangan ragu mengambil kebijakan penting demi melindungi masyarakat luar. Di sisi lain kita juga berharap masyarakat mengikuti imbauan dan arahan dari pemerintah terkait dengan keselamatan diri masing-masing dan masyarakat sekitarnya,” katanya.

Menurut Saleh, sejak awal pemerintah memang sudah mencoba berusaha sungguh-sungguh mengatasi pandemi ini. Tapi persoalannya, kebijakan pemerintah belum dilaksanakan secara maksimal oleh masyarakat. Seharusnya antara kebijakan pemerintah dan pelaksanaan di lapangan harus seiring dan sejalan. Saleh memberi contoh kebijakan soal *social distancing*.

“Kebijakan itu tidak berjalan dengan maksimal. Banyak orang masih berkerumun dan bertemu. Artinya, kebijakan itu belum berjalan maksimal. Karena tidak berjalan

episentrum penyebaran Corona, sehingga perlu dilakukan *lockdown*. Jangan ragu-ragu. Saya dengar pemerintah sedang membuat peraturan pemerintah terkait dengan karantina wilayah. Segera saja dibuat jangan menunggu-nunggu. Jika sudah ada payung hukumnya baru dilakukan *lockdown*,” tegasnya.

Saleh memperkirakan Pemda Jakarta sanggup untuk melakukan *lockdown*. Sebab, Jakarta memiliki APBD yang jalu lebih besar dibanding daerah lainnya. Jika Jakarta di-*lockdown*, Pemerintah DKI Jakarta masih sanggup memenuhi kebutuhan masyarakat

padu, gotong-royong, dan solidaritas sosial mengatasi pandemi ini merupakan pengejawantahan nilai-nilai Pancasila. “Implementasi Pancasila perlu diberi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang kurang dimengerti kaum milenial tentang arti Pancasila,” ujarnya.

Pendapat yang berbeda, Putih Sari tidak menyarankan untuk mengambil kebijakan *lockdown*. Dia melihat negara Korea Selatan yang bisa mengatasi penyebaran virus Corona ini tanpa harus melakukan *lockdown*. “Korea bisa menghadapi wabah ini tanpa *lockdown*. Harapannya kita pun dapat mencontoh mereka. Karena, untuk melakukan *lockdown* banyak hal yang harus dipersiapkan, siap secara ekonomi, siap secara sistem, dan lain-lain,” tuturnya.

Putih Sari juga menyebutkan perlunya gotong royong dan solidaritas sosial untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona. “Justru di saat-saat seperti inilah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diuji. Adanya tenggang rasa, gotong royong, dan solidaritas sosial menjadi kunci kita bisa menghadapi bersama-sama pandemi ini. Sebab, memutus mata rantai penyebaran virus Corona membutuhkan peran serta semua elemen bangsa,” paparnya.

Putih Sari menyarankan agar semua pihak fokus terhadap pencegahan penyebaran virus Corona. “Selain upaya kuratif terhadap mereka yang sudah terpapar, ada jutaan masyarakat Indonesia yang belum terpapar dan ini justru harus segera dilindungi,” ujarnya.

Memang benar dalam situasi krisis seperti ini menjadi momentum mengimplementasikan Pancasila secara nyata. Seluruh masyarakat mesti meningkatkan gotong-royong, tenggang rasa, toleransi, solidaritas, saling mengingatkan, saling membantu. Pemerintah, masyarakat, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, semuanya mesti bahu-membahu bersatu melawan Corona. Inilah momen dan saatnya kita semua mengamalkan Pancasila secara nyata. Jangan masa bodoh, jangan cuek karena itu bertentangan dengan Pancasila dan bukan jati diri bangsa kita. □

DER/EFP/BSC



Suir Syam

maksimal maka dikhawatirkan program yang mestinya baik itu tidak berjalan sesuai rencana,” jelasnya.

Gotong royong

Pandemi global ini, lanjut Saleh Daulay, tidak hanya masalah Indonesia tetapi juga internasional. Karena itu, seluruh masyarakat dan komponen masyarakat ikut bergotong-royong, bahu-membahu, agar kita bisa memerangi dan mencegah penyebaran virus Corona sehingga masalah Corona di Indonesia bisa cepat tuntas.

Saleh Daulay juga menyarankan pemerintah untuk mulai berpikir melakukan *lockdown* kota-kota yang menjadi episentrum, seperti Jakarta. “Jakarta menjadi

yang kurang mampu. “Itu mesti dilakukan. Sekali-sekali pemerintah menunjukkan kepedulian memerangi virus Corona ini,” ujarnya.

Suir Syam juga menegaskan, pemerintah perlu melakukan *lockdown* total agar penyebaran virus Corona bisa dihentikan. “Kalau pandemic Covid-19 ini mau cepat berakhir maka lakukan *lockdown* total dengan penegakan hukum yang tanpa pandang bulu,” ujarnya.

Melihat kasus positif Covid-19 semakin banyak dan korban meninggal makin bertambah, Suir Syam menegaskan, perlu kebersamaan dan bersatu padu melawan Covid-19 ini dengan mematuhi imbauan dari pemerintah dan pemimpin agama. Bersatu



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Momentum Menerapkan Nilai-Nilai Pancasila Hadapi Wabah Virus Corona

Inilah momentum untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu gotong-royong, saling berbagi, saling mendukung, dan saling sinergi mengatasi masalah virus Corona ini.

INDONESIA saat ini sedang menghadapi wabah virus Corona. Menghadapi masalah bangsa ini diperlukan kegotong-royongan dan solidaritas di antara anak bangsa. Inilah momentum untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu gotong-royong, saling berbagi, saling mendukung, dan saling sinergi mengatasi masalah virus Corona ini.

Demikian rangkuman dari Diskusi Empat Pilar MPR yang bertema: “Ideologi Pancasila dalam kaitan Wabah Virus Corona” di Media Center MPR/DPR, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (17/3/2020). Diskusi yang diselenggarakan Biro Humas MPR RI dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen dan Biro Humas MPR RI dan BPIP ini menghadirkan narasumber Ketua MPR Bambang Soesatyo, Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP Romo



Bambang Soesatyo

Benny Susetyo, Rumah Bhinneka Saut Situmorang, dan pakar komunikasi UI Prof. Effendy Ghazali.

Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan,

untuk menghadapi masalah wabah virus Corona perlu mengedepankan nilai-nilai Pancasila, yaitu gotong-royong dan solidaritas antarsesama anak bangsa. Dia mencontohkan



Romo Benny Susetyo

menjaga jarak (*social distancing*) merupakan salah satu bentuk solidaritas, karena selain untuk melindungi diri sendiri juga membantu untuk tidak menularkan ke orang lain.

Bamsoet menyebut, bentuk lain dari

gotong-royong dan solidaritas sosial adalah para konglomerat dan pengusaha menyisihkan keuntungan dengan menyediakan masker dan antiseptic tangan bagi masyarakat yang kurang mampu. “Sisihkan sebagian keuntungan untuk membagikan masker, antiseptic tangan, dan vitamin-vitamin ke Puskesmas-Puskesmas. Inilah kegotong-royongan yang ingin kita kedepankan,” katanya.

Di balik musibah ini, Bamsoet melihat peluang yang bisa dimanfaatkan para pengusaha, yaitu berbisnis kekayaan rempah-rempah Indonesia, seperti jahe merah, dan lain-lain, serta buah-buahan dalam negeri. “Di samping musibah, tetapi juga bisa menjadi berkah,” ujarnya.

Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP Benny



Saut Situmorang

Susetyo sependapat bahwa saat ini bisa menjadi momentum untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. “Pancasila kalau diperas adalah gotong-royong. Gotong-royong adalah saling berbagi,

Sekretariat Jenderal MPR

Ini Langkah Setjen MPR Cegah Penyebaran Virus Corona

Langkah-langkah ini untuk merespons kebijakan pemerintah dan agar terhindar dari wabah COVID-19 tanpa mengganggu pelaksanaan tugas Setjen MPR.

SEKRETARIAT Jenderal MPR menetapkan langkah-langkah pencegahan dan perlindungan terhadap penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di lingkungan Setjen MPR. Langkah ini sebagai tindak lanjut dari keputusan pemerintah yang telah menyatakan penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional (bencana non-alam), dan arahan Presiden bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat bekerja dari rumah serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi pemerintah.

Langkah-langkah Setjen MPR itu tertuang dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal MPR Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Perlindungan terhadap Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Setjen MPR dan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Setjen MPR. Surat Edaran ini ditujukan kepada seluruh pegawai di

lingkungan Setjen MPR dengan tujuan untuk mencegah dan meminimalisir serta mengurangi risiko COVID-19 di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya.

“Langkah-langkah ini untuk merespons kebijakan pemerintah dan agar terhindar dari wabah COVID-19 tanpa mengganggu pelaksanaan tugas Setjen MPR sebagai supporting lembaga MPR yang tetap harus berjalan maksimal dengan kondisi yang ada,” kata Ma’ruf Cahyono, Sekretaris Jenderal MPR, di Jakarta, pertengahan Maret lalu.

Langkah-langkah yang dilakukan Setjen MPR untuk mencegah penyebaran COVID-19 adalah: *Pertama*, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), antara lain dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan seimbang, memperbanyak konsumsi buah dan sayuran; beristirahat yang cukup dan membatasi bekerja melampaui jam kerja (lembur); rutin mencuci tangan menggunakan sabun antiseptic dan air mengalir sebelum dan sesudah makan, setelah menyentuh barang-barang yang berpotensi

dipegang oleh banyak orang (gagang pintu, tombol lift, dan lain-lain), setelah bekerja dan beraktivitas di dalam dan luar kantor; menggunakan masker bila batuk/bersin atau menutup mulut dan hidung dengan tisu, sapu tangan atau lengan atas; menghentikan kebiasaan merokok karena dapat menurunkan imunitas tubuh.

Kedua, menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan bersih, antara lain dengan membuang sampah yang berpotensi menimbulkan penularan penyakit (tisu, masker bekas pakai) dan sampah lain ke tempat sampah/kantong tertutup; membersihkan tempat-tempat yang sering terpegang/disentuh banyak pihak (meja rapat, gagang pintu, tombol lift, pegangan tangga, mesin presensi, gagang kursi, dan lain-lain) dengan desinfektan; memaksimalkan penggunaan sirkulasi udara dengan baik dan ventilasi cahaya yang cukup; menyediakan bahan/kebutuhan yang diperlukan untuk menjaga kebersihan.

Ketiga, perlindungan kesehatan diri selama perjalanan, antara lain dengan menunda

saling mendukung, dan saling sinergi. Semua kekuatan elemen bangsa, partai politik, tokoh agama, dan semuanya saling bergotong royong mengatasi masalah ini,” paparnya.

Dia juga mencontohkan nilai-nilai Pancasila, seperti sikap tenggang rasa, respek satu dengan yang lain. “Menjaga jarak, tidak keluar rumah, etika batuk, menggunakan masker, merupakan wujud dari nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan itu peduli satu sama lain. Tidak memborong barang berlebihan, itu artinya tidak menyusahkan orang lain. Itu menjaga persatuan. Jika masing-masing respek satu sama lain, artinya mengimplementasikan Pancasila dalam praktik kehidupan sehari-hari,” tambahnya.

Begitu pula Saut Situmorang. Ia menyebut, bencana besar seperti wabah



Effendy Ghazali

Corona ini harus memerhatikan variabel-variabel kecil. Pancasila sudah mengingatkan soal variabel-variabel kecil itu, seperti respek pada orang lain, tenggang rasa, konsensus dengan orang lain, bijaksana di

kerumunan. “Pancasila hari ini sedang diuji. Pancasila menjadi harapan, jalan, dan tujuan yang sekaligus memungkinkan kita untuk adil,” ujarnya.

Sementara itu pakar komunikasi UI, Prof Effendy Ghazali, menyebutkan, pemerintah tidak perlu melakukan *lockdown* dalam konteks keamanan, seperti menutup Bandara atau lainnya. “Yang diperlukan adalah *social lockdown* atau *self lock down*, yaitu *lockdown* oleh warga negara sendiri. Kita bisa melakukan *social lockdown* atau *self lockdown*. Modalnya adalah Pancasila dan gotong-royong. Artinya, kita betul-betul menahan diri. Kita sikapi wabah virus Corona ini dengan Pancasila dan gotong-royong,” katanya. □

BSC

perjalanan dinas ke luar negeri/luar daerah kecuali untuk keperluan yang tidak dapat ditunda; membatasi kontak langsung dengan orang lain selama perjalanan; tidak menyentuh wajah tanpa mencuci tangan terlebih dahulu; menggunakan masker jika ada gejala batuk/bersin; mengurangi interaksi dengan orang lain yang sedang sakit dengan gejala batuk/pilek/bersin.

Keempat, jika melakukan perjalanan ke luar negeri atau terkonfirmasi terinfeksi COVID-19 maka langkah yang dilakukan adalah karantina mandiri (*self quarantine*) selama 14 hari sejak kembali ke Indonesia dan membatasi interaksi dengan orang lain. Jika dalam 14 hari mengalami demam, batuk, pilek, tanpa sesak nafas diminta untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Bila dalam 14 hari tidak dijumpai gejala demam, batuk, pilek, maka tetap harus memeriksakan kondisi kesehatan ke rumah sakit untuk mendapatkan surat keterangan sehat.

Selain itu, Setjen MPR juga melakukan penyesuaian sistem kerja dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19. Lang-

kah yang dilakukan adalah ASN Setjen MPR dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya dengan ketentuan pejabat eselon I, II, III, tetap melaksanakan tugasnya di kantor sedangkan staf khusus, tenaga ahli, pejabat eselon IV, dan para pegawai dapat bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*), sementara tenaga fungsional medis dan para medis Poliklinik MPR tetap bekerja sesuai ketentuan hari dan jam kerja yang berlaku di lingkungan Setjen MPR. Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2020.

Untuk penyelenggaraan kegiatan, Setjen MPR membuat ketentuan untuk menunda atau membatalkan seluruh penyelenggaraan tatap muka yang menghadirkan banyak peserta. Sedangkan penyelenggaraan rapat-rapat dilakukan sangat selektif sesuai prioritas dan urgensi, serta memanfaatkan teknologi dan informasi yang tersedia. Setjen MPR juga menerapkan *social distancing* (memperhatikan jarak aman) jika sangat

urgen melakukan rapat di kantor.

Untuk perjalanan dinas, Setjen MPR membuat ketentuan perjalanan dinas dalam negeri agar dilakukan secara selektif dan sesuai tingkat prioritas dan urgensinya. Sedangkan untuk perjalanan dinas luar negeri ditunda pelaksanaannya.

Untuk mencegah penyebaran COVID-19, Setjen MPR telah melakukan desinfeksi di lingkungan kerja Setjen MPR. “Kita gerak cepat semua. Hand sanitizer atau pembersih tangan sudah ditempatkan di berbagai lokasi lalu lalang orang. Setjen MPR juga akan memberikan vitamin untuk imunitas kepada seluruh pegawai,” kata Ma’ruf Cahyono.

“Pada akhirnya adalah kesadaran dari diri sendiri untuk berupaya melakukan langkah-langkah antisipasi secara mandiri. Sebab, aktivitas dan interaksi tidak hanya di lingkungan kerja saja, tapi juga di luar seperti terminal, stasiun. Kita berharap mudah-mudahan wabah COVID-19 ini bisa cepat berlalu,” pungkasnya. □

BSC



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Jazilul Fawaid Wakil Ketua MPR RI

Ini Menyangkut Masalah Hidup dan Mati Rakyat Indonesia

SAMPAI dengan Sabtu, 28 Maret 2020, jumlah kasus positif Corona (Covid-19) di Indonesia sudah melampaui 1.000 orang. Korban meninggal dunia pun melewati 100 orang. Memang, dalam beberapa pekan terakhir jumlah korban positif Corona naik secara signifikan. Sejak diumumkan pertama kali dengan ditemukan pasien positif Corona di Indonesia pada awal Maret 2020, yaitu ditemukan dua orang positif Corona, terjadi peningkatan 500 kali lipat dalam waktu satu bulan.

Pemerintah telah berulang kali mengkampanyekan *social distancing* dan *physical distancing* serta belajar dan bekerja dari rumah guna mencegah masifnya penyebaran virus Corona. Pasalnya, penularan sangat rentan pada orang-orang yang masih bekeliraran di luar rumah. Namun, harus diakui kedisiplinan warga mengikuti imbauan pemerintah masih perlu ditingkatkan.

Melihat kondisi terakhir penyebaran Covid-19, Majelis mewawancarai Wakil

Ketua MPR Jazilul Fawaid. Berikut petikan wawancara dengan politisi PKB itu.

Jumlah penderita positif Corona semakin banyak, korban meninggal pun semakin bertambah. Apa tanggapan Bapak?

Pertama, wabah Covid-19 ini adalah tragedi buat bangsa kita. Saya turut berbelas sungkawa pada korban yang meninggal dan mudah-mudahan keluarga mereka diberikan ketabahan menghadapi musibah ini. Kedua, wabah Corona memang tidak kita sangka-sangka, bahkan dunia pun tidak menyangka. Kita semua tidak siap mengantisipasi datangnya Covid-19 yang sudah menjadi pandemi global ini.

Jumlah korban meninggal yang terus bertambah menunjukkan masyarakat kita belum siap menghadapi situasi ini. Kita memprediksi situasi seperti ini bisa berlangsung lama dan panjang jika pemerintah dan masyarakat tidak erat bekerjasama untuk bersama-sama mengatasi wabah ini

karena penyebaran virus Corona ini sulit sekali dideteksi.

Apakah benar jumlah penderita positif Corona sesungguhnya lebih besar dari data yang ditungkap pemerintah?

Pemerintah melalui gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 setiap hari menyampaikan *update* perkembangan penanganan virus Corona, baik dalam pola penyebaran, jumlah mereka yang positif, korban meninggal, dan mereka yang masih terpantau. Berapa besar jumlah korban Corona dan mereka yang terpapar Corona memang tergantung dari kesadaran masing-masing pihak, termasuk pemerintah, tenaga medis, dan terutama masyarakat.

Jika diamati penyebaran virus Corona di Indonesia ini tergolong cepat. Apa tanggapan Bapak?

Virus Corona ini memang sangat luar biasa. Penularannya sangat cepat. Namun pemerintah juga sudah mengkampanyekan cara mencegah penularan virus ini melalui

berbagai saluran informasi, antara lain *social distancing*, *physical distancing*, melakukan kebiasaan yang higienis, seperti sering mencuci tangan, memakai masker, terutama petugas medis.

Sejauh ini bagaimana Bapak melihat langkah pemerintah menangani penyebaran virus Corona ini?

Saya mengapresiasi langkah yang sudah dilakukan pemerintah. Sampai saat ini pemerintah sudah berbuat banyak. Namun, pencegahan penyebaran virus Corona ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita semua, pemerintah bersama-sama rakyat. Kuncinya adalah kesamaan visi pemerintah dan seluruh warga negara untuk mencegah penyebaran virus Corona. Situasi sekarang ini sudah sangat berbahaya. Jika sampai berlarut-larut maka dampaknya akan menyebar ke segala arah dan sangat luas. Kita sudah mulai merasakan dampak negatif ini.

Misalnya, jika korban terus bertambah maka akan berimbas pada keputusan untuk melakukan *lockdown*. Mereka yang paling merasakan imbasnya adalah pekerja-pekerja informal yang jumlahnya sangat banyak, seperti kuli bangunan, penjual gorengan, penjual bakso, dan lainnya. Mereka tidak memiliki penghasilan lagi karena tidak bisa berdagang akibat *lockdown*. Juga para pekerja dan buruh pabrik yang pasti terkena dampak semisal ancaman PHK.

Menghadapi situasi itu pemerintah harus menyiapkan skema. Menurut saya, pemerintah sudah pasti memikirkan semua aspeknya dan sudah membuat skema. Mudah-mudahan skemanya tepat dan sesuai kebutuhan. Persoalannya anggaran pasti banyak dialokasikan untuk mencegah penyebaran virus Corona. Tapi, kalau penyebaran Corona ini semakin luas tentu menjadi masalah berat juga. Karena itu tidak ada jalan lain kecuali semuanya harus memahami tanggung jawab masing-masing, baik pemerintah, tenaga medis, dan masyarakat. Meskipun pemerintah sudah menyiapkan skema seperti rumah sakit, tenaga medis, dan lainnya, kalau masyarakat tidak memiliki kesadaran untuk mengikuti anjuran pemerintah, seperti *social distancing*, *physical distancing*, maka semua upaya menjadi percuma. Penyebaran virus semakin menjadi-jadi, rumah sakit tidak mampu

menampung, dan tenaga medis kewalahan.

Kesadaran masyarakat menjadi penting. Bagaimana Bapak melihat kesadaran masyarakat saat ini menghadapi pandemi Corona?

Kesadaran sebagian masyarakat masih kurang menghadapi pandemi berbahaya ini. Mereka merasa sehat-sehat saja dan tidak akan tertular sehingga mereka banyak mengabaikan anjuran, seperti *social distancing* dan lainnya. Ini sangat berbahaya. Mereka tidak menyadari bahwa meski merasa kuat, namun jika tertular mereka bisa menjadi *carrier* yang akan menularkan kepada orang lain. Menumbuhkan kesadaran ini menjadi PR terberat kita saat ini.

Sekarang saatnya memaksimalkan pem-

sosial, tenggang rasa, dalam mengatasi pandemi Corona. Apa pendapat Bapak sebagai pimpinan MPR?

Memang benar dalam situasi krisis seperti ini menjadi momentum mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara nyata. Seluruh masyarakat mesti meningkatkan gotong-royong, tenggang rasa, toleransi, solidaritas, saling mengingatkan, saling membantu. Pemerintah, masyarakat, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, semuanya mesti bahu-membahu bersatu melawan Corona ini. Inilah momen dan saatnya kita semua mengamalkan Pancasila secara nyata. Jangan masa bodoh, jangan cuek, karena itu bertentangan dengan Pancasila dan bukan jati diri bangsa kita.



berdayaan seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, dan seterusnya. Misalnya, memberikan protokol cara penanggulangan Corona kepada warga, edukasi yang benar soal virus Corona, terutama tahap-tahap penularan dan inkubasi dan apa yang harus dilakukan. Jadi, tidak lagi hanya sebatas imbauan semata. Pemerintah pusat dan daerah dalam koordinasi yang jelas, transparan, dan ada target. Dalam 30 hari harus ada pengurangan tingkat penyebaran virus dan jumlah mereka yang terpapar. Masyarakat pun akan tenang dan memberi kepercayaan sepenuhnya kepada masyarakat.

Dalam kaitan dengan MPR, saat ini sebenarnya momentum untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, seperti gotong-royong, solidaritas

Upaya mengatasi virus Corona ini bisa berlangsung lama jika tidak ada penanganan serius. Perlukah langkah drastis dengan me-lockdown Indonesia?

Intinya, untuk mencegah meluasnya pandemi ini perlu kordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga medis, dan masyarakat luas. Semuanya harus serius, karena ini menyangkut masalah hidup dan mati rakyat Indonesia. Sekali lagi, pemerintah harus mempunyai skema yang jelas mengatasi pandemi ini. Masyarakat pun harus memiliki kesadaran dalam diri masing-masing untuk berperan memerangi virus Corona ini dengan cara mematuhi setiap upaya-upaya yang dilakukan pemerintah. Masyarakat jangan menyepelekan bahaya pandemi virus Corona ini. □

Meninjau Tanah Papua

Pastikan di Papua ada **Kemakmuran, Keadilan,** dan Kesejahteraan

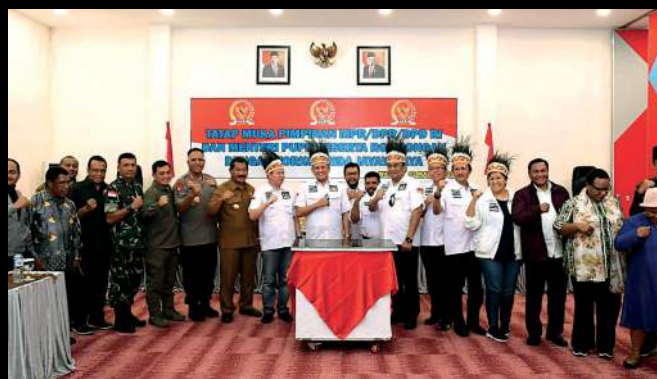


FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Pimpinan MPR, DPR, dan DPD belum lama mengunjungi Timika, Wamena, dan Sentani, yang semuanya di Provinsi Papua. Di sana mereka meninjau pembangunan perumahan, pasar, dan ruko, serta mengecek kesiapan Papua sebagai tuan rumah PON 2020

BERTEMPAT di Hotel Amo, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, 3 Maret 2020, digelar tatap muka Pimpinan MPR, DPR, DPD, dan Kementerian PUPR dengan Forkopimda Jayawijaya. Hadir dalam pertemuan itu Ketua MPR Bambang Soesatyo; Wakil Ketua DPD Sultan Najamudin; Wakil Ketua DPR Rachmad Gobel; para Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat, Arsul Sani, Fadel Muhammad; anggota DPD dan DPR dari dapil Papua dan Papua Barat yang tergabung dalam MPR For Papua, seperti Yorrys Raweyai, Filep Wamafma, Herlina Munib, Ruben Uamang, Willem Wandik, Trifena Tinal; serta pejabat dan jajaran aparaturnya pemerintahan Kabupaten Jayawijaya, seperti Bupati Jayawijaya John Richard Banua, dan Kapolda Papua Paulus Waterpauw.

Dalam sambutan, Bambang Soesatyo menuturkan, apa yang dilakukan pada pagi itu merupakan kegiatan yang diberkati oleh Tuhan. Para anggota MPR, menurut Bambang Soesatyo, datang ke Papua ingin memastikan bahwa di pulau paling timur di Indonesia itu ada kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan.

Selanjutnya Bambang Soesatyo menegaskan bahwa kita perlu dan wajib merangkul saudara-saudara kita yang ada di tanah ini.

Dalam membangun Papua, pemerintah telah memberi dana otsus. Otsus, kata Bambang Soesatyo, akan berakhir pada 2021. Dan, “Kita akan dorong agar dana otsus tetap diberikan”, tegasnya.

Dalam pertemuan yang diliput oleh berbagai media massa itu juga ditandatangani Ikrar Kebangsaan. Ikrar itu berisi untuk menghadirkan suasana yang komprehensif bagi masa depan Tanah Papua yang berlandaskan pada keadilan, kesejahteraan, dan kebudayaan.

Dalam kunjungan yang mendapat perhatian masyarakat Wamena, pimpinan MPR, DPR, DPD, dan Kementerian PUPR melakukan peninjauan pembangunan pasar, ruko, dan perumahan. Pasar, ruko, dan perumahan yang dibangun itu untuk memulihkan suasana dan perekonomian di kabupaten yang berhawa sejuk itu.

Saat di lokasi pembangunan pasar, ruko, dan perumahan, Bambang kepada wartawan mengatakan, kedatangannya pada hari itu ke Papua untuk memastikan rakyat Papua yang kemarin menjadi korban kerusuhan yang rumah, pasar, dan tokonya terbakar, dibangun kembali oleh pemerintah. “Dan, hari ini kita menyaksikan upaya-upaya *recovery* dan pemulihan di Wamena”, tuturnya. Sebanyak 193 rumah dan 400 unit ruko dibangun



pemerintah untuk memulihkan perekonomian dan kehidupan di sana. “Sedang dikerjakan dan kami menyaksikan”, tutur pria yang akrab dipanggil Bamsoet itu. Untuk itu, dia memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kementerian PUPR, Bupati Jayawijaya, dan TNI AD yang telah dengan cepat, tanggap, melakukan *recovery* bagi

masyarakat Wamena.

Fadel Muhammad dalam kesempatan yang sama mengakui bahwa perkembangan di Papua sangat luar biasa. “Setelah melihat Timika, Wamena, Sentani, dan Jayapura, perkembangannya sangat mengembirakan,” tuturnya. Di provinsi ini, menurut mantan Gubernur Gorontalo, itu mempunyai banyak

potensi yang bisa dikembangkan, seperti pariwisata, perikanan, dan peternakan. “Tanah dan air yang luas dan potensial sangat menjanjikan untuk dikembangkan”, ucapnya.

Arsul Sani mengatakan, Ikrar Kebangsaan yang ditandatangani perlu dimaknai bahwa MPR mempunyai komitmen yang kuat untuk memajukan Papua dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Hadirnya pimpinan MPR, DPR, dan DPD, ke Papua, menurut Arsul Sani, adalah untuk menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tidak meninggalkan Papua dalam pembangunan. “Juga sebagai wujud MPR mendukung wakil rakyat yang berasal dari Provinsi Papua dan Papua Barat dalam MPR For Papua” ucapnya.

Pada September 2020, Provinsi Papua akan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON). Seiring semakin dekatnya waktu pelaksanaan, pimpinan MPR, DPR, DPD, dan Kementerian PUPR mengadakan



peninjauan di Kompleks Stadion Papua Bangkit, Sentani.

Hadir dalam peninjauan itu Ketua MPR Bambang Soesatyo; Wakil Ketua DPD Sultan Najamudin; Wakil Ketua DPR Rachmad Gobel; Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat, Arsul Sani, Fadel Muhammad; anggota DPD dan DPR dari dapil Papua dan Papua Barat yang tergabung dalam MPR For Papua, seperti Yorrys Raweyai, Filep Wamafma, Herlina Munib, Ruben Uamang, Willem Wandik, Trifena Tinal; serta Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal.

Dalam peninjauan yang diliput puluhan media nasional dan lokal, Bambang Soesatyo, Fadel Muhammad, Arsul Sani, dan Lestari Moerdijat melihat perkembangan pembangunan hall cabang aquatik. Di hall yang nantinya digunakan untuk mempertandingkan berbagai cabang olahraga aquatik itu, Fadel Muhammad bahkan sampai naik ke tribun penonton.

Selepas melihat progress pembangunan hall cabang aquatik, selanjutnya pimpinan MPR, DPR, DPD, dan Kementerian PUPR menuju ke Stadion Papua Bangkit. Di stadion yang digunakan untuk pertandingan cabang olahraga sepakbola tersebut, para pimpinan sampai mengecek rumput lapangan. Fadel Muhammad menyebut Stadion Papua Bangkit sangat bagus.

Kepada para wartawan, Bambang Soesatyo menuturkan, setelah dia mengamati progress atau perkembangan kawasan Stadion Papua Bangkit, dia mantap mengatakan: "Hanya dua kata, dahsyat dan luar biasa". Pembangunan yang begitu cepat untuk persiapan PON Papua, menurut



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Bambang Soesatyo, diibaratkan seperti kisah Sangkuriang dengan tangkuban perahu-nya. "Dalam waktu setahun bangunan lebih dari Rp1 triliun hampir selesai dan ditargetkan Juni bisa tuntas", harapnya. Dia berharap. September 2020, PON bisa dimulai dengan baik. "Saya yakin dan percaya dengan kerjasama semua pihak sarana PON bisa rampung sesuai target", ucapnya.

Selepas PON, dia meminta agar Pemerintah Provinsi Papua merawat sarana yang sudah dibangun dengan baik agar aset yang ada tidak menjadi aset yang sia-sia sebagaimana pernah terjadi pada PON-PON sebelumnya, begitu PON selesai, sarana yang ada tidak dirawat hingga hancur. "Jangan sampai bangunan yang dibiayai hingga Rp 1 triliun sia-sia", tegasnya. Membangun kompleks olahraga PON Papua, menurut Bambang Soesatyo, merupakan salah satu proyek

besar yang berstandar internasional. Dia berharap, dalam ajang pertandingan dan perlombaaan berbagai cabang olahraga itu lahir atlet-atlet yang beraraf nasional, bahkan internasional. di seluruh cabang olahraga.

Arsul Sani dalam peninjauan itu mengakui, proses pembangunan sarana PON terus dilakukan. "Itu yang kita lihat", tuturnya. Paling penting, menurut pria asal Pekalongan, Jawa Tengah, itu adalah sebelum PON dimulai semua sarana yang dibutuhkan sudah rampung sehingga pada saat PON berlangsung tak ada *complaint*, misalnya kekurangan fasilitas ini dan itu. "Atlet akan nyaman bertanding atau berlomba apabila apa yang dibutuhkan ada. Karena hal itu akan mempengaruhi prestasi dalam menelurkan *record* baru dalam berbagai cabang olahraga," katanya. □

AWG

Stan MPR Didatangi Ratusan Pengunjung



SEJAK 2008, setiap tahun bertempat di Jakarta Covention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Mahkamah Agung (MA) melaporkan capaian kinerja tahunannya. Dalam acara itu hadir para hakim MA dari seluruh Indonesia. Dalam kegiatan itu, lembaga negara yang beralamat di Jl. Medan Merdeka Timur, Jakarta, itu juga rutin menggelar 'Kampung Hukum'. Kampung Hukum adalah pameran yang diikuti oleh berbagai lembaga negara, kementerian, dan lembaga pemerintah dan swasta lainnya yang terkait dengan bidang hukum. Di sini para peserta memamerkan produk-produk hukum dalam bentuk buku, kajian, diskusi, informasi, brosur, dan dokumentasi lainnya.

Dalam acara "Kampung Hukum MA" yang digelar pada 25 - 26 Februari 2020, MPR juga ikut berpartisipasi. Menurut Kabiro Humas Setjen MPR, Siti Fauziah, MPR telah

lima kali mengikuti kegiatan itu. "Ini yang kelima kita berpartisipasi", ujarnya.

Dalam kegiatan itu, stan MPR memamerkan buku yang berisi kajian, rangkuman, dan tulisan seputar hukum tata negara dari pikiran anggota MPR, Badan Pengkajian, Lembaga Pengkajian (Komisi Kajian Ketatanegaran), serta para pakar dan dosen. "Buku-buku yang ada tidak diperjualbelikan, sehingga buku-buku itu tak ada di toko buku", ujarnya. Sebagai buku yang dapat dikatakan 'langka,' pastinya buku-buku itu dibutuhkan oleh para hakim yang datang dari berbagai daerah. "Dan, kita membagikan buku-buku itu secara gratis, silahkan mengambil," ungkap Siti Fauziah.

Ikut dalam acara 'Kampung Hukum,' menurut Siti Fauziah, merupakan salah satu cara untuk memperkenalkan atau menyosialisasikan lembaga MPR, baik tugas, wewenang, maupun kelembagaannya kepada

masyarakat. "Apalagi pimpinan MPR saat ini ada 10 orang", ucapnya. Dalam memperkenalkan MPR, selain membagikan buku-buku secara gratis, stan MPR juga mengadakan kuis untuk para pengunjung. Kuis itu berupa pertanyaan yang mesti dijawab oleh para pengunjung. Pertanyaannya seputar Empat Pilar MPR, seperti: teks Pancasila, menyanyikan lagu Indonesia Raya, nama-nama pimpinan MPR. Pengunjung yang dapat menjawab pertanyaan dengan benar hadiah menarik, antara lain payung, gelas, tumbler, dan lainnya. "Pokoknya hadiahnya bermanfaat deh," ujarnya Siti Fauziah sembari tersenyum. Acara kuis ini dilakukan agar pengunjung tidak bosan dengan metoda yang sudah-sudah, monoton.

Siti Fauziah bersyukur, dalam pameran yang berlangsung selama dua hari itu, pengunjung yang mendatangi stan MPR mencapai ratusan orang. "Jadi sangat ramai", ungkapnya. Para pengunjung tidak hanya mahasiswa, hakim, juga masyarakat lainnya yang berduyun-duyun ke stan MPR, termasuk Ketua MA, Muhammad Hatta Ali, Ketua MPR Bambang Soesatyo, dan Sesjen MPR Ma'ruf Cahyono.

Kunjungan Bapak Hatta Ali di stan MPR terjadi pada hari pertama Kampung Hukum. "Beliau tampak antusias karena banyak buku yang dibutuhkan hakim," terang Siti Fauziah. Sementara Ketua MPR Bambang Soesatyo mampir pada hari kedua. "Beliau menyatakan bangga MPR bisa mengikuti acara itu", ujarnya Siti Fauziah. Bamsoet berpesan, MPR harus tetap mempublikasikan MPR, bukan hanya di kegiatan MPR tetapi juga di kegiatan kelembagaan lain. Selain Ketua MA dan Ketua MPR, menurut Siti Fauziah, Sesjen MPR Ma'ruf Cahyono juga hadir di sini dan memberikan apresiasi. □

AWG



Sekjen Liga Muslim Dunia

Perlu Dialog Membangun Kesepahaman dan Saling Menghargai

Keragaman budaya, etnis, dan agama, semestinya menjadi pendorong untuk membuat relasi dan jembatan yang mengikat kemanusiaan secara umum. Sesungguhnya tidak ada perbedaan karena semua memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang sama.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

SEKRETARIS Jenderal Liga Muslim Dunia (World Moeslim League), Dr. Muhammad Abdulkarim Al Issa, menyatakan, meski ada perbedaan agama dan etnis namun semua memiliki nilai-nilai yang sama dan berusaha mewujudkan keharmonisan bersama. Untuk itu diperlukan dialog guna membangun kesepahaman yang sama dan saling menghargai.

“Kebhinnekaan dalam keragaman budaya, etnis, dan agama, semestinya menjadi pendorong untuk membuat relasi dan jembatan yang mengikat kemanusiaan secara umum. Sesungguhnya tidak ada perbedaan karena semua memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang sama,” katanya dalam seminar bertema: “Beragama yang Harmonis dan Konstruktif yang menguatkan Kehidupan Berbangsa dan Beragama” di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Hadir dalam seminar ini Ketua MPR Bambang Soesatyo, para Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Syarieffuddin Hasan, dan Ahmad Muzani; serta pimpinan dan anggota Badan Sosialisasi MPR, Badan Pengkajian, dan Komisi Ketatanegaraan, perwakilan Ormas, dan para mahasiswa.

Menurut Abdulkarim, saat ini dunia sedang

mengeluhkan adanya kebencian, baik yang terungkap maupun tidak terungkap. Kebencian ini disebabkan kurangnya pendidikan, keluarga yang tidak mengajarkan cara berpikir inklusif dan memberi pemahaman bahwa Tuhan menciptakan hidup ini beragama kepada anak-anak.

“Jalan keluarnya adalah melakukan dialog yang obyektif dan membangun. Selain itu, peran keluarga untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang pentingnya perilaku kemanusiaan dan kebangsaan,” katanya.

Persoalan lain yang dihadapi dunia, lanjut Abdulkarim, adalah adanya benturan peradaban dan etnis. Benturan peradaban dan etnis itu bisa mengarah pada perang. Paling tidak muncul kebencian. Ini akan memengaruhi keharmonisan hidup manusia. “Keragaman dan kebhinnekaan itu tidak dimanfaatkan secara baik sehingga mengarah pada negatif. Sekarang dunia mengalami apa yang disebut takut kepada orang yang berbeda,” paparnya.

Abdulkarim juga menyebutkan adanya kesalahan terkait gaya yang tidak benar





dalam beragama. Ini disebabkan karena konsep yang tidak benar dari orang tersebut tentang agamanya, yaitu tidak memakai teks-teks secara benar dan tidak melaksanakan teks-teks itu dengan baik.

Jalan keluar dari masalah itu adalah dialog membangun kesepahaman yang sama dan saling menghargai. "Dialog yang obyektif dengan tujuan yang sama. Saling menguatkan nilai-nilai kesamaan secara kebangsaan dan kemanusiaan. Ini bisa menghadirkan keharmonisan dan kedamaian secara bersama-sama," katanya.

Menjaga Kerukunan

Dalam seminar yang dipandu Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, semua tokoh agama yang hadir setuju dengan pernyataan Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia ini. Para tokoh agama yang hadir, antara lain: Ketua Muhammadiyah Syafiq A Mughni, Ketua Umum PGI Pdt Gomar Gultom, Wakil Ketua II KWI Mgr Paskalis Bruno Syukur, Ketua Umum Permaduhdi (Persatuan Umat Budha Indonesia) Prof. Dr. Philip K Wijaya, Ketua Umum PHDI Mayjen TNI Purn Wisnu Bawa Tenaya, dan Ketua Matakini Budi Santoso Tanuwibowo

Ketua PP Muhammadiyah, Syafiq A. Mughni, menyebutkan, persoalan kebangsaan bukan dari agama tetapi muncul dari politik, disparitas ekonomi, persoalan etnik, dan lainnya. Dalam hal ini peran tokoh agama sangat penting dalam menyelesaikan persoalan kebangsaan. "Agama tidak hadir sebagai problem, tetapi justru menyelesaikan problem-problem," ujarnya.

Menurut Syafiq A. Mughni, Muhammadiyah

telah merumuskan hubungan antara agama Islam dan negara yang dulu pernah menjadi persoalan. Muhammadiyah telah merumuskan bahwa Indonesia adalah negara perjanjian dan kesepakatan kita yang harus dibangun bersama-sama. "Jika Indonesia maju maka kehidupan beragama pun harus maju. Jika Indonesia tidak maju berarti kehidupan beragamanya masih ada persoalan-persoalan," katanya.

Syafiq menambahkan, umat beragama termasuk di kalangan umat Islam menghadapi tantangan besar, yaitu persoalan pemahaman keagamaan, memahami agama dengan baik dan benar. "Jika salah dalam pemahaman agama maka akan muncul kehidupan agama yang tidak konstruktif," sebutnya.

Persoalan lain adalah pemahaman sejarah. "Kita sering terjebak dalam situasi pemahaman sejarah yang salah. Kalau interpretasi hubungan antara agama, etnis, pada masa lalu ada ketegangan. Maka kita akan terjebak pada situasi yang sama. Karena itu perlu reinterpretasi pemahaman sejarah," ujarnya.

Soal lain adalah keadilan bagi seluruh rakyat. "Dalam membangun perdamaian maka keadilan harus menjadi fokus perjuangan," tuturnya.

Ketua Umum PGI Pdt Gomar Gultom sepakat dengan pernyataan Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia tentang beragama yang harmonis dan konstruktif. Menurut Gomar Gultom, untuk mencapai kehidupan beragama yang harmonis dan konstruktif perlu ada keseimbangan antara pendekatan tekstual dan kontekstual kitab

suci. "Kalau ada keseimbangan ini saya yakin kehidupan beragama akan harmonis dan konstruktif," ujarnya.

Dalam kaitan kehidupan beragama yang harmonis di Indonesia, Gomar Gultom menyebut tiga hal penting, yaitu: Pertama, soal kemanusiaan. Semua agama pada dasarnya memanusiaikan manusia. Kedua, adanya kesetiaan pada konsensus dasar. Konsensus dasar itu merupakan kesepakatan bersama di tengah-tengah keragaman, yaitu Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Ketiga ketertiban umum. "Pada dasarnya setiap agama menciptakan ketertiban umum," ujarnya.

Sementara itu Ketua Umum PHDI Mayjen TNI Purn Wisnu Bawa Tenaya mengungkapkan kesepakatan di antara tokoh-tokoh agama untuk menjaga kerukunan hidup beragama. Kesepakatan itu, di antaranya adalah setiap pemeluk agama memandang pemeluk agama lain sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan saudara sebangsa, setiap pemeluk agama memperlakukan agama dengan niat dan sikap baik, kasih sayang, dan sikap saling menghormati.

Kemudian, setiap pemeluk agama bersama pemeluk agama lain mengembangkan dialog dan kerjasama kemanusiaan untuk kemajuan bangsa. Setiap pemeluk agama tidak menganggap orang lain dari sudut pandangnya sendiri dan tidak mencampuri urusan internal agama lain. Setiap pemeluk agama menerima dan menghormati persamaan dan perbedaan masing-masing agama dan tidak mencampuri wilayah doktrin, akidah, keyakinan dan praktik peribadatan agama lain. □

BSC



Bambang Soesatyo
Ketua MPR RI

Menyelamatkan Manusia, Merawat Ekonomi

SEMUA daya dan upaya saat ini memang harus berfokus pada penyelamatan bagi siapa saja yang positif terinfeksi Covid-19. Namun, perekonomian tidak boleh lumpuh. Maka, sepanjang periode pandemi global Virus Corona sekarang, merawat ekonomi juga menjadi pekerjaan sangat strategis untuk memastikan kehidupan hari esok semua orang.

Untuk menyelamatkan dan menyembuhkan semua pasien Covid-19, beban pekerjaan teramat berat harus dipikul para dokter, perawat, petugas medis lainnya hingga komunitas relawan. Penghargaan setinggi-tingginya layak diberikan atas kesediaan mereka melaksanakan misi kemanusiaan itu. Apalagi, tak jarang nyawa jadi taruhannya. Sedikitnya sudah lima dokter yang meninggal dunia. Di kalangan perawat pun ada yang meninggal dunia. Ada laporan di Jakarta yang menyebutkan 50 petugas medis sudah terpapar Virus Corona.

Pada sisi lain, semua pemerintah daerah pun berjabaku mengupayakan cegah-tangkal penyebaran Virus Corona. Sayangnya, di beberapa wilayah atau kota, upaya cegah tangkal menjadi tidak mudah karena dihadapkan pada minimnya kesadaran warga setempat akan urgensi menjaga jarak dengan orang lain atau *social distancing*. Karena itu, tindakan tegas aparaturnya negara atau daerah membubarkan kumpulan orang sudah benar.

Seperti kecenderungan di dalam negeri, penyebaran Virus Corona (CoV-19) pada tingkat global pun makin membuat semua orang cemas karena jumlah yang terinfeksi terus bertambah. Hingga Sabtu (28/3) tengah malam, penyebaran CoV-19 di dalam negeri sudah mencakup 19 provinsi, dengan pasien positif terinfeksi Covid-19 berjumlah 1.155 pasien, meninggal 102 pasien dan 59 pasien sembuh.

Di belahan dunia lainnya, gambarannya terkesan lebih mencekam. Sejak pekan lalu, Amerika Serikat menjadi negara dengan jumlah pasien positif terinfeksi Covid-19 tertinggi per 28 Maret 2020, mencapai 102.396

pasien, 1.607 meninggal, dan 2.471 sembuh. Gubernur Negara Bagian New York, Andrew Cuomo, menggambarkan penyebaran wabah virus corona di wilayahnya lebih cepat dari “kereta peluru”.

Di Eropa pun demikian. Irlandia menjadi negara berikutnya yang di-lockdown. Perdana Menteri Irlandia Leo Varadkar mengumumkan lockdown mulai diberlakukan Sabtu (28/3) tengah malam waktu setempat dan berlangsung hingga 12 April 2020. Italia masih dihadapkan pada besarnya jumlah kematian pasien Covid-19. Italia mencatat rekor angka kematian akibat Covid-19 pada Jumat (27/3), ketika ada 969 orang meninggal. Dengan catatan hari itu, seluruhnya sudah 9.134 orang yang meninggal di Italia dari jumlah 86.498 kasus, dan 10.950 pasien sembuh. Di Inggris, setelah Pangeran Charles dinyatakan positif terinfeksi, menyusul kemudian Perdana Menteri Boris Johnson.

Publik sudah menyimak berita tentang progres dari upaya para ahli di sejumlah negara menemukan racikan obat atau vaksin yang diharapkan bisa efektif menyembuhkan pasien Covid-19. Namun, upaya atau hasil uji coba belum lagi menunjukkan titik terang. Ditambah lagi dengan fakta sulitnya upaya cegah tangkal penyebaran virus ini, dunia pun seperti terperangkap oleh ketidaktahuan tentang cara memerangi Virus Corona. Hampir empat bulan setelah virus ini terdeteksi di Wuhan, Tiongkok, komunitas global bahkan belum menemukan cara atau strategi yang efektif untuk menangkali penyebarluasan virus ini.

Karena itu, seluruh elemen masyarakat Indonesia, tanpa terkecuali, diharapkan peduli pada potensi ancaman akibat meluasnya wabah ini. Sudah terbukti bahwa proses penularan wabah ini begitu mudah. Karena proses penularannya yang mudah, setiap orang hanya diminta meningkatkan kehati-hatian, menjaga jarak dengan orang lain, tidak bertindak ceroboh ketika berada di ruang publik, dan berani mendatangi petugas kesehatan atau rumah sakit ketika merasakan gejala gangguan kesehatan. Tidak

kalah pentingnya adalah menaati anjuran atau saran pemerintah. Misalnya, untuk sementara ini, cukup bekerja dan belajar di rumah. Dengan cara sederhana ini, percepatan penyebaran wabah Corona bisa ditangkal.

Ketersediaan Pangan

Selain fokus pada upaya bersama menyelamatkan dan menyembuhkan pasien Covid-19, serta upaya cegah tangkal penyebaran wabah corona, ada pekerjaan lain yang juga sangat penting untuk terus dilakoni, yakni merawat perekonomian bersama. Prinsipnya, demi keselamatan semua orang, perekonomian tidak boleh lumpuh. Maka, sepanjang periode pandemi global virus corona sekarang ini, merawat ekonomi bersama juga menjadi pekerjaan sangat strategis untuk memastikan kehidupan hari esok semua orang.

Dunia sedang menghadapi potensi krisis multi dimensi. Akhir pekan lalu, Dana Moneter Internasional (IMF) mengingatkan bahwa pandemi corona telah berubah menjadi krisis ekonomi dan keuangan global. Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva mengatakan, banyak negara mendadak menghentikan kegiatan ekonomi, sehingga perekonomian dunia tahun ini akan berkontraksi. Jika terjadi krisis, negara berkembang paling merasakan dampaknya, akibat dari kombinasi krisis kesehatan, banyaknya aliran modal asing yang keluar, dan melemahnya harga komoditas.

“Kita berada dalam situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya; pandemi kesehatan global telah berubah menjadi krisis ekonomi dan keuangan.” kata Georgieva dalam keterangan resmi. Pandemi Corona mendorong banyak negara anggota IMF mengambil beragam tindakan luar biasa untuk menyelamatkan nyawa penduduknya.

AS dan Tiongkok, dua raksasa ekonomi dunia itu, pun kini sedang coba memperbaiki kerusakan. Jumat (27/3), Presiden AS Donald Trump telah menandatangani RUU Paket Stimulus untuk Pemulihan Ekonomi. Nilai paket stimulus itu mencapai Rp 32 ribu triliun, terbesar sepanjang sejarah AS. Salah satu sasaran atau target stimulus itu adalah menyediakan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar US\$ 1.200 per orang dan tambahan US\$ 500 untuk setiap anak. Hanya warga dengan pendapatan kurang dari US\$ 75.000 per tahun yang berhak menerima BLT ini. Seperti diketahui, jumlah pengangguran di AS tiba-tiba melonjak. Baru-baru ini, Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan ada 3,3 juta orang yang mengajukan tunjangan pengangguran.

Di Tiongkok, ratusan pabrik di Kota Wuhan dan beberapa kota lainnya sempat ditutup. Menurut Bloomberg, di Wuhan saja terdapat sedikitnya 515 industri, sebagian besar di sektor manufaktur. Ada 146 industri komponen otomotif, 68 perusahaan komputer, 47 industri perangkat listrik, 32 industri produk konsumen, dan 222 perusahaan dari berbagai jenis industri lain. Muncul perkiraan bahwa produktivitas sektor manufaktur Tiongkok akan turun hingga 15% pada kuartal pertama tahun ini. Untuk merespons kemungkinan itu, otoritas moneter Tiongkok pada Februari lalu mengguyur sistem keuangan negara itu dengan dana segar 1,2 triliun yuan. Dengan suntikan itu, likuiditas perbankan Tiongkok diharapkan cukup dan mampu menjaga stabilitas nilai tukar yuan. Selain itu, Tiongkok juga menyediakan dana 300 miliar yuan dengan bunga rendah untuk menopang keberlangsungan pelaku industri skala kecil dan menengah.

Itulah gambaran sekilas tentang kerusakan dan langkah-langkah stimulus yang ditempuh AS serta Tiongkok memperbaiki kerusakan di sektor ekonominya masing-masing. Tentu saja semuanya berharap langkah dua raksasa ekonomi ini bisa mereduksi krisis ekonomi yang sedang membayangi dunia saat ini. Pemerintah Indonesia pun sudah menerapkan beberapa paket kebijakan stimulus ekonomi untuk meminimalisir kerusakan.

Belum ada yang bisa memastikan kapan pandemi global virus corona akan berakhir. Satu hal yang pasti, kerusakan di sektor ekonomi begitu nyata dan terus berlangsung. Dan, IMF pun sudah menegaskan bahwa krisis ekonomi global pun tampak nyata. Di tengah proses kerusakan pada sektor ekonomi global itu maka tantangan utama bagi setiap negara, termasuk Indonesia, adalah kepastian ketersediaan bahan pangan pokok. Siapa pun tidak mengharapkan sektor tanaman pangan mengalami kerusakan seperti halnya kerusakan di sektor bisnis lainnya.

Karena itu, agar masyarakat tidak cemas dan tidak panik, negara harus mewujudkan kepastian bahwa bahan pangan pokok selalu tersedia dalam jumlah cukup. Rantai pasokannya pun harus lancar, tidak boleh bermasalah. Selain itu, aktivitas produksi bahan pangan pokok, seperti kegiatan tanam padi, sayur-sayuran hingga produktivitas nelayan, harus tetap terjaga. Sangat beralasan jika pemerintah memberi perhatian khusus pada sektor tanaman pangan. Kalau perlu, pemerintah memberi insentif pada semua sub-sektor ekonomi yang berkait langsung dengan pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok lainnya. □

Aspirasi WNI Korban Covid-19 di LN

Dapat Respon Positif dari Menlu dan Mensos

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid telah menyampaikan secara langsung aspirasi WNI di luar negeri ke Mensos dan Menlu dalam rapat kerja Virtual DPR RI dengan Mitra di Jakarta belum lama. Respons kedua kementerian positif.



WAKIL Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengapresiasi respons positif Menlu dan Mensos atas aspirasi WNI Luar Negeri korban Covid-19 yang telah ia sampaikan melalui surat resmi pada Jum'at (27/3). Selanjutnya HNW juga menindaklanjuti dengan menyampaikan secara langsung saat Rapat Kerja DPR-RI dengan Mensos dan Menlu, 7 April lalu. Ia meminta kedua Kementerian dapat berkolaborasi untuk penuhi kewajiban Negara terhadap WNI yang berada di Luar Negeri, khususnya kalangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Mahasiswa yang juga menjadi korban Covid-19 di negara-negara tempat mereka bekerja/belajar.

"Saya sudah sampaikan aspirasi mereka, baik melalui surat maupun melalui forum rapat DPR dengan Menteri, Alhamdulillah responsnya positif. Kedua Kementerian, Menteri Luar Negeri dan Menteri Sosial, menjanjikan untuk memberikan perlindungan dan bantuan yang sesuai untuk WNI di Luar Negeri," demikian disampaikan HNW di sela-sela Rapat Kerja Virtual DPR-RI dengan Mitra di Jakarta (8/4/2020).

HNW yang juga Anggota DPR-RI Dapil Jakarta II (termasuk luar negeri) menuturkan, pihaknya juga mendorong aspirasi WNI di Luar Negeri korban Covid-19 melalui Anggota DPR-RI Komisi I yang pada Selasa (7/4) melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Luar Negeri. Aspirasi tersebut diterima dengan baik oleh Menteri dan masuk dalam keputusan dan kesimpulan rapat, di antaranya adalah Pemerintah berjanji untuk mengoptimalkan komunikasi, pemantauan, pemetaan, perlindungan, dan pelayanan terhadap WNI di setiap negara terkait dengan penanganan Covid-19, baik melalui media offline maupun online.

Tidak hanya Kemenlu, HNW menuturkan perlu juga komunikasi dengan Kemensos, karena terkait dengan bantuan sosial untuk WNI di luar negeri korban Covid-19. Oleh karena itu, dia sebagai anggota Komisi VIII DPR-RI menyampaikan langsung aspirasi tersebut kepada Menteri Sosial dalam Rapat Kerja Komisi VIII dengan Menteri Sosial (Selasa, 7/4). Hasil rapat itu di antaranya adalah Menteri Sosial berkomitmen akan membangun sinergi dan sinkronisasi pro-

gram perlindungan sosial dengan Kementerian Luar Negeri.

"Saya apresiasi respons positif kedua Menteri. Tentu WNI/PMI di LN sangat berharap agar kewajiban Negara terhadap WNI di luar negeri dapat dilaksanakan dengan maksimal sebagaimana seharusnya. Dan, berikutnya tentu PMI dan anggota DPR akan kawal realisasinya, agar janji Pemerintah penuhi kewajiban untuk melindungi WNI di luar negeri yang juga terimbas Covid-19, dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya", tegasnya.

Hingga 8 April 2020, Covid-19 telah menjangkit 209 negara dengan 1.431.706 kasus (berdasarkan data Worldometers). Adapun kasus WNI di luar negeri yang positif Covid-19 sudah mencapai 286 orang, sehingga dibutuhkan keseriusan Pemerintah untuk memberikan respons yang cepat dan tepat. Pemerintah sudah membangun RS khusus untuk yang terpapar Covid-19 di Pulau Galang, menurut Presiden Jokowi, itu juga diperuntukkan bagi WNI dari Malaysia yang jumlahnya bisa mencapai 500.000 warga. □

Ahmad Basarah: Dukung Program Jaring Pengaman Sosial Presiden

Kementerian Agama, 6 April 2020, mengeluarkan Surat Edaran No. 6 Tahun 2020 yang isinya mengatur tata cara umat Islam melaksanakan ibadah Ramadan dan Idul Fitri di tengah mewabahnya virus corona.

WAKIL Ketua MPR RI, Dr. Ahmad Basarah, mendukung Surat Edaran Kementerian Agama No. 6 Tahun 2020 yang berisi panduan Ibadah Ramadan dan Perayaan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di tengah mewabahnya Covid-19. Dia secara khusus menaruh respek pada butir 11 surat edaran itu, yang menganjurkan umat Islam membayarkan zakat harta mereka sebelum puasa Ramadan agar harta itu bisa didistribusikan dengan segera kepada para mustahik.

"Ini anjuran yang tepat, karena dana zakat, infak dan sadakah itu bisa mendukung program jaring pengaman sosial yang juga dikeluarkan oleh Presiden Jokowi untuk mengantisipasi dampak sosial wabah Corona ini," tandas Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu, Selasa (7/4/2020).

Menteri Agama Fachrul Razi pada Senin (6/4/20) menandatangani Surat Edaran yang ditujukan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, Kepala Kankemenag Kab/Kota, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) seluruh Indonesia. Isinya, mengatur tata cara umat Islam melaksanakan ibadah Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, serta mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Di dalam surat edaran itu terdapat anjuran agar zakat, infak dan sadakah, yang biasanya dibayarkan di akhir Ramadan, kini dibayarkan sebelum Ramadan agar harta milik Allah itu bisa disebar ke sebanyak mungkin kaum fakir miskin.

Menurut Basarah, anjuran yang tertuang dalam Surat Edaran Menag itu sejalan dengan kebijakan Presiden Jokowi yang menambah alokasi belanja dan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp 405,1 triliun untuk menangani wabah virus Corona (Covid-19). Sebelumnya, alokasi belanja APBN 2020 ditetapkan sebesar Rp 2.540,4 triliun. Alokasi dana itu diterbitkan dalam



Perppu Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Dari jumlah tersebut, Rp 110 triliun di antaranya diperuntukkan jaring pengaman sosial yang dibagi dalam lima kelompok. *Pertama*, jumlah keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) ditingkatkan dari 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat dengan besaran dinaikkan 25%. *Kedua*, jumlah penerima kartu sembako dinaikkan dari 15,2 juta menjadi 20 juta penerima. *Ketiga*, anggaran kartu pra-kerja dinaikkan dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun. *Keempat*, pelanggan listrik 450 VA digratiskan selama tiga bulan ke depan, pelanggan 900 VA mendapat diskon 50%; *Kelima*, untuk mengantisipasi kebutuhan pokok.

"Surat Edaran semacam ini menurut saya bukan hanya bisa menenangkan masyarakat di tengah Pandemi Covid-19, tapi juga bersifat realistis dan aplikatif," tandas Ketua DPP PDI Perjuangan ini.

Basarah juga mendukung setiap butir yang terdapat dalam Surat Edaran itu yang

intinya mengatur tata cara umat Islam menjalankan ibadah Ramadan selama wabah Covid-19 menyebar. Surat edaran itu, antara lain menyarankan umat Islam agar sahur dan buka puasa dilakukan oleh individu atau keluarga inti dengan menghindari membuat atau menghadiri acara buka puasa bersama. Salat Tarawih dilakukan secara individual atau berjamaah bersama keluarga inti di rumah. Buka puasa bersama baik oleh lembaga pemerintahan, lembaga swasta, masjid maupun musala ditiadakan. Peringatan Nuzulul Qur'an dalam bentuk tablig dengan menghadirkan penceramah dan massa dalam jumlah besar ditiadakan. Bahkan umat Islam dianjurkan untuk tidak melakukan iktikaf di 10 (sepuluh) malam terakhir Ramadan di masjid/musala.

"Masyarakat terus bertanya-tanya bagaimana sebaiknya mereka tarawih, berlebaran, membayar zakat, dan seterusnya. Dengan adanya surat edaran seperti ini kan semua jadi jelas," jelas Basarah. □

Diskusi Empat Pilar MPR

MPR Serap Aspirasi ke Berbagai Elemen Masyarakat

Serap aspirasi kepada segenap elemen masyarakat Indonesia sehubungan dengan wacana amandemen terbatas UUD terkait dengan Pokok-Pokok Haluan Negara akan terus digencarkan oleh MPR.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR Syarifuddin Hasan mengungkapkan bahwa salah satu tugas yang merupakan pekerjaan besar dan utama MPR periode 2019-2024, saat ini dan ke depan, adalah tetap melakukan silaturahmi ke berbagai elemen masyarakat. Tujuannya menyerap aspirasi tentang hal yang sangat penting seputar kebangsaan.

Salah satu hal penting tersebut, kini sedang menjadi agenda pembahasan dan menjadi fokus MPR ke depan, yakni soal amandemen terbatas UUD NRI Tahun 1945 terkait Pokok-Pokok Haluan Negara. Wacana tersebut merupakan bentuk aspirasi rakyat yang kemudian ditangkap MPR periode 2014-2019, lalu dikaji dan akhirnya menjadi bahan rekomendasi, yang selanjutnya diserahkan kepada MPR periode sekarang.

“Untuk melakukan kajian, apalagi memutuskan hasil akhirnya apakah diperlukan amandemen atau tidak, tentu membutuhkan waktu dan pembahasan yang sangat detail dan serius,” ungkap Syarif Hasan. Untuk melakukan itu, lanjut Syarif Hasan, MPR tidak ingin melakukan sendirian, tapi MPR

butuh masukan dari berbagai elemen masyarakat Indonesia.

“MPR ingin agar keputusan nanti berdampak baik buat seluruh rakyat Indonesia,” kata Syarif Hasan dalam Diskusi Empat Pilar MPR yang diselenggarakan Biro Humas MPR bekerjasama dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen, Senin (2/3/2020), di Media

Center, Gedung Nusantara III, Kompleks MPR/ DPR/DPD Senayan, Jakarta.

Dalam diskusi bertema: ‘Fokus MPR Lima Tahun Kedepan’ itu, selain Syarif Hasan juga tampil sebagai narasumber adalah: Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR Ahmad Riza Patria, dan Pengamat Politik Voxvol Center Pangi Syarwi Chaniago.





Lebih lanjut, Syarief Hasan menyatakan, yang melandasi gencarnya Pimpinan MPR melakukan serap aspirasi ke berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh-tokoh bangsa, pimpinan partai politik, pimpinan ormas dan ormas keagamaan, pimpinan media massa nasional, adalah dalam rangka bermusyawarah, berdiskusi, dan meminta masukan terkait wacana amandemen tersebut.

Kegiatan serap aspirasi masyarakat, menurut Syarief Hasan, masih akan terus digencarkan lagi oleh Pimpinan MPR ke depannya, agar bahan kajian tentang amandemen lengkap sehingga keputusan yang diambil akan tepat. “Saya sendiri bersama pimpinan MPR lainnya aktif menyambangi masyarakat di daerah-daerah, baik provinsi, kabupaten kota, melakukan dialog dengan rakyat dan para kepala daerah, serta para akademisi di berbagai perguruan tinggi. “Saya melihat masyarakat

sangat antusias,” tambahnya.

Syarief Hasan menyatakan, banyak pendapat, gagasan, dan masukan yang berkembang selama melakukan serap aspirasi. Ragam pendapat itu, antara lain ada yang menginginkan untuk dilakukan perubahan terbatas UUD hanya terkait Pokok-Pokok Haluan Negara. Lalu, ada pula yang menginginkan agar amandemen UUD dilakukan sekaligus perubahan ke hal-hal lainnya, seperti melakukan perubahan masa jabatan Presiden. Juga ada yang menginginkan agar UUD dikembalikan seperti dulu, di mana MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan Presiden mandataris MPR. Pandangan lainnya menyatakan bahwa UUD yang sekarang ada sudah baik.

Jadi, “Sangat beragam aspirasinya, tapi itulah demokrasi. Itulah pendapat rakyat, harus dihargai semua, sebab rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi,” ucapnya.

Bagi Syarief Hasan, wacana untuk

mengubah konstitusi memang secara eksplisit ada di dalam UUD, yang menyatakan bahwa MPR dapat melakukan perubahan dan menetapkan UUD. Mekanismenya adalah, cukup sepertiga anggota MPR mengajukan usulan perubahan plus menyebutkan poin-poin mana saja yang perlu diubah dengan memberikan juga alasan-alasan yang substansi sehingga perlu dilakukan perubahan.

“Bagi MPR yang memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan UUD, mengubah UUD tentu saja memiliki implikasi yang sangat luas. Inilah poin utama tugas MPR untuk menjaga sistem ketatanegaraan kita agar tetap baik. Dalam arti, apapun keputusannya nanti, apakah dilakukan amandemen atau tidak, semua harus bermuara pada demi kebaikan bangsa, negara, dan seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.

Sependapat dengan Syarief Hasan, Ahmad Riza Patria juga menyebutkan bahwa wacana amandemen terbatas UUD NRI Tahun 1945 dan menghidupkan kembali GBHN adalah hal yang masih menarik untuk difokuskan MPR lima tahun ke depan. “Kami sendiri, waktu itu berpendapat bahwa GBHN itu perlu, agar jangan sampai arah pembangunan bangsa ini hanya bergantung kepada pemerintah atau Presidennya. GBHN diperlukan agar arah pembangunan menjadi jelas,” katanya.

Sebab, lanjut Riza, arah pembangunan itulah yang membangun bangsa. Dan, di dalam bangsa Indonesia sendiri ada banyak sekali komponen yang beragam dan seluruh rakyat yang berdaulat. Wujud dari seluruh rakyat yang berdaulat adalah MPR. Jadi, segala ide, program gagasan, termasuk arah pembangunan bangsa itu melalui MPR sebagai wujud kedaulatan rakyat.

“Yang perlu dipahami, tentu saja GBHN tidak mengatur program-program yang dilakukan pemerintah secara teknis. GBHN memuat hal-hal yang paling mendasar terkait ideologi, arah pembangunan bangsa, menekankan pentingnya karakter dan akhlak yang mulia. Nah, pemerintah tinggal mengimplementasikannya dalam bentuk program-program. Jadi, GBHN itu kompleks, komprehensif, holistik, menyeluruh tapi substansi. Tidak menyangkut hal-hal yang teknis,” terangnya. □

DER



Kuliah Umum Universitas Muhammadiyah

Generasi Milenial Perlu Tingkatkan Kemampuan Berbahasa Arab

Generasi milenial bisa meningkatkan potensi dan mengasah kemampuan bahasa Arab melalui internet atau media sosial.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

BAHASA Arab merupakan bahasa keempat terbesar di dunia yang digunakan kalangan milenial pengguna internet. Karena itu, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengharapkan, generasi milenial, khususnya mahasiswa Fakultas Agama Islam, perlu meningkatkan kemampuan berbahasa Arab. Dengan pemahaman bahasa Arab yang baik maka pemahaman beragama menjadi meningkat dan komprehensif.

“Pemahaman agama Islam terkait dengan pemahaman alqur’an yang komprehensif. Pemahaman alqur’an yang komprehensif tergantung juga dengan pemahaman bahasa Arab yang komprehensif,” kata Hidayat ketika menyampaikan Kuliah Umum dengan tema: “Urgensi Pengembangan Bahasa Arab Terhadap Komprehensifitas Pemahaman Agama pada Generasi Milenial” di Aula Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ciputat Tangerang Selatan, Selasa (3/3/2020). Kuliah umum ini diikuti ratusan mahasiswa Fakultas Agama

Islam UMJ.

Hidayat memaparkan, pemahaman agama sering dihubungkan dengan radikalisme, terorisme, liberalisme. “Karena itu generasi milenial perlu meningkatkan kualitas pemahaman bahasa Arab sehingga tidak

terjebak pada pemahaman beragama yang tidak komprehensif,” ujarnya.

“Radikalisme bisa terjadi ketika pemahaman bahasa Arab tidak membawa pada pemahaman yang utuh terhadap teks-teks agama. Jadi diambil sepotong-sepotong.



Memahami agama dengan cara yang tidak komprehensif menghadirkan masalah-masalah,” sambungnya.

Hidayat menjelaskan, generasi milenial adalah generasi yang hadir di abad 21. Merujuk pada PBB dan UNESCO, generasi milenial adalah mereka yang lahir antara 1981 sampai tahun 2000. Ada juga definisi lain, generasi milenial adalah mereka yang berusia antara 14 tahun hingga 39 tahun. “Generasi ini merupakan mayoritas penduduk dunia, termasuk mayoritas di Indonesia dan negara-negara Arab,” jelasnya.

Mengacu pada pengguna internet, lanjut Hidayat, bahasa Arab merupakan bahasa keempat terbesar di dunia yang digunakan kalangan milenial pengguna internet. Urutan pengguna bahasa terbesar di internet adalah bahasa Inggris, kemudian bahasa Cina, lalu ketiga bahasa Spanyol, dan keempat bahasa Arab. Bahasa Indonesia menduduki urutan keenam terbesar digunakan pengguna internet.

“Melalui jaringan internet banyak dibuka kajian-kajian bahasa Arab. Generasi milenial bisa meningkatkan potensi dan mengasah kemampuan bahasa Arab melalui internet

atau media sosial. Atau menggunakan sarana yang disenangi kalangan milenial, seperti facebook, whatsapp, twitter, dan lainnya,” tutur Hidayat.

Selain itu, menurut Hidayat, penggunaan bahasa Arab juga sangat menguntungkan secara ekonomi. Pengguna bahasa Arab di dunia sekitar 2,5 miliar. “Banyak sekali keuntungan secara ekonomi bila bisa berbahasa Arab. Secara ekonomi, Timur Tengah merupakan pasar yang besar. Mereka lebih suka dengan orang yang bisa berbahasa Arab,” ujarnya. □

BSC

Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid

Hasil Survei, Publik Merespons Positif MPR

Secara faktual kebersamaan kekuatan-kekuatan politik di MPR memberikan efek positif.

SURVEI lembaga Indo Barometer menempatkan lembaga negara Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam urutan keenam lembaga yang mendapat kepercayaan publik. Posisi itu berada di atas dua lembaga negara lainnya, yaitu DPR dan DPD. Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan, survei Indo Barometer menunjukkan kepercayaan publik terhadap MPR RI cukup besar. Kepercayaan publik yang meningkat pada kepemimpinan MPR Periode 2019 - 2024 ini memperlihatkan masyarakat merespons positif MPR.

“Alhamdulillah kita bersyukur atas survei itu. Dan, memang MPR periode ini sangat berbeda dengan MPR sebelumnya. MPR periode ini (2019 - 2024) semua kekuatan parpol di parlemen masuk dalam kepemimpinan MPR. Artinya, musyawarah mufakat dan kebersamaan itu direspons positif oleh publik,” kata Jazilul Fawaid usai membuka Sosialisasi Empat Pilar MPR melalui pagelaran seni budaya di Desa Gringgingsari, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Rabu malam (11/3/2020).

Pada 23 Februari lalu, lembaga survei Indo Barometer merilis hasil survei nasional yang dilakukan pada 9 - 15 Januari 2020. Dari hasil survei Indo Barometer itu kepuasan atau kepercayaan publik terhadap MPR meningkat



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

ke urutan 6 dengan 72,8%. Angka ini lebih besar dibanding lembaga legislatif lainnya, seperti DPR RI yang memperoleh kepercayaan publik sebesar 44,8% dan DPD RI yang mendapat 54,3%. Dalam survei Indo Barometer itu, TNI berada di urutan pertama sebagai lembaga yang mendapat kepercayaan publik terbesar.

Kepercayaan publik terhadap MPR itu menunjukkan adanya peningkatan. Sebelumnya, survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia pada 2018 menunjukkan kepercayaan publik terhadap MPR RI sebesar

70,09%, kepercayaan publik terhadap DPR sebesar 65%, dan terhadap DPD RI sebesar 68,7%. Dibandingkan tahun 2018, kepercayaan publik terhadap MPR RI tahun ini malah meningkat di saat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif lainnya justru menurun.

Menurut Jazilul, survei Indo Barometer itu memotret kondisi faktual terhadap lembaga MPR RI. Secara faktual kebersamaan kekuatan-kekuatan politik di MPR memberikan efek positif. Seperti diketahui, kekuatan politik di parlemen (terdiri dari sembilan partai politik

dan satu kelompok DPD) terwakili dalam Pimpinan MPR yang jumlahnya 10 orang. Pemilihan Pimpinan dan Ketua MPR pada Oktober 2019 lalu juga berlangsung secara musyawarah mufakat (tanpa voting). “Jadi hasil survei Indo Barometer itu membuat kita yakin bahwa secara faktual kebersamaan dan musyawarah mufakat di MPR memberikan efek yang sangat positif,” ujar politisi

PKB ini.

Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari, kembali memaparkan hasil survei itu dalam Diskusi Empat Pilar MPR di Media Center Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (11/3/2020). Selain soal kepercayaan publik terhadap MPR, juga dipaparkan soal Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) atau se-

karang menjadi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Hasil survei Indo Barometer itu menunjukkan, 55,1% masyarakat menyatakan Indonesia memerlukan haluan negara untuk pembangunan. Sedangkan 9,8% menyatakan tidak perlu haluan negara. □

BSC

Diskusi Empat Pilar MPR

Kekerasan Pada Anak Sudah Lampu Merah

Kepedulian pada kekerasan anak masih kurang, karena mungkin menganggap sebagai hal yang biasa. Padahal kekerasan pada anak ibarat api dalam sekam.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KEKERASAN terhadap anak menunjukkan tren yang terus meningkat, baik secara kuantitas maupun kualitas. Untuk mengurangi kekerasan pada anak dibutuhkan peran semua pihak, bukan hanya orangtua tetapi juga sekolah dan masyarakat, serta pemerintah, terutama lingkungan terdekat anak.

“Ini (kekerasan pada anak) sudah lampu merah bagi bangsa ini. Kita tidak boleh saling menyalahkan. Kita semua, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, harus bergandengan tangan dan bersatu padu untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap anak secara bersama-sama,” kata Yandri Susanto, anggota MPR dari Fraksi PAN, dalam Diskusi Empat Pilar MPR di Media Center MPR/DPR, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan,

Jakarta, Jumat (13/3/2020).

Diskusi bertema: “Marak Kekerasan pada Anak, Ancaman Bagi Generasi Penerus Bangsa?” diselenggarakan oleh Biro Humas MPR RI bekerjasama dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen ini menghadirkan narasumber anggota Fraksi Partai Golkar MPR Dyah Roro Esti dan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto.

Selanjutnya, Yandri melihat belum ada keseriusan secara maksimal dari berbagai pihak untuk mengatasi kekerasan pada anak. “Kepedulian masih kurang karena mungkin menganggap kekerasan pada anak sebagai hal yang biasa. Padahal kekerasan pada anak ibarat api dalam sekam. Sangat mengerikan,” ungkap Yandri. Kalau tidak diatasi bagaimana nasib bangsa ini? “Bagaimana nasib bangsa ini jika generasi sekarang

sudah banyak yang menjadi korban narkoba, kekerasan seksual, menjadi pekerja seks, dan sebagainya,” papar Ketua Komisi VIII DPR ini.

Yandri memberi contoh, anggaran KPAI dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terbilang masih kurang. “Karena itu masalah kekerasan pada anak bukan salah pemerintah, bukan salah DPR. Sebagai Ketua Komisi VIII, saya berjanji berapapun anggaran yang diperlukan kitaenuhi asal sesuai dengan tujuan. Komitmen DPR tidak perlu diragukan dari sisi regulasi dan anggaran,” tegasnya.

Jika anggaran terbatas, Yandri mengusulkan untuk melibatkan pihak swasta atau dunia usaha dalam program mengurangi kekerasan pada anak. Dana CSR dari dunia usaha yang cukup besar bisa digunakan untuk program anak. “Anak adalah masa depan bangsa. Saya berharap pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan kita semua bergandengan tangan dan saling bahu-membahu untuk mengatasi kekerasan pada anak secara bersama-sama.” harap Yandri.

Narasumber lain, anggota MPR dari Fraksi Partai Golkar, Dyah Roro Esti mengungkapkan, 50% anak di dunia yang berusia 2 – 12 tahun atau sekitar 1 miliar anak mengalami kekerasan fisik secara seksual maupun emosional. Untuk Indonesia, UNICEF pada tahun 2015 menyatakan, anak pada usia 13 – 15 melaporkan pernah diserang secara fisik, 26% pernah mendapatkan hukuman



fisik dari orangtua, dan 50% mengaku di-bully di sekolah. “Lingkungan di rumah, di sekolah, dan pergaulan bisa memacu adanya kekerasan pada anak,” katanya.

Dyah Roro Esti juga sepakat dengan Yandri bahwa dibutuhkan peran semua pihak, bukan hanya orangtua, tetapi juga sekolah dan masyarakat, serta pemerintah

untuk mengatasi kekerasan pada anak, terutama lingkungan terdekat anak. “Untuk mencegah atau mengurangi kekerasan pada anak bisa dilakukan melalui *good parenting*, menciptakan lingkungan yang ramah di sekolah-sekolah, dan social media. Aktivitas media sosial anak perlu dimonitor dan diawasi apakah media sosial digunakan anak

untuk hal-hal yang positif,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua KPAI Susanto memaparkan data KPAI bahwa pada 2019 terdapat 4.369 kasus. Kasus ini variatif, yaitu anak berhadapan dengan hukum misalnya anak sebagai pelaku, saksi, dan korban; kasus rebutan pengasuhan anak; kasus pornografi dan cyber crime. “Trennya sejak KPAI berdiri pada 2004 sampai sekarang atau sekitar 16 tahun, anak berhadapan dengan hukum, paling tinggi kasusnya seperti pelaku bully, asusila, pencurian maupun yang lain,” ungkapnya.

Susanto berharap, upaya proteksi dan penanganan terhadap kasus serta rehabilitasi harus semakin masif dikembangkan di daerah-daerah. “Era otonomi daerah penting dikembangkan desa ramah anak, kelurahan ramah anak. Desa dan kelurahan ini menjadi ujung tombak mewujudkan Indonesia yang ramah anak,” ujarnya. □

BSC

100 Tokoh Inspirasi Jawa Tengah

Ma'ruf Cahyono Termasuk Pejabat Pemikir

Ma'ruf Cahyono tidak hanya sebagai “pejabat pemikir” tapi juga pemimpin yang inspiratif dan kolaboratif mengabdikan untuk negeri. Bekerja penuh dedikasi tanpa kenal lelah.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

SEKRETARIS Jenderal MPR Dr. H. Ma'ruf Cahyono, SH., MH., masuk dalam daftar 100 Tokoh Inspirasi Jawa Tengah. Beberapa tokoh lainnya yang masuk dalam daftar, mulai dari Presiden Joko Widodo,

beberapa orang menteri asal Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, para tokoh pengusaha asal Jawa Tengah seperti Michael Bambang Hartono, ulama seperti KH Mustofa Bisri atau Gus Mus,

seniman seperti dalang Manteb Sudarsono, para bupati/walikota, dan lain-lain. Para tokoh itu masuk dalam buku “100 Tokoh Inspirasi Jawa Tengah” yang diluncurkan pada Ahad (1/3/2020) di Hotel Semesta, Semarang.

Dalam pengantar buku setebal 494 halaman ini, Bambang Sadono menulis, buku “100 Tokoh Inspirasi Jawa Tengah” ini berusaha menggali sisi-sisi keuletan dan kegigihan perjuangan para tokoh. Selain berprestasi mereka juga mempunyai karakter yang layak diteladani.

“Kami membutuhkan teladan atau contoh. Persoalannya siapa yang harus menjadi contoh, dan siapakah yang sadar untuk memberikan contoh. Kita memang punya tokoh hebat seperti Bung Karno, Bung Hatta dan Pak Harto. Bukan hanya mereka punya karakter di atas rata-rata, melainkan lingkungan juga menggembelng mereka untuk menjadi orang hebat.”



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Selain menjadi salah satu motivasi, penerbitan buku ini juga diharapkan bisa menjadi alternatif untuk memberikan semangat. “Ada pengalaman yang bisa ditiru, ada kiat menyalasi hidup dan merintis karir dari para tokoh-tokoh tersebut yang bisa diteladani,” tulisnya.

Dalam buku ini secara khusus Bambang Sadono menulis tentang profil Sesjen MPR Ma’ruf Cahyono. Bambang menyebut, Ma’ruf Cahyono sebagai “pejabat pemikir”. “Ma’ruf dikenal sebagai pejabat pemikir karena sebelum menjadi Sekretaris Jenderal, dia pernah menjadi Kepala Biro Humas dan lama menjabat sebagai Kepala Pusat Pengkajian MPR,” tulis Bambang Sadono.

Ma’ruf Cahyono, tulis Bambang, dianugerahi tanda kehormatan Satyalancana Wira Karya oleh Presiden pada 2017 karena telah banyak memberikan kontribusi untuk mendukung kinerja MPR. Salah satunya, gagasan pembentukan Lembaga Pengkajian MPR sebagai laboratorium konstitusi yang bertugas memberikan pertimbangan terkait pengkajian sistem ketatanegaraan. Ma’ruf juga aktif mendorong penataan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Selama menjadi Sekretaris Jenderal MPR, Ma’ruf Cahyono telah menorehkan prestasi dan menaikkan nilai Reformasi Birokrasi Setjen MPR. Ini dapat dilihat dari apresiasi dan penghargaan yang diterima Sekretariat Jenderal MPR. Pada September 2019, Sekretariat Jenderal MPR meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan selama lima tahun berturut-turut (2014 – 2018) tanpa jeda. Pada saat yang sama, Setjen MPR juga mendapat BMN Award, yaitu penghargaan dalam

pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

Pada Februari 2020, Sekretariat Jenderal MPR mendapat apresiasi dari BPKP karena telah mencapai maturitas level 3 dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Maturitas yang dimaksud adalah tanggung jawab instansi terkait dalam pelaksanaan menjalankan SPIP secara efektif dan berkualitas.

Ma’ruf Cahyono juga menjadi salah satu figur dari 73 tokoh berprestasi yang diberikan Obsession Media Group (2018). Lalu pada tahun 2019, Obsession Media Group menganugerahkan The Best Bureaucrat Awards.

Semua ini menunjukkan Ma’ruf Cahyono tidak hanya sebagai “pejabat pemikir” tapi juga pemimpin yang inspiratif dan kolaboratif mengabdikan untuk negeri. Ma’ruf Cahyono bekerja penuh dedikasi tanpa kenal lelah. Senang dalam bekerja, dia menyebutnya bekerja adalah sebagai ibadah, Ma’ruf

Cahyono tak kenal waktu bahkan bekerja hingga larut malam. Di mana pun ditugaskan dan ditempatkan, Ma’ruf Cahyono selalu ingin mendorong perubahan.

Ma’ruf Cahyono dalam peluncuran buku itu menyatakan, buku yang diluncurkan Bambang Sadono ini menjadi inspirasi bagi siapapun. “Buku ini memiliki nilai strategis dalam rangka mengawal nilai-nilai Pancasila serta merawat ke-Indonesiaan kita. Ini menjadi penyemangat untuk membangun persatuan,” ujarnya.

“Dari 100 Tokoh Inspirasi Jawa Tengah ini kita bisa melihat testimoni sukses dari masing-masing tokoh yang memiliki prinsip hidup. Juga memiliki hubungan sangat kuat dengan nilai-nilai ideologi Pancasila, karena tokoh adalah *leader* yang memiliki prinsip-prinsip kepemimpinan, sesuai makna yang terkandung dalam Empat Pilar MPR,” imbuhnya. □

BSC



Menggali Nilai-Nilai **Luhur** Sunan Gunung Jati

BERTEMPAT di Pendopo Kesultanan Kasepuhan Cirebon, Kota Cirebon, Jawa Barat, Februari 2020, Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR menggelar acara *Bicara Buku Bersama Wakil Rakyat*. Hadir dalam acara itu, Sultan Sepuh XIV Pangeran Raja Adipati Arif Natadiningrat; Kabiro Humas Setjen MPR Siti Fauziah; Prof. Dr. H. Dadan Wildan, M.Hum; Ketua Badan Pengelola Kasultanan Kasepuhan Ratu Alexandra, yang juga adik Sultan Sepuh XIV; serta budayawan Cirebon Raden Opan Sapari.

Dalam acara bertema *Menggali Nilai-Nilai Luhur di Masa Kesultanan Cirebon Sebagai Pondasi Jati Diri Bangsa* itu, dibedah buku karya Dadan Wildan yang berjudul *Sunan Gunung Jati: Petuah,*

Sultan Sepuh XIV dalam kesempatan itu mengucapkan terima kasih kepada Setjen MPR yang mengadakan acara ini di tengah maraknya deklarasi kerajaan-kerajaan baru, seperti Sunda Empire serta Keraton Agung Sejagat. “Betapa pentingnya kita memahami sejarah serta nilai-nilai luhur bangsa,” tuturnya.

Sunan Gunung Jati, buku terbitan *Salima Network* yang dibedah dalam acara itu, menurut Dadan Wildan bisa tersusun setelah melakukan riset budaya Kacirebonan selama 5 tahun. Dalam buku yang merupakan disertasinya itu terungkap bahwa nilai-nilai luhur yang diteladani dan diwariskan oleh Sunan Gunung Jati. Menurut Dadan, Sunan Gunung Jati banyak menancapkan tonggak politik



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Pengaruh, dan Jejak-Jejak Sang Wali di Tanah Jawa. Acara yang diselenggarakan oleh MPR bekerjasama dengan Kasepuhan Cirebon itu mendapat tanggapan positif dari masyarakat di Kota Empal Gentong tersebut. Puluhan guru dan ratusan siswa dari SMK Informatika Al-Irsyad Al-Islamiyah, SMK Al-Istiqomah, SMK Presiden, SMK Taman Karya Madya, MAN 1, MGMP Guru Sejarah, serta Komunitas Literasi, mahasiswa IAIN Syekh Nurjati, dan juga abdi dalem kasepuhan berduyun-duyun mendatangi acara itu.

Kepala Biro Humas MPR, Siti Fauziah, dalam sambutannya mengatakan, kegiatan itu bertujuan selain untuk menampung aspirasi masyarakat juga untuk menambah referensi literature, terutama karya tulis dan karya ilmiah dengan beragam tema, seperti politik, hukum, dan ketatanegaraan. “Melalui kegiatan ini diharapkan akan memperkaya koleksi dan referensi literatur yang berguna bagi masyarakat, terutama untuk anggota MPR dan pegawai Setjen MPR,” ujar Siti Fauziah.

Terkait buku yang dibedah, perempuan asal Bandung, Jawa Barat, ini menuturkan, banyak nilai luhur yang diwariskan Sunan Gunung Jati kepada bangsa ini. “Kita sebagai penerus bangsa harus melestarikan nilai-nilai luhur itu,” tegasnya.

dalam menjalankan pemerintahan dengan tetap memberikan keteladanan dari sisi religius. Dari sinilah, kata Dadan, Sunan Gunung Jati dipersonifikasi sebagai sosok pemimpin agama dan politik. “Dalam menjalankan pemerintahan, Sunan Gunung Jati berpegang pada tiga faktor utama, yaitu: pembangunan kehidupan religius, pembangunan ekonomi, dan pembangunan stabilitas politik, baik di Cirebon maupun di luar wilayah Cirebon,” ungkapnya. Dari sinilah tercipta kesejahteraan buat masyarakat Cirebon dan sekitarnya.

Tak hanya itu, buku berukuran 14x21 cm setebal 296 + xxii ini dikupas pula keulungan Sunan Gunung Jati saat menunaikan tugas sebagai Pemimpin Kasultanan Cirebon. Dari situ diketahui bahwa Sunan Gunung Jati adalah seorang diplomat ulung. “Jika terjadi perselisihan diselesaikan dengan cara komunikasi melalui agama, seni, dan budaya”, papar Dadan.

Sebelum acara berakhir, Siti Fauziah menyerahkan plakat kepada Sultan Sepuh XIV sebagai tanda bahwa Setjen MPR telah melakukan kerjasama dengan Kasepuhan Cirebon dalam melakukan Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. □

AWG

Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad

Kunker dan Sosialisasi Empat Pilar di Gorontalo

DALAM rangka menunaikan tugasnya sebagai Pimpinan MPR, Fadel Muhammad melakukan kunjungan kerja (kunker) sekaligus Sosialisasi Empat Pilar MPR di berbagai wilayah di Provinsi Gorontalo pada 28 dan 29 Februari 2020.

Di hari pertama, Jumat (28/2/2020), Fadel mengawali kunkernya di Gorontalo dengan melakukan pertemuan silaturahmi dengan masyarakat Kota Gorontalo. Pertemuan berlangsung usai salat Jumat di Masjid Agung Baiturahim Kota Gorontalo. Ratusan warga masyarakat Kota Gorontalo hadir dalam pertemuan tersebut.

Dalam pertemuan itu, Fadel Muhammad menyampaikan beberapa hal yang sedang

Dari pertemuan dengan berbagai elemen masyarakat tersebut, jelas Fadel, ternyata banyak sekali aspirasi dan pendapat yang berbeda satu sama lain. Ada yang menginginkan kembali kepada UUD yang asli. Ada lagi yang berpendapat, UUD yang sekarang sudah baik. “Walaupun berbeda-beda, namun tujuannya tetap sama, yakni demi kesejahteraan bersama. Inilah keindahan dari karakter bangsa kita, bermusyawarah mencari yang terbaik untuk kepentingan bersama,” tambahnya.

Amandemen terbatas terkait pokok-pokok haluan negara, menurut mantan Gubernur Gorontalo ini, juga diharapkan menjawab berbagai permasalahan bangsa, terutama

Kapolda yang baru, Fadel juga membahas seputar narkoba dan perlindungan kepada generasi muda.

Fadel menyatakan mendukung penuh semangat dan upaya yang akan dilakukan Kapolda Gorontalo yang baru, Brigjen. Pol. Adnas, untuk memberantas narkoba di wilayah Gorontalo, serta melindungi generasi muda dari bahaya besar narkoba. “Dukungan ini saya nyatakan dengan tulus dan saya siap membantu jika dibutuhkan, demi anak-anak muda kita jauh dari jangkauan narkoba yang merusak,” tandasnya.

Mengingat bahaya narkoba, apalagi korbanannya anak muda yang merupakan generasi penerus kepemimpinan bangsa, sangat



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

dikerjakan MPR RI saat ini, terutama tentang wacana amandemen UUD NRI Tahun 1945 terkait Pokok-Pokok Haluan Negara. “Informasi ini perlu disampaikan kepada rakyat, karena kebijakan yang akan diambil nanti (terkait amandemen dan haluan negara), sudah pasti akan berdampak pada rakyat secara keseluruhan,” katanya.

Lebih lanjut Fadel menjelaskan, pasca MPR periode 2019-2024 menerima rekomendasi dari MPR periode sebelumnya tentang amandemen terbatas, Pimpinan MPR bergerak cepat, melakukan kajian dan menyambangi langsung berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh bangsa, pimpinan parpol, pimpinan ormas, pimpinan organisasi keagamaan dan lainnya, untuk meminta pendapat, masukan, serta gagasan.

masalah perekonomian. Sistem perencanaan pembangunan nasional yang terarah, konsisten, dan berkesinambungan, akan membuat pembangunan nasional menjadi fokus.

“Saya berharap masyarakat mendukung apa yang sedang dikerjakan MPR, serta mendukung semua tugas-tugas dan kewenangannya. Intinya, kita berupaya demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” tandasnya.

Pertemuan dengan Kapolda Gorontalo

Usai bertemu masyarakat Kota Gorontalo, selanjutnya Fadel melakukan pertemuan dengan Brigjen Pol. Adnas, sebagai Kapolda Gorontalo yang baru. Selain mengucapkan selamat bertugas di Gorontalo, kepada

mengkhawatirkan sekali. “Bahaya narkoba ini sangat membuat saya takut. Bangsa ini bisa kehilangan satu generasi akibat narkoba. Tak bisa dibayangkan jika aparat penegak hukum tidak keras menghadapi bahaya narkoba. Kerusakan generasi muda kita akan sangat parah,” tegasnya.

Oleh karena itu, banyak kalangan menaruh harapan kepada Kapolda baru ini untuk kinerja kepolisian daerah Gorontalo agar lebih baik lagi. “Saya sebagai putera daerah, pernah menjabat Gubernur dua periode, dan sebagai Pimpinan MPR mewakili rakyat Gorontalo berharap agar Kapolda baru ini bisa membawa provinsi ini ke depan lebih baik,” harap Fadel Muhammad. Apalagi, dia mendengar bahwa semangat Kapolda Gorontalo untuk membersihkan Tanah

Serambi Madinah dari narkoba dalam masa kepemimpinannya. “Untuk menuntaskan hal berat tersebut, saya rasa, Polda Gorontalo sudah layak naik tingkat dari tipe B menjadi tipe A. Sebab, fasilitas tipe A akan banyak menunjang kualitas kinerja yang memang sangat berat,” ujarnya.

Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Adnas, dalam kesempatan yang sama, sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas dukungan dari seorang tokoh nasional, pemimpin lembaga negara MPR RI, Fadel Muhammad, kepada Polda Gorontalo. “Beliau sudah sangat saya kenal sejak 20 tahun lalu, hingga saat ini karakternya tidak berubah, tetap seorang yang santun, sholeh, dan sangat peduli dengan Gorontalo. Dukungan beliau adalah motivasi kuat buat kami bekerja untuk Gorontalo serta buat bangsa dan negara,” katanya.

Sosialisasi Empat Pilar di Hulonthalangi

Setelah bertemu Kapolda Gorontalo, Fadel Muhammad selanjut menuju Kecamatan Hulonthalangi. Di hadapan ratusan warga masyarakat, yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat biasa, Fadel menjelaskan pentingnya ideologi bangsa Indonesia, Pancasila. “Tanpa Pancasila sangat sulit mempertahankan eksistensi negara Indonesia,” ujar Fadel dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR itu.

Lebih lanjut Fadel menyatakan, Pancasila sebagai ideologi yang mampu menyatukan Indonesia. “Keagaman yang ada di Indonesia menjadi faktor yang membuat Indonesia butuh Pancasila dan tidak bisa lepas darinya,” paparnya.



Berikutnya Fadel menjelaskan tentang UUD NRI Tahun 1945, salah satu pilar dari Empat Pilar MPR. Dia menegaskan, UUD atau konstitusi sangat penting, karena negara Indonesia dibangun dan berjalan baik karena ada UUD yang mengaturnya. Konstitusi juga menjadi pegangan bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. “Rakyat Indonesia bisa berbuat apa saja di negara ini, tapi mesti berdasarkan konstitusi, tidak sembarang berbuat. Hal itulah yang menjaga negara Indonesia tetap dalam keteraturan,” ujarnya.

Fadel juga menegaskan bahwa Indonesia juga merupakan negara kesatuan yang sangat kuat. Sangat penting untuk sekuat tenaga menjaga kesatuan bangsa Indonesia dalam wadah NKRI. Jangan sampai ada satu jengkal tanahpun lepas dari Indonesia. “Sedih kita kalau mengingat lepasnya Timtim. Ke depan jangan sampai kejadian lagi, kita mesti jaga terus. Sebab, banyak potensi, seperti infiltrasi asing dalam berbagai bentuk ingin memecah belah Indonesia. Waspada

hal itu,” ungkapnya.

Juga tak kalah penting mesti dijaga sebagai anak bangsa, menurut Fadel, adalah keharmonisan dalam keberagaman. Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, itu suatu keniscayaan. “Keberagaman Indonesia bukan sebagai kelemahan, tapi merupakan kekayaan dan kekuatan bangsa,” ujar Fadel.

Jadi, tandas Fadel, empat hal ini: Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, sebagai pondasi yang sangat kuat untuk sebuah rumah besar bernama Indonesia.

“Tugas kita semua untuk menjaga pondasi bangsa. Bukan hanya tugas negara atau MPR saja, tapi tugas saudara-saudara juga sebagai rakyat Indonesia,” ungkap Fadel. Untuk itu, dia berharap, setelah mengikuti sosialisasi ini, para peserta meneruskan atau menularkan pemahaman Empat Pilar yang telah didapat para peserta ke lingkungan keluarga masing-masing. “Dengan demikian pemahaman nilai-nilai luhur bangsa kita lebih meluas lagi,” katanya berharap.

Temu masyarakat di Kedai Kopi

Di hari kedua kunjungannya di Provinsi Gorontalo, Sabtu (29/2/2020), Fadel ‘nongkrong’ santai bersama rakyat Gorontalo di kedai kopi sederhana di kawasan kota tua, Kelurahan Biawao, Kota Gorontalo. Dalam kegiatan yang diberi nama “Temu Masyarakat” itu, Fadel Muhammad menggunakan kesempatan mendengarkan aspirasi dan keinginan masyarakat. Hadir dalam pertemuan ini tokoh masyarakat setempat, dan masyarakat dari berbagai profesi, seperti nelayan, penjual kopi, penjual nasi kuning, penarik ojek bentor, dan ibu-ibu rumah tangga.



Dalam pertemuan santai dan sambil nyeruput kopi, Fadel lebih banyak mendengarkan dan merespon keresahan-keresahan dan harapan-harapan masyarakat tentang berbagai masalah yang dihadapi. Seorang warga bernama Irfan Ali menyampaikan keresahan masyarakat mengenai tingkat pertumbuhan perekonomian yang masih rendah di sebagian besar masyarakat Indonesia. “Hal tersebut bisa menjadi bom waktu yang memprihatinkan,” katanya.

Menyikapi keresahan tersebut, Fadel mengatakan bahwa persoalan ekonomi rakyat memang hal yang penting dan berdampak besar buat bangsa dan negara. Dalam satu kesempatan di suatu daerah, Fadel pernah dikejutkan oleh kritikan dari seorang warga masyarakat yang mengatakan bahwa

Lahan juga diberikan sebagai media tanamnya, sehingga banyak rakyat memiliki pendapatan yang layak dari menanam jagung,” tambahnya.

Pemberdayaan ekonomi rakyat, tegas Fadel, mesti sesuai dengan konstitusi dan Pancasila. Jadi, pada intinya untuk kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. “Memang soal perekonomian rakyat ini adalah tantangan besar buat negara kita. Tapi, saya apresiasi Presiden RI yang berjanji pada periode kedua ini akan mati-matian untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia,” katanya.

Sekali lagi, Fadel menegaskan, tanpa upaya meningkatkan perekonomian rakyat maka tujuan besar bangsa ini, yakni menuju Indonesia yang makmur dan sejahtera akan

alam yang sangat luar biasa. Seperti keindahan hutan-hutan tropis beserta keragaman hayati di dalamnya, dan keindahan laut beserta biota lautnya.

Keindahan alam tersebut mampu meningkatkan perekonomian rakyat melalui pemberdayaan wisata alam. Untuk itu, masyarakat harus mampu dengan upaya keras dan sungguh-sungguh menjaga kekayaan alam Indonesia. Sebab, menjaga kelestarian alam adalah refleksi dari pengamalan Pancasila, yakni menjaga keutuhan bangsa dan negara, termasuk alamnya.

Desa Olele, lanjut Fadel, adalah salah satu wilayah Indonesia yang memiliki kekayaan alam luar biasa, terutama kekayaan alam laut dan biota di dalamnya. “Potensi Olele ini mulai dari karang-karang lautnya, kejernihan airnya, ikan-ikannya sangat banyak dan beragam, yang sudah saya kembangkan saat saya menjabat Gubernur Gorontalo dahulu, dan saya perjuangkan hingga menjadi wilayah konservasi,” katanya.

Kini, lanjut Fadel, desa wisata Olele sudah berkembang menjadi salah satu tujuan wisata populer domestik dan mulai dikenal manca negara sebagai Taman Laut Olele, terutama yang menyukai alam laut dan kegiatan snorkeling, serta diving dengan 20 spot yang bisa dinikmati wisatawan. Saat melakukan snorkeling dan diving, wisatawan juga diberi fasilitas berupa difoto di bawah laut bersama ikan-ikan hias dan terumbu karang yang cantik oleh pemandu. “Spot-spot tersebut sangat bagus, saya jamin sebab saya seorang penyelam,” tegasnya.

Fadel menegaskan, kelestarian alam beserta manfaatnya ada di tangan masyarakat sekitar yang hidup dan mengambil manfaat dari kekayaan alam tersebut. Masyarakat mesti menjaga anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa tersebut dengan baik. Menjaga ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dalam hal ini kekayaan alam dan segala isinya, juga adalah pencerminan Pancasila, yakni sila pertama.

“Apalagi, dengan kehadiran banyaknya wisatawan dari mancanegara saat ini adalah kesempatan masyarakat untuk menunjukkan karakter bangsa yang ramah, beretika dan gemar menolong sesama. Tunjukkan nilai-nilai luhur bangsa yang merupakan jati diri kita,” ajak Fadel Muhammad. □

DER



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

rakyat bawah sekarang kemampuan ekonominya rendah. Hal tersebut, kata Fadel, sangat membuatnya miris.

“Memang kue perekonomian di negeri ini masih belum merata dinikmati rakyat. Saya sudah banyak menulis bahkan sudah saya sampaikan kepada Presiden plus saya tambahkan bahwa laju pertumbuhan infrastruktur itu penting dan diperlukan, tapi lebih penting lagi adalah bagaimana perekonomian rakyat terus meningkat, bagaimana rakyat bisa memperoleh pendapatan yang layak,” ungkapnya.

Negara, lanjut Fadel, mesti memiliki langkah serius dalam pemberdayaan ekonomi rakyat dan membimbing mereka sehingga mampu sejahtera. “Seperti yang saya lakukan ketika menjabat Gubernur Gorontalo. Waktu itu, saya memberikan bibit jagung secara gratis.

terganggu. “Pesan saya untuk diri saya sendiri dan yang lainnya, buat apa menjadi pejabat kalau rakyatnya masih susah, percuma. Saya harap pemerintah akan serius menuntaskan hal tersebut dan rakyat mendukung hingga terwujud,” tegasnya.

Jaga kelestarian alam Indonesia

Kegiatan berikutnya, Fadel Muhammad adalah gelar Sosialisasi Empat Pilar MPR di Desa Wisata Olele, kecamatan Kabila Bone, kabupaten Bone Bolango. Di sela-sela pemaparan Empat Pilar, Fadel Muhammad mengingatkan agar masyarakat menjaga secara serius kelestarian alam.

Pimpinan MPR dari Kelompok DPD RI tersebut mengungkapkan bahwa bangsa Indonesia, hampir di seluruh wilayah memiliki kekayaan tak terhingga, yakni keindahan



Kisah Wabah Penyakit Pernah Melanda Dunia

Sejarah agaknya terus berulang. Pada masa lalu, dunia pernah dilanda berbagai wabah, seperti pes, kolera, dan flu. Pulih dan muncul kembali. 'Wabah Hitam' (Black Death) yang pernah melanda Eropa mengakibatkan hilangnya sepertiga populasi di sana. Peristiwa Black Death melahirkan karya besar *The Decameron*. Karya Giovanni Boccaccio ini berkisah tentang umat manusia pergi dari suatu tempat, menghindari wabah.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

WARNA hitam identik dengan lambang kesuraman, duka, bencana, dan kematian, sebab pada tahun 1347 hingga 1351 atau pertengahan hingga akhir Abad XIV, Benua Eropa dilanda 'maut hitam', 'wabah hitam' (*black death*). Dalam *Wikipedia* diungkapkan, wabah hitam telah membunuh sepertiga hingga dua pertiga populasi Eropa. Serangan wabah ini mengakibatkan perubahan struktur sosial masyarakat Eropa. Tak hanya terjadi korban akibat wabah, namun juga mengakibatkan perburuan dan pembunuhan terhadap kaum minoritas Yahudi, pendatang, pengemis, serta penderita lepra. Pada masa itu masyarakat Eropa hidup dalam suatu ketidakpastian. Mereka hanya bisa berpikir bagaimana dirinya bisa bertahan hidup pada masa itu.

Kengerian akibat wabah hitam tergambar dari kisah yang tertulis dalam buku berjudul: *The Decameron* karya Giovanni Boccaccio. Pengarang berkebangsaan Italia yang hidup pada 1313-1375 menceritakan tujuh wanita muda dan tiga pria muda melarikan diri dari Kota Firenze agar terhindar dari wabah hitam. Pada masa itu, dikisahkan, anggota masyarakat satu dengan lainnya saling menghindari. Tidak ada tetangga saling berhubungan. Akibat wabah yang demikian buruknya membuat ayah dan ibu menolak untuk menjenguk anak-anak mereka yang terjangkit wabah. Para terdampak wabah dibiarkan tanpa perawatan, kalau pun ada, sangat minim. Dan, karya yang mengisahkan cerita tragis itu digolongkan sebagai sastra terbesar dari prosa klasik awal Italia.

Dalam *Wikipedia* diungkapkan, wabah hitam dari gejala khas suatu penyakit, *acral necrosis*, di mana kulit penderita menjadi menghitam karena pendarahan *subdermal*. Sebagian besar ilmuwan meyakini bahwa wabah hitam diakibatkan oleh serangan wabah *bubonic* yang disebabkan bakteri *Yersinia pestis* dan disebarkan oleh lalat (kutu) dengan bantuan hewan, seperti tikus rumah. Setelah tikus mati, kutu menggigit manusia dan menyebarkannya kepada manusia. Bakteri *Yersinia pestis* inilah yang juga menyebabkan wabah itu dikatakan



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

sebagai *wabah pes*.

Wabah seperti ini sebenarnya juga pernah terjadi pada tahun 541 di mana penyebarannya dimulai dari Mesir dan menjalar ke Konstantinopel (Istanbul Turki). Akibat wabah itu menyebabkan 40% penduduk Konstantinopel tewas. Tak hanya berhenti itu situ, wabah yang ada menjalar hingga sampai Mediterania bagian timur.

Ada beberapa teori terkait penyebaran wabah ini, di antaranya berdasarkan teori paling tua yang mengatakan bahwa maut hitam berasal dari Dataran Stepa di Asia

Tengah. Dari wilayah itu selanjutnya menyebar ke Eropa melalui Jalur Sutra dibawa oleh tentara dan pedagang Mongol. Sebelumnya wabah itu telah menyebar di Provinsi Hubei, Cina, pada 1334. Di Eropa, wabah hitam disebut kali pertama muncul di Kota Caffa, Krimea, 1347.

Demikian dahsyatnya wabah hitam ini hingga disebut telah menimbulkan banyak korban jiwa. Wabah yang terjadi di Eropa mengakibatkan separuh penduduk Paris meninggal dunia. Di Florence, Italia, pada 1338 terdapat kematian mencapai 110 ribu



orang. Pada 1351, kematian penduduk di kota itu mencapai separuh penduduk yang ada. Hal serupa juga terjadi di Jerman, di Kota Hamburg, dan Bremen, di mana 60% penduduk yang ada di sana meninggal dunia akibat wabah yang terjadi. Jumlah penduduk yang ada di Jerman sebelum 1350 tercatat 170.000 orang, namun setelah wabah menggejala, penduduk di negara itu pada 1450 tercatat sekitar 40.000 orang. Total akibat serangan wabah itu populasi penduduk Eropa menjadi berkurang sepertiga.

Wabah ini disebut banyak terjadi di kota-kota besar. Sedang masyarakat yang tinggal di daerah yang terisolasi (desa) tidak mengalami wabah sebesar masyarakat yang tinggal di kota. Para pihak yang mengurus, merawat, korban wabah hitam, seperti rahib

bahkan tidak bisa mengatasi wabah yang demikian dahsyatnya.

Untuk mencegah agar penyakit tidak semakin menjalar, pemerintah kolonial menjalankan program pembongkaran hampir sejuta rumah. Rumah masyarakat dibongkar bagian atap, dinding, dan menutup lubang bambu tempat tikus bersembunyi. Dari wabah hitam di Pulau Jawa pada pemerintahan kolonial itu hingga akhirnya membuat pemerintah mendirikan STOVIA, Sekolah Dokter Jawa, yang berada di Jakarta.

Tidak hanya wabah pes yang menyebabkan kematian. Pandemi kolera pun pernah terjadi dengan dampak yang sama mengerikannya. Dalam *Wikipedia* diungkap, penyakit kolera (*asiatic cholera*) adalah penyakit menular di saluran pencernaan yang

Kaspia. Tiga tahun kemudian, wabah ini muncul di London, Inggris, dan menjalar di sana, 1832. Dua tahun kemudian juga ada di Ontario, Kanada; New York, Amerika; dan Pasifik Amerika Utara. Tahun 1852-1860, wabah kolera menyerang Rusia. Korban akibat wabah ini di negara itu mencapai lebih dari satu juta jiwa.

Wabah ini tidak hanya menyerang di Benua Putih (Eropa) dan Benua Kuning (Asia), namun juga menyerang Benua Hitam (Afrika). Pada tahun 1863 hingga 1875, selain menyerang Eropa, wabah ini juga muncul di Afrika. Eropa bisa jadi merupakan benua yang terjangkit oleh wabah kolera, buktinya pada 1899 hingga 1923, benua itu mengalami gejala yang sama. Pada masa ini, Rusia merupakan wilayah yang ter-



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

dan biarawan, saat itu juga banyak menjadi korban, sebab mereka bersentuhan langsung dengan para penderita.

Sekitar tiga abad kemudian, wabah hitam ini kembali melanda negara-negara Eropa. Menyerang Italia pada 1629 – 1631; London pada 1665 – 1666; Wina Austria 1679, Marseille Perancis 1720 – 1722; dan Moskwo tahun 1771.

Terkait wabah hitam atau pes, di Pulau Jawa juga pernah mengalami hal serupa. Pada tahun 1911 hingga 1926, wabah ini melanda hingga mengakibatkan 120 ribu orang meninggal dunia. Wabah ini pertama kali ditemukan di Malang, Jawa Timur, namun korban terbanyak ada di Jawa Tengah. Saat itu tenaga medis di Jawa sangat minim

disebabkan oleh *bakterium vibrio cholerae*. Bakteri ini biasanya masuk ke dalam tubuh melalui air minum yang terkontaminasi oleh sanitasi yang tidak benar atau dengan memakan ikan yang tidak dimasak benar, terutama kerang. Gejalanya termasuk diare, perut keram, mual, muntah, dan dehidrasi. Kematian biasanya disebabkan oleh dehidrasi. Kalau dibiarkan tak terawat maka penderita berisiko kematian tinggi. Perawatan dapat dilakukan dengan rehidrasi agresif “regimen”, biasanya diberikan secara intravena secara berkelanjutan sampai diare berhenti.

Pada 1816 hingga 1826, kolera mewabah di India, pertama kali terjadi di Bengal dan selanjutnya menjalar ke Cina hingga Laut

dampak paling serius.

Pandemi ketujuh dari kolera, terjadi pada 1960-an, banyak terjadi di negara Asia. Wabah kali ini dikatakan sebagai *Kolera El Tor*. Nama itu sesuai dengan galur bakterinya. Di tahun-tahun itu, wabah ini menyerang Indonesia pada 1961, Bangladesh tahun 1963, India tahun 1964, dan Uni Soviet tahun 1966.

Pada masa kolonial, bangsa ini juga pernah terjangkit wabah kolera. Dalam *historia.id*, diceritakan, penyakit kolera dikenal pada 1821. Roorda van Eysinga, pegawai kolonial urusan pribumi, melihat kejadian ini hiruk pikuk ketika kolera berjangkit di Batavia. “Ada hari-hari ketika di Batavia terdapat 160 orang mati (akibat kolera). Mereka mengalami



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

kejang-kejang hebat, dan meninggal dunia beberapa saat kemudian,” catat Eysinga dalam *Verschillende Reizen en Lotgevallen*.

Wabah ini membuat gugup dan gagap masyarakat Eropa di Batavia, karena dirasa penyebarannya lebih cepat dibanding dengan malaria, tipus, atau disentri. Pada 1864, kolera menyebabkan kematian orang Eropa sebanyak 240 jiwa. Sedang orang pribumi meninggal akibat wabah itu mencapai 480 orang.

Masih di *historia.id* disebut, pada 1910 dan 1911 tercatat sebagai tahun kolera. Selama itu, rata-rata tiap 1000 orang bumiputra yang tinggal di hulu kota me-

ninggal, sedangkan di kota hilir (Batavia Lama) korban meninggal mencapai 148 orang. Total warga Batavia yang meninggal diperkirakan sebanyak 6000 orang.

Diungkapkan, saat itu banyak orang meninggal sehingga banyak mayat yang tidak sempat dikubur. Mayat-mayat itu diletakkan di dekat jalan raya bersama peti matinya. Wabah itu bahkan menyebar hingga ke Kota Bogor. Hal ditulis oleh Wiwin Juwita Ramelan, dkk dalam laporan penelitian di Universitas Indonesia, berjudul ‘Penyakit Menular di Batavia’.

Wabah ini tak hanya berkulat di Batavia.

Wabah tersebut juga menjalar hingga ke Aceh. Saat Perang Aceh, menjelang Abad XX, kolera melanda wilayah itu hingga banyak serdadu Belanda terjangkit kolera. Kolera pun menyebar ke masyarakat di sana.

Selain pes dan kolera, influenza juga merupakan wabah yang bisa menular ke banyak negara. Definisi dari influenza atau flu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus RNA dari *familia Orthomyxoviridae* (virus influenza), yang menyerang unggas dan mamalia. Gejala yang paling umum dari penyakit ini adalah menggigil, demam, nyeri tenggorokan, nyeri otot, nyeri kepala berat, batuk, kelemahan, dan rasa tidak nyaman secara umum.

Pada 1889 hingga 1890 muncul wabah *flu asiatic*. Disebut demikian karena disebabkan oleh virus flu tipe H2N8. Pada 1889 flu ini menyerang Bukhara, Uzbekhistan. Wabah ini menjalar hingga Tomsk dan Kaukasus, Rusia. Tak hanya di Rusia dan Asia Tengah, namun juga hinggap di Amerika Selatan. Pada 1890, wabah ini ada di India dan Australia.

Pada 1918 hingga 1919 menggejala kolera dengan tipe virus H1N1. Wabah ini membuat di Spanyol menjangkiti hingga 8 juta orang. Bisa jadi, membuat wabah flu yang terjadi di Spanyol itu disebut *flu spanyol*. Sungguh dahsyat akibatnya, dalam enam bulan flu ini telah menyebabkan 25 juta orang tewas. Jumlah korban jiwa di seluruh dunia disebut sebanyak 50 juta jiwa. Korban di India diiperkirakan 17 juta jiwa; Setengah juta orang di Amerika Serikat dan 200.000 di Inggris mengalami nasib serupa.

Bila sebelumnya ada *flu spanyol*, selanjutnya ada *flu asia*. Disebut demikian, karena virus tipe H2N2 itu kali pertama diidentifikasi di Cina pada 1957. Selanjutnya wabah ini menjalar ke banyak negara. Wabah yang juga disebut flu burung itu telah membuat 4 juta orang tewas.

Lebih spesifikasi lagi pada 1969. Virus tipe H3N3 ditemukan di Hong Kong sehingga flu ini disebut *flu hong kong*. Akibat flu hong kong ini membuat dua juta manusia di dunia menjadi korbannya. □

AWG/dari berbagai sumber





Lockdown, Melawan Wabah Corona

Banyak negara melakukan lockdown untuk mencegah menularnya wabah corona. Masyarakat dilarang melakukan hal-hal yang sifatnya perkumpulan massa selama masa darurat. Semua kepala pemerintahan menyatakan perang melawan corona. Korban dari waktu semakin tinggi.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

SATU PERSATU kepala negara dan kepala pemerintahan yang negaranya terdampak sangat serius dari wabah corona atau covid-19 melakukan *lockdown*. Di hadapan jurnalis, 16 Maret 2020, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin mengatakan, negaranya melakukan *lockdown* selama dua pekan guna menangkal dan mencegah wabah yang terindikasi pertama kali di Wuhan, Cina, itu. Keputusan pemerintahan negeri jiran itu mulai berlaku 18 Maret 2020.

Alasan negerinya Siti Nurhaliza itu melakukan langkah demikian, menurut Muhyiddin, karena pemerintah melihat situasi wabah corona yang sangat serius. “Terlebih setelah perkembangan gelombang kedua (infeksi),” ujarnya Muhyiddin seperti termuat dalam berita-berita online. Dengan keputusan *lockdown* diharap mampu mencegah lebih banyak korban. “Ini cara satu-satunya mencegah wabah yang sudah menghancurkan kehidupan”, ucap pria berdarah Bugis-Jawa itu.

Dalam masa *lockdown*, Pemerintah Malaysia mengeluarkan aturan berupa:

Pertama, larangan aktivitas massa. Dilarang mengadakan perkumpulan massa, seperti aktivitas keagamaan, ajang olahraga, sosial, dan budaya. Diperintahkan rumah ibadah dan toko ditutup, dibuka hanya toserba, pasar, dan toko kelontong yang menyediakan keperluan keseharian. Bagi warga yang beragama Islam, aktivitas keagamaan di masjid, seperti salat Jumat ditangguhkan. *Kedua*, larangan melakukan perjalanan ke luar negeri. Sedang bagi warga negara yang baru datang dari luar negeri, mereka wajib menjalani pemeriksaan kesehatan dan karantina mandiri selama 14 hari. *Ketiga*, larangan bagi warga asing masuk ke Malaysia. *Keempat*, semua tempat pendidikan, berbagai jenjang, baik dikelola pemerintah atau swasta, ditutup. *Kelima*, kegiatan belajar di perguruan tinggi juga ditutup. *Keenam*, menutup beberapa lembaga pemerintahan, kecuali lembaga atau badan pemerintahan yang melayani kepentingan umum dan keseharian masyarakat.

Akibat dari kebijakan yang dikeluarkan Perdana Menteri pengganti Mahathir Muhammad itu, warga Malaysia, terutama

di Kuala Lumpur, ramai-ramai menyerbu toko serba ada untuk mempersiapkan kebutuhan selama *lockdown*. Riuhnya warga yang berbelanja membuat pemerintah memperingatkan agar mereka tidak perlu panic, sebab kebutuhan selama kebijakan itu diterapkan tersedia.

Sebelum Malaysia mengumumkan penguncian wilayah, beberapa negara telah melakukan hal serupa akibat dari wabah corona yang semakin mengerikan. Spanyol memberlakukan *lockdown* selama 15 hari, sejak 15 Maret 2020. Negara matador itu meminta kepada penduduknya agar tinggal di rumah selama masa darurat. Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanches, menegaskan, negara saat ini hanya memiliki satu tujuan, yakni mengalahkan virus corona. Di sana yang boleh keluar rumah hanya pekerja medis dan warga yang belanja kebutuhan pokok.

Negeri indah dan penuh seni di Eropa, Perancis, juga menerapkan *lockdown*. Perdana Menteri Perancis, Edouard Philippe, mengumumkan mulai 14 Maret 2020 negaranya melakukan kebijakan itu. “Untuk me-



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

merangi wabah virus corona”, tegasnya. Tempat-tempat seperti restoran, kafe, bioskop, dan club, ditutup. “Toko makanan, apotek, bank, pasar, dan pom bensin tetap buka,” ujar Philippe sebagaimana termuat dalam media massa.

Negara kepulauan di Eropa, Irlandia, pada 12 Maret hingga 29 Maret juga melakukan hal yang sama. Tak hanya menutup semua tempat pendidikan, fasilitas penitipan anak, dan lembaga budaya, namun juga mengurangi jumlah massa dalam suatu pertemuan. Jumlahnya dibatasi tidak boleh lebih dari 100 orang di dalam ruangan dan tidak lebih 500 orang di luar ruangan. Perdana Menteri

Irlandia Leo Varadkar prihatin dan sedih sebab selama hidupnya bangsa itu belum pernah menyaksikan pandemi seperti wabah corona ini.

Negeri dongeng, Denmark, juga seperti negara Eropa lainnya dalam menangani wabah corona, juga melakukan *lockdown*. Sejak 14 Maret hingga 14 April 2020, mereka menutup perbatasan. *Lockdown*, menurut Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen, merupakan upaya untuk memastikan bahwa Denmark melewati situasi seperti itu dengan cara yang berbeda.

Negeri Italia, jauh-jauh hari telah menerapkan kebijakan itu. Sejak 10 Maret 2020,

mereka melakukan hal yang demikian. Selama *lockdown*, 60 juta penduduk di sana tak boleh melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya bisa menularkan dan tertular wabah. Semakin mengkhawatirkan dari penyebaran wabah membuat pemerintah di sana membuat kebijakan yang tegas, bagi yang keluar rumah tanpa izin akan didenda sebanyak 260 euro.

Banyak negara melakukan *lockdown* sebab dari hari ke hari perkembangan wabah ini semakin menimbulkan banyak korban. Dalam *Kompas.com*, 17/03/2020, update corona di seluruh dunia pada Selasa (17/3/2020) pukul 18.05 WIB, angka infeksi Covid-19 mencapai 185.386 orang di 162 negara dan satu alat angkut internasional (kapal pesiar *Diamond Princess* berlabuh di Yokohama, Jepang). Angka kematian untuk pandemi Covid-19 bertambah menjadi 7.332 dan pasien yang sudah dinyatakan sembuh menjadi 79.930 orang. WHO mengumumkan pandemi corona, menyusul penyebaran SARS-CoV-2 yang semakin meluas di sejumlah negara di dunia. Di Cina: 80.881 terinfeksi, 3.226 meninggal. Italia merupakan negara di luar Cina dengan jumlah korban terbanyak. Korban meninggal karena corona di Italia tercatat 2.158 kematian. Kemudian di Iran jumlah kasus ada 14.991 pasien dengan total korban meninggal 853 orang. Spanyol ada 11.178 kasus dengan angka kematian bertambah menjadi 491 orang. Korea Selatan dengan total 8.320 kasus terkonfirmasi dan 81 kematian.

Berikut daftar korban akibat wabah corona dalam *Kompas.com*, 17/03/2020, Jerman 7.610 terinfeksi, 17 meninggal; Perancis 6.633 terinfeksi, 148 meninggal; Amerika Serikat 4.743 terinfeksi, 93 meninggal; Swiss 2.354 terinfeksi, 21 meninggal; Inggris 1.543 terinfeksi, 55 meninggal; Belanda 1.413 terinfeksi, 24 meninggal; Norwegia 1.368 terinfeksi, 3 meninggal; Belgia 1.243 terinfeksi, 10 meninggal; Austria 1.211 terinfeksi, 3 meninggal; Jepang 852 terinfeksi, 28 meninggal; Kapal *Diamond Princess* 696 terinfeksi, 7 meninggal. □

AWG/dari berbagai sumber





Tahun 2020, Tahun Yang Suram

Dampak wabah corona merembet ke banyak hal yang berskala internasional. Berbagai event olahraga dunia ditunda dan dibatalkan. Euro 2020 diundur, Formula 1 dibatalkan, dan Olimpiade 2020 dalam kebingungan. Dunia hiburan dan seni juga mengalami hal serupa. Ini semua di luar dugaan dan harapan sebelumnya.



HARAPAN untuk menikmati pertandingan sepakbola kelas dunia di tahun 2020, bagi pencinta olahraga bola bundar, sepertinya harus ditunda dulu. Peralnya, Euro 2020, sebuah pertandingan sepakbola antarnegara-negara Eropa jadwalnya diundur. Semestinya kejuaraan bagi negara-negara yang terhimpun dalam UEFA diselenggarakan pada 12 Juni hingga 17 Juli 2020, namun karena merebaknya wabah corona yang tidak pandang bulu membuat pertandingan yang akan digelar di 12 kota di 12 negara itu diundur pada 11 Juni hingga 11 Juli 2021.

Presiden UEFA, Aleksander Ceferin, secara resmi melakukan penundaan Euro 2020. "Karena pandemi virus corona", ujar Ceferin. Menurut pria asal Slovenia itu, keputusan penundaan disepakati bersama Komite Eksekutif UEFA, Asosiasi Klub Eropa, Liga Eropa, dan FIFPro Eropa. Bagi Ceferin kesehatan para penggemar, staf, dan pemain harus menjadi prioritas. "Semangat UEFA agar kompetisi dapat bisa aman," ujarnya.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Italia sebagai negara terdampak wabah corona tertinggi di luar Cina, jauh-jauh hari telah melakukan pelarangan berbagai macam ajang olahraga sejak 10 Maret 2020 hingga 3 April 2020. Akibatnya, Liga Italia sebagai salah satu pertandingan liga sepakbola terbesar di dunia mengalami penundaan kompetisi. Karena sudah berjalan dan kompetisi ditunda maka ada 25 jadwal pertandingan yang terganggu. Di salah satu

pertandingan, seperti saat AC Milan melawan Genoa, pertandingan yang digelar tanpa penonton. Disebutkan ada pemain Serie A, yakni Daniel Rugani dari Juventus dan Manolo Gabbiadini dari Sampdoria, terkena infeksi corona.

Penundaan Liga Italia diikuti oleh Liga Spanyol, *La Liga*. Di Spanyol, awalnya liga tetap berlangsung namun tanpa penonton, karena ada pemain basket yang bergabung

dalam Real Madrid Basketball positif mengidap wabah corona, dan hal itu merembet ke sepakbola. Apa hubungannya basket dengan La Liga? Karena pusat kebugaran Real Madrid Basketball dengan Real Madrid FC sama, atau digunakan secara bergantian. Agar wabah corona tidak menjadi-jadi dan agar pemain Real Madrid FC tidak terjangkiti, maka seluruh pemain yang berjersey putih itu dikarantina. Tentu pengkarantinaan pemain Real Madrid FC mengganggu jadwal pertandingan yang lain, dan demi keamanan semua, *La Liga* ditunda.

Aturan yang melarang pertemuan dengan jumlah massa lebih dari 100 orang di Belanda, membuat liga sepakbola di negeri tulip itu juga menunda kompetisinya. Baik

Agustus 2020 maka akan berbahaya, sebab tidak hanya menciptakan berkumpulnya para atlet namun juga penonton dan wisatawan dari berbagai negara.

Dunia olahraga balap mobil yang populer, Formula 1 juga mengalami hal serupa. Pembukaan Formula 1 Musim 2020 yang sedianya digelar di Sirkuit Albert Park, Australia, pada 13 hingga 15 Maret 2020, dibatalkan. Penundaan dilakukan sebab, menurut penyelenggara Formula 1 dan Federasi Otomotif Internasional (FIA), ada pembalap dari McLaren Racing positif terinfeksi corona sehari sebelum acara digelar. Keputusan itu didukung semua pihak demi keselamatan anggota keluarga Formula 1 dan komunitas yang lebih luas.

Raya Cittadino dell'EUR.

Tidak hanya dunia olahraga berskala besar yang tertunda atau dibatalkan karena wabah corona. Dunia hiburan pun mengalami nasib serupa. Pertunjukan K-Pop, seperti TWICE, GOT&, dan (G)I-DLE, terpaksa menunda konser dan *fans meeting*. *Korea Music Awards* dan *FACT Music Awards* yang menghadirkan BTS, Monsta X, dan TWICE, juga mengalami serupa. Hal demikian juga dialami Seventeen dalam tour keliling dunianya.

Festival K-Pop yang rencananya dipertontonkan 25 April 2020 di Los Angeles, Amerika Serikat, juga mengalami penundaan. Acara dalam rangkaian *The Korea Times Music Festival* itu dibatalkan dengan alasan



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Eredivisie dan *Keuken Kampioen Divisie*, Divisi 1 dan Divisi 2, ditangguhkan selama dua pekan. Hal demikian juga terjadi pada liga-liga sepakbola lainnya di negara benua putih itu.

Jepang pada tahun ini juga akan menggelar pesta olahraga terbesar di dunia, Olimpiade 2020. Namun, saat ini pemerintah di sana galau akibat wabah corona yang sepertinya belum bisa dikendalikan. Terkait ketakutan akan dampak wabah corona membuat mayoritas warga negeri Sakura itu meminta olimpiade ditunda. Dari hasil jajak pendapat menunjukkan 705 responden memilih olimpiade ditunda. Jajak pendapat yang lain juga serupa, 60% ingin kegiatan itu diundur. Mereka khawatir bila olimpiade tetap sesuai jadwal, yakni 24 Juli hingga 9

Rencana digelarnya Formula E di Jakarta juga mengalami nasib serupa. Balapan mobil yang penggerakannya menggunakan listrik itu sedianya akan dihelat pada 6 Juni 2020, namun karena alasan yang sama, Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, menunda acara itu. Dalam Surat Pemberitahuan Nomor 117/1/857/73/ tertulis, mencermati perkembangan COVID-19 di berbagai belahan dunia, khususnya di Jakarta, maka penyelenggaraan Formula E yang semula dijadwalkan pada Juni 2020 ditunda pelaksanaannya. Jakarta bukan kota yang pertama menunda Formula E. Dua negara lainnya, Cina dan Italia, juga melakukan hal serupa. Sedianya Cina akan digelar pada 21 Maret 2020 di Sirkuit Jalan Raya Haitang Bay, dan Italia seharusnya menggelar pada 4 April 2020 di Sirkuit Jalan

karena adanya pembatasan perjalanan di wilayah Asia.

Dunia perfilman dunia juga tertimpa wabah. Sedianya pada 1 Mei 2020 akan rilis film hero-heron-an, *Black Widow*. Namun gara-gara corona terpaksa dibatalkan. Tidak hanya Janda Hitam yang ditunda, film seperti *The Personal History of David Copperfield*, *Woman in the Window*, *Fast & Furious*, dan *A Quiet Place 2*, juga mengalami hal yang sama, ditunda rilisnya gara-gara wabah corona.

Sementara di negeri Paman Sam, demi keamanan bersama, banyak bioskop menutup diri, terutama di daerah zona merah. Regal Cinemas, AMC Theatres, dan Cinemark menutup diri selama masih ada wabah. □

AWG/dari berbagai sumber

Suyanto

Kepala Desa Karanganyar

Pemerintah Mesti Memerhatikan Pemberdayaan Desa



TIDAK sedikit warga masyarakat di pedesaan, walaupun wilayahnya merupakan lokasi pariwisata, namun tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Mereka (warga masyarakat) desa hanya menjadi penonton di tengah menggeliatnya ekonomi di sekitarnya.

Namun, kami bersyukur di wilayah Jawa Tengah, tepatnya di sekitaran Taman Wisata Candi Borobudur Magelang, banyak sekali program untuk memajukan perekonomian rakyat sekitar, terutama di bidang pariwisata.

Di sana, misalnya, ada paket wisata berupa tour mobil VW dengan tujuan desa-desa wisata sekitar. Juga ada delman wisata, dan yang paling luar biasa adalah tumbuhnya resort-resort yang disebut Balai Ekonomi Desa (Balkondes) untuk wisatawan di beberapa desa, salah satunya Balkondes Karanganyar.

Balkondes ini pengelolaannya adalah masyarakat sekitar dengan bantuan dari BUMN, seperti PGN, BTN, Telkom, dan lainnya. Hal tersebut sangat bermanfaat buat memajukan perekonomian rakyat. Saya berharap agar pemerintah terus menjaga program tersebut dan mengembangkannya, tidak hanya di seputaran Borobudur tapi di daerah-daerah lainnya. □

DER

Pandi Hidayat

Pengda Perbakin Kepri

Pemahaman Pancasila Baik Menyasar Berbagai Komunitas

SAYA sangat apresiasi terhadap MPR, terutama Ketua MPR Bambang Soesatyo, yang melakukan aksi pemahaman atau Sosialisasi Empat Pilar MPR yang didalamnya ada Pancasila ke berbagai komunitas, seperti komunitas menembak Indonesia.

Penyampiannya pun sangat friendly, mudah dipahami apalagi dibarengi dengan kegiatan lomba menembak (Legislator Championship). Pancasila adalah milik kita semua, untuk itu pemahaman tentang Pancasila mesti dilakukan semua anak bangsa, sebab sangat penting.

Pancasila juga sebagai pengikat kita, seluruh rakyat Indonesia, yang berbeda-beda menjadi satu dalam naungan Pancasila dan dalam wadah NKRI. Saya dukung MPR untuk terus melakukan metode-metode kreatif seperti ini dalam upaya pemahaman Pancasila.

Komunitas masyarakat yang lain juga perlu disambangi untuk diajak untuk diberi pemahaman tentang Pancasila, dan saya rasa semua akan mendukung sebab itu untuk kepentingan bersama. Apa yang disampaikan Ketua MPR sangat bagus, ke depan mesti dikembangkan lagi. □

DER



Sosialisasi Empat Pilar IKADI

HNW Ajak Para Dai Menjaga dan Memperkuat Indonesia



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

DIHADAPAN ratusan anggota Ikatan Dai Indonesia (IKADI), di Jakarta, 8 Maret 2020, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) memaparkan bahwa ulama dan umat Islam di Indonesia mempunyai peran sangat besar dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sehingga dari peran yang ada itu, pria asal Klaten, Jawa Tengah, itu menegaskan, jangan sampai ulama dan umat Islam dibentur-benturkan atau diadudomba dengan kelompok yang lain.

Untuk itu, HNW mengharapkan agar para dai mengetahui dan memahami sejarah peran ulama dan umat Islam di Indonesia, sehingga para dai ikut dan dapat menguatkan, serta menjaga bangsa Indonesia. “Jas Hijau, jangan sekali-kali menghilangkan jasa ulama dan umat (Islam di Indonesia)”, papar HNW dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) itu.

Di hadapan para dai yang datang dari seluruh Indonesia, HNW selanjutnya menceritakan, demi keutuhan bangsa Indonesia, para tokoh umat Islam yang tergabung dalam Tim 9 BPUPKI rela menghilangkan 7 kata dari Piagam Jakarta yang telah disepakati pada 22 Juni 1945. “Di sinilah peran umat Islam dalam ikut melahirkan Pancasila,” ujarnya. “Jadi, peran umat Islam bukan

asal-asalan”, tambahnya. Kemudian para tokoh umat Islam mengubah Sila I dari Pancasila, menurut Wakil Ketua Badan Wakaf Pondok Pesantren Gontor, itu menunjukkan bahwa umat Islam paham akan arti keberagaman dan kebangsaan. “Ulama sepakat bahwa kemerdekaan harus menghadirkan kemaslahatan”, ujarnya.

Peran umat Islam, lanjut HNW, tak berhenti di situ. Ketika Indonesia merdeka, Belanda tidak ingin bangsa ini kuat. Negeri Kincir Angin itu ingin bentuk negara yang ada sifatnya tidak kokoh. Mereka mendorong agar Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, Desember 1949, bentuk negara adalah RIS. “Sehingga saat itu banyak negara bagian”, paparnya. Hal demikian, ungkap HNW, ada ke Gundahan dari Ketua Fraksi Partai Masyumi di Parlemen, Muhammad Natsir.

Menurut HNW, kala itu Natsir berpikir bahwa Indonesia merdeka bukan bertujuan untuk membentuk RIS, namun mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Maka pada 3 April 1950 di depan anggota parlemen, Natsir menyampaikan pidato Mosi Integral,” tuturnya. Mosi Integral adalah mengajak kepada semua untuk mengembalikan bentuk negara ke tujuan semula, yaitu NKRI. “Mosi itu didukung oleh



semua kekuatan politik yang ada”, ungkapnya. “Hingga pada 17 Agustus 1950, Indonesia kembali ke bentuk NKRI, bukan RIS lagi”, tegasnya. “Itulah suatu fakta peran umat Islam dalam mempertahankan NKRI”, tuturnya.

Sebelum Indonesia merdeka, di wilayah nusantara banyak berdiri kesultanan atau kerajaan-kerajaan Islam. Ketika Indonesia merdeka, kesultanan yang ada tak hanya sekedar menyatakan diri bergabung dengan

Indonesia, namun mereka juga membantu secara finansial keuangan kepada negara yang baru. “Sultan-sultan yang ada membantu uang dan emas kepada pemerintah Indonesia yang jumlahnya hingga triliunan rupiah,” paparnya. Tak hanya menyumbang dalam bentuk finansial, salah satu sultan, yakni Sultan Hamid dari Kesultanan Pontianak, Kalimantan Barat, yang membuat lambang Garuda Pancasila.

HNW dalam kesempatan itu menceritakan peran dan jasa para ulama dan umat Islam, meski demikian dia mengakui para ulama dan umat Islam dalam berjuang dan mempertahankan Indonesia tidak sendirian, namun bekerjasama dengan tokoh-tokoh lain yang mempunyai tujuan yang sama, yakni Indonesia merdeka. “Bangsa ini memberi kesempatan dan ruang yang sama kepada siapapun”, paparnya. □

AWG

Serap Aspirasi di Riau

Keberagaman adalah Kelebihan Bangsa Indonesia

WAKIL Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Dr. Syarifuddin Hasan, SE., M.M., M.B.A., selaku koordinator Badan Pengkajian MPR kembali melakukan serap aspirasi terkait wacana Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kali ini, politisi Partai Demokrat itu memilih Provinsi Riau, tepatnya Kota Pekanbaru sebagai tempat untuk mendengarkan pendapat dari masyarakat.

Selama satu hari, pada Senin (24/2), itu Syarif Hasan bertemu masing-masing Gubernur Riau Drs. H. Syamsuar, M.Si., dan Wakil Gubernur Brigjen (Purn) TNI Edi Natar Nasution, Wali Kota Pekanbaru Dr. Firdaus St., serta civitas akademika Universitas Riau. Namun, pagi sebelum melaksanakan Safari Kebangsaan dan serap aspirasi, Syarif Hasan terlebih dahulu memenuhi undangan membuka Olimpiade PPKn ke-9 Unri 2020, sekaligus menyampaikan sosialisasi untuk para mahasiswa.

Pada kesempatan itu, Syarif Hasan didampingi Wakil Gubernur Riau Brigjen (Purn) TNI Edi Natar Nasution, Wakil Rektor III Universitas Riau Prof. Dr. Iwantono, dan Dekan FKIP Unri Prof. Dr. Mahdum, melakukan pemukulan gong tanda dibukanya Olimpiade PPKn ke-9 Unri tahun 2020. Acara tersebut berlangsung di Ruang Serba Guna FKIP Unri.

Olimpiade PPKn Unri ke-9 tahun 2020 ini diikuti 962 peserta dari kalangan mahasiswa



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

dan pelajar SLTA, berlangsung pada 24-29 Februari 2020. Sedangkan tema kegiatan tersebut adalah: Merajut kebhinekaan dan persatuan kesatuan di kalangan milenial.

Saat menyampaikan materi Sosialisasi Empat Pilar MPR, Wakil Ketua MPR Syarif Hasan antara lain menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan Olimpiade PPKn di Unri yang pelaksanaannya sudah memasuki ke-9 kalinya. Pelaksanaan Olimpiade ke-9 ini menunjukkan kesungguhan Universitas Riau dalam memasyarakatkan Pancasila.

“Saya yakin, tidak mudah melaksanakan Olimpiade PPKn hingga ke-9 seperti sekarang ini. Mudah-mudahan pelaksanaan

olimpiade ini membantu generasi milenial untuk lebih mengenal dan memahami nilai-nilai luhur yang ada dalam Pancasila,” harap Syarif Hasan.

Kemajemukan yang dimiliki Indonesia, menurut Syarif Hasan, ibarat pisau bermata dua, bisa menguntungkan dan merugikan. Tinggal bagaimana generasi muda melihat tantangan tersebut. Namun, selama bangsa Indonesia menganggap bahwa NKRI adalah harga mati, niscaya keberagaman yang ada di Indonesia akan menjadi kelebihan bangsa Indonesia dibanding negara-negara lain di dunia. Karenan itu, yang terpenting adalah bagaimana bangsa Indonesia, termasuk





generasi muda, ikut menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya berhenti pada jargon-jargon yang sudah sering diucapkan berbagai pihak.

“Sejarah membuktikan, hanya NKRI sajalah yang sesuai bagi bangsa Indonesia. Karena, selain itu baik liberalisme maupun komunisme semuanya hancur, tidak bisa bertahan di Indonesia,” ujar Syarif Hasan lagi.

Usai membuka Olimpiade PPKn, Syarif Hasan bertemu dengan para dosen untuk mendengarkan masukan terkait wacana amandemen konstitusi. Pertemuan dengan para dosen Unri itu berlangsung di Ruang Indragiri, Gedung Rektorat Universitas Riau. Acara itu dipimpin Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof. Dr. M. Nur Mustafa, M.Pd.

Pada kesempatan itu, Syarif Hasan diminta berhati-hati sebelum melaksanakan perubahan konstitusi. Jika alasannya adalah karena perlunya Haluan Negara hendaklah tidak meniru Garis-Garis Besar Haluan Negara yang berlaku di masa Orde Baru. Lebih baik memperbaiki sistem perencanaan yang sudah ada jika memang dianggap ada beberapa kelemahan di dalamnya.

“Ada juga yang mengatakan, kalau memasukkan haluan negara ke dalam

konstitusi akan membuat MPR menjadi lembaga tertinggi negara, dan itu memiliki implikasi yang sangat luas,” kata Syarif Hasan.

Selain itu, lanjut Syarif Hasan, memasukkan Haluan Negara ke dalam UUD NRI Tahun 1945 akan menimbulkan pertanyaan, bagaimana cara mengubahnya. Apalagi, kalau kemudian ditemukan kesalahan dari haluan negara yang sudah dibuat. Lantas bagaimanakah cara mengubah Haluan Negara, khususnya terkait

rencana jangka pendek. Karena itu, ada usulan lebih baik haluan negara itu menggunakan payung hukum Undang-Undang saja. Dan, tidak perlu melakukan perubahan terhadap konstitusi.

Mudah Membuat dan Mengubahnya

Setelah kegiatan di Unri selesai, Syarif Hasan langsung melesat menuju ke ruang pertemuan Walikota Pekanbaru. Di tempat ini, Wakil Ketua MPR telah ditunggu Walikota Pekanbaru, Dr. Firdaus St. Di tempat tersebut,





Syarif Hasan kembali mendapat berbagai masukan terkait wacana amandemen.

Syarief Hasan menyambut baik berbagai masukan yang disampaikan Walikota Pekanbaru beserta jajarannya. Ia berjanji akan melanjutkan informasi yang diperolehnya kepada para pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Wakil Ketua MPR juga mengatakan, akan memerhatikan dengan sungguh-sungguh usulan pemerintah daerah, terkait penyusunan haluan negara, termasuk payung hukum yang sebaiknya digunakan, yaitu undang-undang.

“Pak Walikota memberikan masukan, sebaiknya haluan Negara itu dipayungi dengan UU saja, agar lebih mudah membuat dan mengubahnya. Karena yang paling penting bagi mereka adalah jangan sampai membuang energi untuk sesuatu yang tak diperlukan,” ujar Syarief Hasan.

Pada kesempatan itu, Dr. Firdaus St., menyampaikan penghargaan, karena dilibatkan untuk ikut bicara soal rencana amandemen konstitusi. Pembicaraan itu membuat wawasannya soal kebijakan para pemangku kekuasaan di tingkat pusat bertambah. Bagi Firdaus, yang terpenting dari wacana amandemen itu adalah bisa membawa Indonesia pada kehidupan yang lebih baik. Seperti saat terjadi empat tahap perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada 1999-2002.

“Kalau sekarang ada amandemen hendaknya akan membawa Indonesia jauh lebih baik lagi ke depan. Setidaknya mampu

mencapai Indonesia adil makmur di tahun 2045. Menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara lima besar ekonomi dunia,” kata Firdaus.

Sinkronisasi Pembangunan

Sebelum mengakhiri kunjungannya di Pekanbaru, Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menghadiri undangan ramah tamah dengan Gubernur Riau Drs. H. Syamsuar, M.Si., dan Wakil Gubernur Brigjen (purn) TNI Edi Natar Nasution. Pertemuan tersebut berlangsung di rumah dinas Gubernur Riau. Ikut hadir pada acara tersebut Plt Asisten II Provinsi Riau Elly Wardhani, serta Ketua DPRD Provinsi Riau, Asri Auzar.

Pada pertemuan tersebut, Syarief Hasan

mendapat masukan dari Gubernur Riau, khususnya menyangkut pentingnya haluan negara. Karena itu, Wakil Ketua MPR menyampaikan terima kasih karena sudah mendapatkan perspektif lain terkait haluan negara.

“Saya mendapat informasi yang berbeda. Sebuah antitesa dari alasan yang selama ini berkembang dan membuat kita berfikir tentang haluan negara. Seolah-olah, ketiadaan GBHN di awal reformasi membuat pembangunan kita tidak berkesinambungan dan tidak sinkron antara pusat dan daerah. Sehingga kita merasa membutuhkan haluan negara,” kata Syarief Hasan.

Sesuai pengalaman Gubernur Riau, kata Syarief Hasan, hilangnya GBHN dan sudah





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

digantikan oleh Rancangan pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan Pendek (RPJPN, RPJMN, dan RPJPN). Bahkan, untuk menjamin sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dan daerah sudah banyak dibuat peraturan perundangan.

Tidak itu saja, untuk memastikan rancangan pembangunan daerah sesuai dengan pusat, kementerian dalam negeri melakukan pengecekan langsung ke daerah. Pengecekan dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan di daerah sesuai dengan pembangunan yang ditetapkan di tingkat pusat. Karena itu, Syarif Hasan sepakat agar MPR berhati-hati sebelum memutuskan masalah haluan negara, termasuk persoalan payung hukumnya.

Sejauh ini, lanjut Syarif Hasan, terdapat banyak kemungkinan terkait wacana amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945. Namun, secara implisit bisa dirasakan adanya dorongan yang menghendaki adanya haluan negara. Tetapi, keinginan tersebut tidak menghendaki terjadinya perubahan sistem ketatanegaraan. Pihak yang lain menginginkan haluan negara, tetapi tanpa melakukan perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945, cukup dengan Ketetapan MPR saja.

Sebelumnya, Gubernur Riau Drs. H.

Syamsuar, M.Si., mengatakan, sistem perencanaan pembangunan yang digunakan saat sekarang sangatlah baik. Demikian baiknya, acapkali ada daerah yang mengalami peningkatan ekonomi lebih besar dibanding pusat. Karena itu, Syamsuar berpendapat, rencana pembangunan dalam bentuk RPJMN dan RPJPN patut dipertahankan.

“Ketakutan antara pusat dan daerah tidak ada sinkronisasi program pembangunan tidak benar. Kami di daerah senantiasa

mengikuti program pembangunan yang dicanangkan dari pusat. Demikian pula Kabupaten-Kota juga harus mengikuti program pembangunan pemerintah provinsi,” kata Gubernur Riau menambahkan.

Kesesuaian program pembangunan antara pusat dan daerah, menurut Syamsuar, sudah diatur secara detail oleh perundang-undangan. Karena itu, tidak ada ruang bagi pemerintah daerah untuk tidak mengikuti program pembangunan pemerintah di atasnya. □

MBO



Legislator Championship 2020

Sosialisasi Empat Pilar di Acara Kejuaraan Menembak



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo kembali menorehkan inovasi baru dalam penyelenggaraan Sosialisasi Empat Pilar MPR. Setelah sebelumnya sukses menyelenggarakan Sosialisasi Empat Pilar MPR melibatkan komunitas motor melalui Riding Kebangsaan dan Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI, kali ini dia menggandeng PB PERBAKIN, melakukan

Sosialisasi Empat Pilar MPR melalui kejuaraan menembak.

Jumat pagi (6/3/2020), sekitar 250 pecinta olahraga menembak mengikuti Kejuaraan Tembak Reaksi Level III International Practical Shooting Confederation (IPSC) Legislator Championship 2020 memperebutkan Piala Ketua MPR RI di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta. Selain Piala Ketua MPR,

juga diperebutkan hadiah lainnya, antara lain: pistol sebagai hadiah utama, motor listrik, logam mulia, ammo armscore sebagai hadiah tambahan. Dan, pre matchnya dilaksanakan Jum'at pagi itu.

Puncak acara Kejuaraan Tembak Reaksi IPSC Level III Legislator Championship 2020 dan Sosialisasi Empat Pilar MPR berlangsung Sabtu (7/3/20). Dibuka oleh Ketua MPR





Bambang Soesatyo, didampingi para wakil ketua MPR: Zulkifli Hasan, Jazilul Fawaid dan Fadel Muhammad. Serta dihadiri Ketua Komisi I dan III DPR, Menpora, Ketua BPK, Jaksa Agung, Kepala BAIS, Danpaspampres, Danpomal, Wakapolri, dan Ketua Umum Perbakin.

Pada acara puncak Kejuaraan Tembak Reaksi IPSC Level III Legislator Championship 2020 tersebut menampilkan kejuaraan reaksi khusus eksekutif yang diikuti beberapa pejabat tinggi negara, termasuk Ketua MPR.

Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam

sambutannya menyatakan, melalui kejuaraan ini, MPR RI sekaligus mengajak seluruh elemen bangsa merenungi perjalanan 22 tahun reformasi. "Tidak ada yang salah dengan reformasi, namun bukan berarti kita boleh berpuas diri dan tak melakukan evaluasi perbaikan. Karena memperbaiki kehidupan bangsa merupakan upaya berkelanjutan yang tak boleh berhenti di tengah jalan," ujar Bamsuet, begitu sapaan Bambang Soesatyo.

Lebih lanjut, Bamsuet mengungkapkan, kejuaraan yang digelar sejak 6 hingga 7 Maret 2020 tersebut, diselenggarakan sebagai

wadah silaturahmi dan tukar-menukar pengalaman antarpecinta olahraga menembak. Selain itu, juga untuk mewujudkan dukungan moral kepada kemajuan cabang olahraga menembak yang telah menorehkan prestasi yang sangat membanggakan.

Prestasi yang dimaksud itu antara lain: Pada SEA Games 2019 di Filipina, Indonesia tampil menjadi juara umum di cabang olahraga menembak. Dan, pada tahun itu juga, kontingen TNI AD berhasil menoreh prestasi meraih juara umum untuk ke-12 kalinya secara beruntun dalam lomba menembak antarnegara Australian Army of





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Skill Arms at Meeting (AASAM).

Lalu, menurut anggota Badan Penasihat PB PERBAKIN ini, pada 2019, dalam ajang kejuaraan menembak Iskandar Shoot di Malaysia, Indonesia berhasil membawa pulang tiga medali emas dan satu perunggu. Sebelumnya, pada 2017, di ajang XVIII World Shoot, atlet menembak Indonesia, Vincentius, berhasil menembus posisi sepuluh besar.

Pemahaman Cinta Negara

Dalam kesempatan itu, Bamsuet juga menyampaikan Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada para peserta kejuaraan menembak. Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini memaparkan, pasca Reformasi 1998, tafsir Pancasila seperti dilepaskan ke pasar bebas. Hal ini ditandai dengan dihapusnya TAP MPR RI No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), dibubarkannya Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7), serta dihapusnya mata pelajaran Pancasila sebagai mata pelajaran pokok di sekolah dan perguruan tinggi.

Dampaknya, tandas Bamsuet, negara tak punya kuasa untuk hadir membina anak bangsa agar mempunyai mental ideologi Pancasila. Akibatnya sungguh mencekam. Bamsuet lalu memaparkan hasil survei yang

dilakukan oleh beberapa lembaga survei. Survei Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 2018 melaporkan 63% guru memiliki opini intoleran terhadap agama lain. Menteri Pertahanan Indonesia Ryamizard Ryacudu mengungkapkan 3% anggota TNI terpapar ekstrimisme. Lalu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di 2018 mencatat 7 kampus terpapar ekstrimisme agama. Kemudian, 36.5% mahasiswa kampus Islam setuju khilafah berdasarkan

survei Cisfrom 2018. Dan, 19.4% PNS tidak setuju Pancasila sebagaimana temuan Alvara 2018.

Mengisi kekosongan peran negara dalam membentuk dan membina mental ideologi bangsa itulah, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menuturkan jasa yang ditorehkan Ketua MPR RI 2009-2014, Taufik Kiemas (almarhum) sebagai pencetus Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. "Tak salah jika MPR RI bermaksud memberikan anugerah Bapak Empat Pilar kepada yang bersangkutan,"



katanya.

Dalam melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR, jelas Bamsoet, pendekatan yang dilakukan MPR RI selalu berbeda terhadap satu segmen masyarakat dengan segmen lainnya. “MPR RI senantiasa dituntut kreatif dan inovatif, sehingga tak monoton melakukan sosialisasi yang hanya dalam bentuk ceramah maupun seminar. Sebagaimana ditunjukkan hari ini melalui kejuaraan tembak reaksi,” tandas Bamsoet.

Dalam paparan selanjutnya, Bamsoet mengungkapkan seputar kecintaan anak bangsa kepada bangsa dan negara. Menurut Bamsoet, banyak cara dan upaya yang bisa dilakukan masyarakat Indonesia untuk menunjukkan kecintaan kepada bangsa dan negara. Salah satunya dengan berbagai prestasi yang diperoleh para atlet menembak, baik di SEA Games maupun di kejuaraan AASAM yang sangat mengharumkan nama bangsa. Semua itu karena didorong semangat cinta tanah air yang mendalam. “Bisa kita bayangkan bendera Indonesia dan lagu kebangsaan kita berkibar dan berkumandang di dunia. Rasa cinta dan bangga tanah air sangat terasa,” ujarnya.

Cinta tanah air, lanjut Bamsoet, adalah nilai kebangsaan yang terus-menerus digelorkan oleh MPR melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Sosialisasi tersebut digencarkan MPR dengan maksud untuk menyegarkan kembali memori kolektif seluruh bangsa Indonesia kepada nilai-nilai kebangsaan.

Untuk itu, kata Bamsoet, saat ini MPR terus berupaya untuk memperkaya berbagai metodologi pasyarakat Empat Pilar melalui berbagai pendekatan kepada berbagai elemen masyarakat, seperti kepada komunitas biker, komunitas pecinta burung, komunitas pecinta sepeda onthel dan lain sebagainya.

“Penyelenggaraan kejuaraan menembak Reaksi Legislator Championship 2020 ini juga merupakan cara kreatif kami dalam melakukan Sosialisasi Empat Pilar kepada atlet dan pecinta olahraga menembak,” sebut Bamsoet lebih lanjut, “Metodologi yang kreatif dengan sasaran sosialisasi yang tepat diharapkan tujuan dari sosialisasi itu sendiri akan cepat tercapai.”

Menpora Zainuddin Amali sangat meng-

apresiasi kegiatan yang digelar MPR dan sekaligus Sosialisasi Empat Pilar MPR ini. “Saya juga setuju sekali dengan Ketua MPR bahwa metode sosialisasi tidak mesti hanya dilakukan di sekolah-sekolah dan kampus-kampus saja, tapi juga harus kreatif menysar ke berbagai elemen masyarakat lainnya, seperti kepada para pecinta olahraga menembak ini,” ujarnya.

Metode sosialisasi yang kreatif seperti itu, lanjut Amali, harus dikembangkan dan mesti menjadi contoh kepada anggota MPR lainnya, dan elemen masyarakat yang

menjadi target sosialisasi mesti mendukung upaya-upaya MPR tersebut. “Nilai-nilai yang ada dalam Empat Pilar adalah milik kita, jika tidak kita yang berupaya memahami dan mengamalkan, lalu siapa lagi,” tambahnya.

Setelah acara seremoni, acara dilanjutkan dengan agenda lomba. Bamsoet masuk dalam urutan pertama menjadi peserta menembak reaksi 20 meter pistol eksekutif dan berada di shooting range nomer 1. □

DER

Anugerah MURI dan Kuis Empat Pilar MPR



DI TENGAH acara puncak Legislator Championship 2020, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendapatkan dua penghargaan dari Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI). *Pertama*, kategori Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada Anggota Komunitas Motor Terbanyak. *Kedua*, Kejuaraan Tembak Reaksi Level III Sekaligus Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dengan Penembak Terbanyak. Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Pendiri MURI Jaya Suprana kepada Bamsoet.

“Penghargaan ini akan menjadi catatan sejarah bagi MPR RI, sekaligus pemacu semangat kepada kami semua agar dalam periode 2019-2024 ini MPR RI bisa terus melahirkan kreatifitas yang unik, penuh inovasi, dan punya diferensiasi. Sehingga bisa terus melebarkan spektrum jangkauan Sosialisasi Empat Pilar MPR ke berbagai lapisan masyarakat,” ujar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menegaskan, setelah memperoleh dua Rekor MURI, dia dan MPR RI tak akan berhenti melahirkan banyak kreasi baru. Selain bikers dan penembak, masih banyak lagi kalangan masyarakat yang akan disentuh MPR RI melalui Sosialisasi Empat Pilar. □

DER

Kunjungan Kabupaten Gresik

Wakil Ketua MPR Bertemu Masyarakat NU Gresik



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI, Dr. H. Jazilul Fawaid, SQ., MA., mengunjungi daerah pemilihannya di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Ahad (8/3). Ada empat kelompok masyarakat yang ditemui Jazilul pada kunjungan sehari di daerah Gresik. Keempat kelompok masyarakat itu adalah: Petani Porang, Lembaga Bahtsul Masail, PC. Fatayat NU Kabupaten Gresik, serta NUtizen dan NUGres.

Setibanya di Kabupaten Gresik pada Ahad pagi, Jazilul langsung menuju Masjid Soghir (langgar gede) KH. Umar Burhan Gresik, di Jalan Nyai Ageng Arem Arem No. 35 Kota Gresik. Di tempat ini telah berkumpul puluhan kiai yang tergabung dalam Lembaga Bahtsul Masail (pembahasan masalah) PC. NU Kabupaten Gresik. Ikut hadir pada acara tersebut Rois Suraih PC. NU Kabupaten Gresik, KH. Robbah Ma'sum, dan Ketua DPRD Kabupaten Gresik Fandy Ahmad Yani.

Saat menyampaikan sambutan pada acara tersebut, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengapresiasi budaya pembahasan masalah sehari-hari yang terus dijaga dan dilestarikan di kalangan masyarakat NU. Lestarinya Bahtsul Masail, menurut Jazilul, menandakan bahwa tradisi keilmuan yang

biasa digalakkan pesantren masih bertahan di kalangan masyarakat.

Ke depan, tradisi Bahtsul Masail harus terus digalakkan, termasuk kepada generasi milenial. Agar generasi muda tahu proses lahirnya hukum tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui proses panjang, termasuk menggunakan kajian ilmiah yang tidak sederhana.

"Teknologi sudah memudahkan kebutuhan dalam hidup. Tetapi generasi muda tidak boleh terlena dengan teknologi. Mereka juga harus mengetahui proses penciptaan sebuah produk hukum sebelum diterapkan di masyarakat, dan itu bisa diajarkan melalui kegiatan Bahtsul Masail," kata Jazilul.

Di masa lalu, menurut Jazilul, kebiasaan melaksanakan Bahtsul Masail tampak dalam proses lahirnya Pancasila yang banyak melibatkan para ulama. Bahkan Pancasila, kata Jazilul, merupakan perasan Bahtsul Masailnya para kiai. Dan, kalau bukan para kiai yang ikut menyusun maka Indonesia tidak akan hadir dan berdiri sampai saat ini.

"Selain dimensi ilmiah, Bahtsul Masail juga mengembangkan tradisi silaturahmi dan menjaga lestari kitab-kitab kuning

yang dihasilkan ulama-ulama terdahulu," sebut Jazilul.

Hari Perempuan

Kunjungan Wakil Ketua MPR ke Gresik itu bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional, 8 Maret 2020. Karena itu, saat menyampaikan sosialisasi Empat Pilar MPR RI di hadapan Fatayat NU Cabang Gresik, Jazilul Fawaid menegaskan bahwa kaum perempuan merupakan salah satu pilar



negara. Sehingga maju mundurnya sebuah negara ditentukan oleh kuat lemahnya kaum perempuan di sana. Karena itu, kaum perempuan harus mendapat perhatian agar mampu mengembangkan dirinya agar lebih maju, kuat, dan mandiri.

Pada acara yang berlangsung di Hotel Sapta Nawa Gresik itu, Jazilul mengharapkan agar Fatayat NU bisa menjadi teladan dan pelopor pembangunan bagi para perempuan Indonesia. Tidak hanya bisa membangun diri dan keluarganya, tetapi juga membangun perempuan dan masyarakat di sekitarnya.

“Negara akan besar jika kaum perempuannya mulia dan kuat. Sebaliknya, jika perempuannya terkebelakang dan tertindas

metode lama yang sudah ditinggalkan generasi muda.

“Yang namanya kuat, itu bukan karena besar atau tinggi. Tetapi yang namanya kuat itu adalah kesanggupan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi, Fatayat pun harus mampu menyesuaikan dirinya dengan zaman sekarang,” tegas Jazilul.

NUtizen dan NUGres

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid memanfaatkan benar kunjungannya ke Gresik untuk bertemu kalangan Nahdliyin. Buktinya, menutup kegiatannya di Kabupaten Gresik, Jazilul menghadiri undangan Kopdar yang dilayangkan NUtizen dan NUGres. Per-

dan penginapan karena sudah bersinergi dengan pemilik hotel dan jasa angkutan.

“Makna kemandirian sudah semakin luas. Selain memiliki usaha yang kuat, juga harus bisa bekerjasama dengan perusahaan lain agar eksistensinya semakin baik, dan usahanya bertambah besar. Karena tidak semua urusan perusahaan harus ditangani sendiri, tapi membutuhkan kerjasama dengan pihak lain,” kata Jazilul Fawaid.

Untuk membangun kemandirian di tubuh NU, menurut Jazilul, salah satu pekerjaan besar yang harus segera dirampungkan adalah menimbulkan kepercayaan dari masyarakat. Yaitu, bagaimana masyarakat yakin bahwa NU bisa melaksanakan tugas-



maka negara itupun akan mengalami kemunduran. Karena itu, kita harus memberikan peluang seluas-luasnya bagi para perempuan untuk membangun dan mengembangkan dirinya sendiri,” ujar Jazilul pada acara yang dihadiri Miiftahul Jannah (PP Fatayat), Dewi Winarti (PD Fatayat Provinsi Jawa Timur), dan Ketua PC Fatayat Kabupaten Gresik, Ainun Farodisa.

Menghadapi satu abad Nahdlatul Ulama, Jazilul mengajak Fatayat untuk semakin kreatif dan inovatif dalam menjalankan roda organisasi. Karena kalau tidak, bukan tidak mungkin, dalam waktu yang tidak lama lagi Fatayat akan tergilas oleh perkembangan zaman.

Jika sekarang zamannya media sosial, maka Fatayat juga harus mengambil peran di medsos. Fatayat harus mampu mengambil keuntungan dan kelebihan dari dunia maya. Artinya, tidak melulu mempertahankan

temuan dengan kaum milenial NU itu berlangsung di Gedung Pimpinan Cabang NU Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Jln. Dr. Wahidin Sudirohusodo No 756, Dahanrejo, Kebonmas Gresik. Pertemuan itu membahas tema: ‘Membedah Visi dan Kemandirian NU.’

Dalam acara itu, selain Jazilul Fawaid, juga hadir dua pembicara lainnya, yaitu: Drs. H. Moeshoffa Aziz, M.Hi., Ketua lazisnu Gresik, dan Dr. Ahmad Jazuli, S.Pd., M.Pd., Ketua Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Gresik.

Dalam sambutannya, Jazilul antara lain mengatakan, kemandirian bukan hanya dimaknai mampu berdiri di atas kaki sendiri, tapi juga harus bisa menyinergikan usahanya dengan perusahaan lain. Saat ini, perusahaan yang mengiklankan penginapan bukan berarti mereka memiliki hotel sendiri. Jadi, mereka yang mempromosikan tiket, tidak berarti mempunyai armada transportasi. Dan, keberanian perusahaan mengiklankan tiket

nya dengan baik, tanpa menimbulkan kecurigaan. Kalau pekerjaan tersebut bisa dilaksanakan dengan baik, berarti sebagian tugas sudah selesai.

“Di Gresik ini ada ratusan perusahaan, kalau mereka sudah percaya dengan NU tidaklah terlalu sulit bagi kita mengajak mereka untuk bekerjasama. Apalagi, mereka juga memiliki banyak anggaran yang sesungguhnya bisa diperuntukkan bagi masyarakat, namun belum terserap dengan baik,” ungkap Jazilul.

Karena itu, Jazilul mengajak jajaran PC NU Gresik membangun kepercayaan dengan cara menjalankan prinsip-prinsip manajemen secara baik dan benar. Ini bisa dimulai dengan penataan dan pengaturan dana infak, zakat, dan sedekah yang selama ini sudah dipercayakan masyarakat kepada NU Gresik, secara baik, jujur dan terbuka. □

MBO

Kunjungan para finalis Putri Indonesia 2020

Putri Indonesia 2020 Ditetapkan Jadi Duta MPR



FINALIS ajang pemilihan Putri Indonesia ke-24 tahun 2020 dari Provinsi Sumatera Barat, Louise Kalista Iskandar, nyaris menjadi bulan-bulanan wartawan. Ia hampir saja diperolok wartawan karena gagal menjawab pertanyaan dewan juri soal teks Pancasila di ajang pemilihan Putri Indonesia 2020 beberapa hari sebelumnya. Peristiwa itu terjadi usai pertemuan pimpinan MPR RI dengan finalis Putri Indonesia 2020, Kamis (12/3).

Hari itu, pimpinan MPR menerima kunjungan para finalis Putri Indonesia 2020, dengan agenda utama menetapkan finalis Putri Indonesia menjadi Duta MPR untuk Sosialisasi

Empat Pilar. Di antara finalis Putri Indonesia itu juga hadir peserta dari Sumatera Barat, Louise Kalista Iskandar. Kalista ini sempat viral karena gagal menjawab pertanyaan Ketua MPR Bambang Soesatyo, selaku salah seorang dewan juri, tentang teks Pancasila di ajang pemilihan Putri Indonesia 2020. Waktu itu, Kalista berkali-kali salah menyebut sila-sila Pancasila secara baik dan benar, terutama sila keempat dan kelima.

Dalam pertemuan Pimpinan MPR dengan finalis Putri Indonesia 2020 juga hadir Kalista, sehingga ia menjadi pusat perhatian para wartawan yang meliput acara itu. Nah, usai pertemuan, begitu melihat Kalista mengena-

kan selempang bertuliskan: Duta MPR, para wartawan pun memburunya dan mencecar pertanyaan seputar kegagalannya menyebut sila-sila Pancasila di ajang pemilihan Putri Indonesia 2020 itu.

Tapi kali ini Kalista tampak lebih siap. Di hadapan pimpinan MPR, Kalista berhasil menjawab pertanyaan para wartawan tentang teks Pancasila. Bak tes di sekolah, Dia menyebut satu-persatu urutan Pancasila, dari sila pertama hingga sila kelima, secara apik dan benar. Mendengar jawab Kalista itu, para wartawan pun kompak meneriakan: "Sah menjadi Duta MPR."

Maka sejak hari itu, Kalista bersama para finalis putri Indonesia lainnya resmi menjadi Duta MPR. Mereka mendapat tugas untuk membantu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR di kalangan generasi milenial. Penetapan enam besar finalis Putri Indonesia 2020 menjadi Duta MPR ditandai dengan pemasangan emblem dan selempang Duta MPR oleh pimpinan MPR kepada masing-masing finalis.

Penetapan ini dilakukan setelah sebelumnya pimpinan MPR melakukan pertemuan dengan Yayasan Putri Indonesia. Dalam pertemuan itu terjadi kesepakatan menjadikan enam besar finalis Putri Indonesia 2020 sebagai Duta MPR RI untuk menyosialisasikan Empat Pilar MPR RI kepada masyarakat.





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Kesepakatan ini perlu, mengingat keenam besar finalis Putri Indonesia ini telah memiliki agenda yang sudah disusun oleh Yayasan Puteri Indonesia untuk mempromosikan kekayaan dan keindahan Indonesia.

Selain Ketua MPR Bambang Soesatyo, juga hadir dalam pertemuan itu para Wakil Ketua MPR, antara lain: Ahmad Basarah, Lestari Moerdijat, Syarif Hasan, dan Fadel Muhammad. Di pihak Yayasan Puteri Indonesia, hadir Penasihat Utama Yayasan Puteri Indonesia, Putri Kus Wisnu Wardani; Ketua Panitia Pemilihan Putri Indonesia 2020, Kusuma Ida Anjani; dan Kepala Bidang Komunikasi Yayasan Puteri Indonesia, Mega Angkasa.

Serta dihadiri oleh keenam finalis Putri Indonesia 2020, masing-masing: Rr. Ayu Maulida Putri (Putri Indonesia 2020), Putu Ayu Saraswati (Putri Lingkungan 2020), Jihane Almira Chedid (Putri Indonesia Pariwisata 2020), Louise Kalista Iskandar (Putri Indonesia Runner-Up III 2020), Angel Virginia Boelan (Putri Indonesia Runner-Up IV 2020), dan Yoan Clara Tekan (Putri Indonesia Runner-Up V 2020).

Dalam pertemuan itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan, Empat Pilar MPR RI, khususnya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, merupakan bagian dari kekayaan bangsa

Indonesia yang juga bisa dipersembahkan kepada masyarakat dunia. Pancasila mengakui keberadaan Tuhan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, nasionalisme, menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, dan social justice merupakan penangkal ampuh radikalisme, ekstrimisme, dan intoleransi. "Jika masyarakat dunia bisa ikut menyerap nilai-nilai luhur tersebut, ditambah dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika tidak akan ada lagi perang, pertumpahan darah, kebencian maupun kekerasan di dunia ini," ujar Bamsuet, sapaan Bambang Soesatyo.

Lebih lanjut Bamsuet menegaskan, membuat dunia lebih beradab, berbudaya, toleran, dan humanis merupakan salah satu tujuan berbangsa dan bernegara Indonesia. Sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tugas tersebut, menurut Bamsuet, juga melekat kepada keenam finalis Putri Indonesia 2020 yang kini disinari sorot cahaya publisitas dan dipanuti tindak tanduknya oleh publik.

Jadi, tambah Bamsuet, berbagai ilmu dan pengetahuan yang diterima selama mengikuti ajang Putri Indonesia 2020 dan kini ditambah

pembekalan materi Empat Pilar MPR RI, akan menjadi bekal utama bagi mereka menghadapi dunia luar. Khususnya, dalam menduniakan Pancasila dan menunjukkan kepada dunia betapa luar biasanya Indonesia. Tak seperti negara lain yang terpecah belah maupun bergelut dalam perang saudara, seperti Uni Soviet, Suriah, Irak, Libya, Yaman, Somalia, Libanon, Sudan, hingga Aljazair, di Indonesia yang memiliki 264 juga penduduk tersebar di 17.504 pulau dengan konfigurasi 1.340 suku bangsa, 6 agama dan berbagai aliran kepercayaan, hingga kini masih bisa tegak berdiri penuh kedamaian. "Semua itu tak lain karena Pancasila," jelas Bamsuet.

Anggaran Pendidikan

Pertemuan yang berlangsung lebih dari satu jam itu berjalan santai. Pada sesi dialog, para finalis kontes kecantikan Indonesia itu menggunakan kesempatan mengajukan berbagai pertanyaan kepada Pimpinan MPR. Rr. Ayu Maulida, penyandang gelar Putri Indonesia 2020 asal Jawa Timur, misalnya, menyayangkan banyaknya aksi intoleransi yang terjadi di berbagai daerah. Sementara Putu Ayu Saraswati, Puteri Indonesia Lingkungan 2020, menyoal pemerataan pendidikan di Indonesia



donesia kaya dengan keragaman budaya,” jelasnya.

Dalam kaitan keragaman budaya itu, Jazilul mengatakan, MPR ingin mendekati masyarakat dengan menghidupkan budaya. “Sosialisasi Empat Pilar MPR ini menggunakan media budaya, khususnya wayang kulit karena salah satu cara untuk masuk ke hati masyarakat, antara lain menggunakan media seni budaya masyarakat setempat,” imbuhnya.

Jazilul mencontohkan seni tari Kuntul di Desa Gringgingsari ini. Tari Kuntul sebenarnya adalah pencak silat, tapi disebut tari perjuangan. Tari Kuntul adalah tari perjuangan Pangeran Diponegoro melawan penjajah. “Tari Kuntul ini perlu dilestarikan. Ini salah satu cara menumbuhkan rasa memiliki dan rasa bangga masyarakat pada budayanya,” tuturnya.

Menurut Jazilul, sosialisasi Empat Pilar MPR melalui metode pagelaran seni budaya cukup efektif, karena bisa menyampaikan pesan-pesan Empat Pilar kepada masyarakat. “Saya yakin dengan metode ini akan lebih efektif. Dan bisa menggairahkan pegiat budaya. Kalau seni budaya tidak sering dipentaskan maka seni budaya itu bisa punah. Sama seperti wayang. Kalau tidak digunakan sebagai media penyampai pesan lama-lama bisa punah diganti dengan media lain,” katanya.

Sementara itu, Kepala Biro Humas MPR RI Siti Fauziah mengungkapkan, hampir 30 tahun tidak ada pagelaran wayang kulit di Desa Gringgingsari. Karena itu, masyarakat desa ini antusias menyaksikan pementasan wayang kulit. “Saya lihat penonton sangat banyak, karena sudah kangen dengan

pagelaran wayang kulit,” katanya.

Dalam pagelaran ini MPR bekerjasama dengan Gerakan Remaja Mandiri (Geram) Desa Gringgingsari. “Pagelaran seni budaya ini merupakan salah satu metode sosialisasi Empat Pilar MPR dari berbagai metode lainnya. Selain menyampaikan pesan Empat Pilar juga menjadi tontonan dan hiburan masyarakat, dan juga untuk mengangkat potensi wisata daerah ini, seperti Curug Kanoman,” ujarnya.

Hadir dalam pagelaran seni budaya ini anggota MPR dari Fraksi PKB Bisry Romly dan Mohammad Toha, anggota DPRD Batang Bebung Ahyani, Camat Wonotunggal Himawan, Danramil Wonotunggal, Kapolsek Wonotunggal, dan Kepala Desa Gringgingsari Sigit Pranoto. □

BSC



Kunker Pimpinan MPR di Jawa Tengah

Borobudur Etalase Wisata dan Kebhinnekaan Indonesia

Kebhinnekaan Indonesia mesti dijaga seluruh rakyat Indonesia demi keutuhan bangsa dan negara.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR Lestari Moerdijat mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki destinasi wisata yang sangat kaya. Mulai dari wisata alam hingga wisata sejarah yang luar biasa dan mempesona dunia. Bahkan, semua obyek wisata Indonesia sangat menggambarkan kebhinnekaan Indonesia, salah satunya candi Borobudur di Provinsi Jawa Tengah.

Borobudur ini unik, menurut Lestari Moerdijat, selain menjadi etalase wisata, Borobudur juga sebagai etalase kebhinnekaan Indonesia. "Lihat saja, sebuah candi besar yang didirikan penganut Budha, tapi mampu menjadi kebanggaan dan milik seluruh rakyat Indonesia. Siapa saja rakyat Indonesia bisa menikmati keindahannya," ujarnya di tengah-tengah kegiatan kunjungan kerja, serta kegiatan studi banding dan silaturahmi kepala desa se-Kabupaten Jepara di beberapa desa di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Jumat (13/3/2020).

Kebhinnekaan Indonesia yang tercermin di Borobudur, lanjut Lestari, juga sangat kental menjadi filosofi dan karakter seluruh masyarakat di sekitarnya. "Saya diceritakan bahwa masyarakat sini sudah sejak lama, dan bahkan sudah turun-temurun menganggap perbedaan suku, agama, dan ras

sudah selesai dan bukan menjadi masalah. Masyarakat yang berbeda agama saling menjaga ketika merayakan hari-hari besar agama," tambahnya.

Bagi Pimpinan MPR dari partai NasDem ini, di tengah dinamika dan berbagai tantangan bangsa saat ini, baik sekali menyuarakan kembali nilai-nilai budaya, filosofi, dan karakter kebhinnekaan yang dimiliki masyarakat sekitar candi Borobudur tersebut. "Ini loh sejatinya kita sebagai bangsa Indonesia yang sudah ada sejak dulu. Jadi jangan dipertentangkan lagi, jangan menjadi masalah lagi, yuk kita maju sama-sama" katanya.

Intinya, Lestari berharap agar semua anak bangsa saling belajar, saling memahami kebijakan, kearifan untuk bersama-sama membangun negeri, mulai dari diri sendiri, lingkungan, dan dalam kehidupan secara lebih luas lagi, berbangsa dan bernegara.

Dalam pengembangan wisata, Lestari Moerdijat menilai, beberapa tahun belakangan ini masyarakat di sekitar Borobudur mampu mengembangkan potensi wisatanya. Mereka melakukan inovasi bersumber dari berbagai potensi yang ada di sekitar. Antara lain, membangun komunitas parawisata, mengembangkan potensi alam seperti suasana alam



yang asri, membangun berbagai *home stay*, kerajinan rakyat seperti kerajinan gerabah, batik tulis, budi daya jamur.

Melihat inovasi yang sangat luar biasa itu maka Lestari Moerdijat mengajak para kepala desa se Kabupaten Jepara yang melakukan studi banding ke wilayah Borobudur ini menjadikannya sebagai inspirasi untuk dibawa pulang, dan kemudian dikembangkan di daerahnya. “Saya rasa hal seperti ini bisa juga dilakukan di daerah lainnya. Seperti yang saya sebutkan, saling belajar satu sama lain demi kemajuan daerah-daerah di Indonesia,” tandasnya.

Jembatan Komunikasi Empat Pilar

Di tengah kunjungan kerjanya di Borobudur, Jawa Tengah, Lestari Moerdijat berkesempatan bincang-bincang dengan wartawan media massa nasional tentang Duta MPR. Dia berharap agar para finalis Putri Indonesia 2020 yang telah ditunjuk oleh Ketua MPR menjadi Duta MPR bisa berperan sebagai jembatan komunikasi antara MPR dan rakyat dalam pemahaman Pancasila.

“Memasyarakatkan Pancasila kepada rakyat Indonesia adalah amanah yang tidak sederhana, namun sangat mulia,” katanya. Untuk itu, lanjut Lestari, dalam memasyarakatkan Pancasila atau membumikan Pancasila kepada masyarakat Indonesia yang sangat beragam diperlukan komunikator-komunikator handal, seperti para tokoh dan publik figur.

Para finalis Putri Indonesia 2020 sebagai publik figur yang diidolakan masyarakat, merupakan salah satu elemen yang mampu melakukan itu. “Karena peran para Duta MPR dalam memasyarakatkan Pancasila sangat mulia, maka saya berharap mereka mampu membumikan Pancasila untuk dirinya sendiri dahulu, lalu mengamalkannya. Sebab, dengan status Putri Indonesia, mereka pasti membawa nama Indonesia dan Pancasila melekat di situ,” katanya.

Sebelumnya, pada 12 Maret 2020, bertempat di gedung MPR, Jakarta, Ketua MPR Bambang Soesatyo didampingi para Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Lestari Moerdijat, Syarif Hasan, dan Fadel Muhammad mengangkat enam finalis Putri Indonesia 2020 menjadi Duta MPR RI dengan tugas menyosialisasikan Empat Pilar MPR RI kepada masyarakat dunia.

“Mengingat para finalis tersebut akan



memiliki banyak agenda internasional yang sudah disusun oleh Yayasan Puteri Indonesia untuk mempromosikan kekayaan dan keindahan Indonesia, maka sangat tepat bila mereka juga membantu melakukan Sosialisasi Empat Pilar,” kata Bamsuet.

Keenam finalis itu adalah: Rr. Ayu Maulida Putri (Putri Indonesia 2020), Putu Ayu

Saraswati (Putri Indonesia Lingkungan 2020), Jihane Almira Chedid (Putri Indonesia Pariwisata 2020), Louise Kalista Iskandar (Putri Indonesia Runner-Up III 2020), Angel Virginia Boelan (Putri Indonesia Runner-Up IV 2020), dan Yoan Clara Teken (Putri Indonesia Runner-Up V 2020). □

DER



PSB Kabupaten Cianjur

Pesan Empat Pilar Disampaikan Lewat Seni Angklung dan Rebana



Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz

BERTEMPAT di salah satu wisma di Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Senin (16/3/2020), MPR menggelar Sosialisasi Empat Pilar MPR (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika). Sosialisasi yang menggunakan metode Pagelaran Seni Budaya (PSB) menampilkan seni angklung dan rebana, yang merupakan kesenian tradisi masyarakat Cianjur.

Acara pentas seni ini dihadiri oleh Anggota MPR, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz; Kepala Bagian Pemberitaan, Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Biro Humas, Setjen MPR, Budi Muliawan; Ketua

PC NU Kabupaten Cianjur/Ketua PUSDAI Jawa Barat, KH. Choirul Anam; Ketua Muslimat NU Kabupaten Cianjur, Ai Rahmawati Iskandar; serta ratusan masyarakat lainnya.

Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz dalam sambutan mengatakan, Sosialisasi Empat Pilar MPR lewat kesenian angklung dan rebana bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang nilai-nilai kebangsaan. Menurut anggota MPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, Empat Pilar MPR perlu disosialisasikan mengingat urgensinya untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Mari kita jadikan Empat Pilar sebagai pegangan kehidupan sehari-hari,” ajak Neng Eem. Karena, menjadikan nilai-nilai kebangsaan sebagai pegangan hidup sangatlah penting, apalagi bangsa Indonesia sedang dihadapkan pada berbagai cobaan. “Dengan Empat Pilar mari kita bentengi diri, jaga persatuan menghadapi informasi yang bisa memecah belah, dan menghindari rasa takut di antara kita”, tegasnya.

Di sela-sela acara sosialisasi itu, Neng Eem menyampaikan pesan dan juga cara memberikan salam untuk mengantisipasi virus Covid-19 kepada seluruh peserta yang hadir.

Sementara Kepala Bagian Pemberitaan, Hubungan Antar Lembaga, dan Layanan Informasi Biro Humas MPR, Budi Muliawan, menyatakan bahwa pagelaran seni nasional merupakan salah satu metode Sosialisasi Empat Pilar MPR. “Pagelaran seni budaya dipilih sebagai salah satu metode Sosialisasi Empat Pilar MPR adalah dalam rangka melaksanakan Pasal 32 UUD NRI Tahun 1945 yang mengamatkan pada negara agar melindungi serta mengembangkan seni budaya asli Indonesia”, ungkap Alumni Universitas Brawijaya Malang ini. Kesenian angklung dan rebana, menurut Budi Muliawan, adalah seni budaya asli Indonesia yang berkembang di tengah masyarakat Kabupaten Cianjur.

Dalam kesempatan itu, Budi Muliawan juga



Budi Muliawan



KH. Choirul Anam



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

mengingatkan bahwa tantangan bangsa Indonesia saat ini adalah maraknya budaya asing masuk melalui media sosial. Efek dari kemajuan teknologi ini, menurut Budi Muliawan, sudah mempengaruhi generasi milenial bangsa ini. Untuk itu, dia mengajak kaum milenial untuk membentengi diri dengan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar MPR agar terhindar dari pengaruh budaya luar yang tidak sesuai dengan jatidiri bangsa Indonesia.

Selain mengucapkan terima kasih kepada

semua pihak yang membantu terselenggaranya acara sosialisasi ini, khusus warga Muslimat NU Kabupaten Cianjur, Budi Muliawan juga mengungkap hasil survei nasional tentang kinerja lembaga MPR. Berdasarkan survei yang diselenggarakan lembaga survei Indo Barometer dapat diketahui, tingkat kepuasan dan kepercayaan publik terhadap MPR 2019-2024 mencapai 72,8%. “Angka ini lebih besar dibanding tingkat kepuasan dan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif lainnya”, tutur-

nya. Dengan hasil survei tersebut, Budi Muliawan berharap, masyarakat bisa lebih mendukung semua kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan MPR, termasuk lewat seni budaya.

Sambutan juga disampaikan oleh Ketua PC NU Kabupaten Cianjur, KH. Choirul Anam. Dalam kesempatan Choirul Anam menyatakan, kita harus bangga bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Indonesia adalah sebuah negara bangsa yang terdiri dari ribuan suku, namun bisa hidup rukun. “Tidak seperti negara lain yang hanya ada tujuh suku, namun sampai sekarang terus berperang, terpecah belah”, ungkapnya. Mereka mengalami hal demikian, menurut Choirul Anam, karena tidak punya Pancasila.

Selanjutnya, Choirul Anam mengucapkan terimakasih kepada Sekretariat Jenderal MPR yang sudah menyelenggarakan pagelaran seni budaya dengan menampilkan seni angklung dan rebana dalam acara sosialisasi Empat Pilar MPR. “Selain untuk Sosialisasi Empat Pilar, pentas seni ini juga ikut membangkitkan kembali rasa persatuan serta nasionalisme pada masyarakat”, imbuhnya. □

JAZ/AWG



Senayan, Jakarta

MPR Terima Delegasi STIA Puangrimaggalutung Bone, Sulawesi Selatan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

RATUSAN mahasiswa STIA Puangrimaggalutung Bone, Sulawesi Selatan, Rabu (11/3/2020) berkunjung ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Jakarta. Kehadiran para mahasiswa STIA dari Kabupaten Bone ini diterima oleh Plt. Kepala Bagian Pemberitaan, Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Biro Humas Setjen MPR, Budi Muliawan, di Gedung Nusantara V Kompleks MPR Senayan, Jakarta.

Kepada para mahasiswa STIA, Budi Muliawan menjelaskan seputar tugas dan wewenang lembaga negara yang bernama MPR ini. Budi Muliawan menjelaskan bahwa anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. “Meski sebagai lembaga negara tersendiri, namun bila anggota DPR dan DPD bergabung maka mereka adalah anggota MPR”, ujarnya. Selanjutnya, Alumni Fakultas

Hukum Universitas Brawijaya itu menuturkan bahwa jumlah anggota MPR sebanyak 711 orang, terdiri dari 575 anggota DPR RI dan 136 anggota DPD RI.

Untuk itu, Budi Muliawan berharap, para mahasiswa STIA Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, ini dapat mengenal para wakil rakyat yang berasal dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Bone. “Saya selalu mendorong agar masyarakat mengenal wakil rakyatnya, sebab merekalah yang memperjuangkan aspirasi kita”, paparnya.

Kepada para mahasiswa peserta study tour tersebut, Budi Muliawan juga memaparkan tugas dan kewenangan MPR. Salah satu tugas dan kewenangan MPR, jelas Budi Muliawan, adalah melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum. “Pada tahun 2019 MPR melantik Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma’ruf Amin sebagai Presiden

dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2019-2024”, ungkapnya. Sedangkan tugas dan wewenang MPR lainnya, menurut Budi Muliawan, adalah mengubah dan menetapkan UUD, serta memberhentikan Presiden sesuai dengan ketentuan UUD.

Selanjutnya, Budi Muliawan juga menjelaskan bahwa UUD merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, UUD berada pada urutan pertama. Di dalam UUD semua hak dan kewajiban warga Negara, serta tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara diatur. Budi Muliawan selalu mendorong agar para delegasi yang datang ke MPR untuk membaca UUD. Hal itu penting, sebab dengan membaca UUD membuat kita tahu hak dan kewajiban sebagai warga negara. Tak hanya itu, menurut Budi Muliawan, keistimewaan bila paham UUD



maka kalau ada UU berbenturan dengan konstitusi maka masyarakat bisa melakukan judicial review ke MK. Jadi, “Tak boleh ada UU yang bertentangan dengan UUD”, tegasnya.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, dalam UUD banyak hak yang diberikan kepada warga negara. Salah satunya, kata Budi Muliawan, adalah hak kedaulatan rakyat. Hak itu biasanya digunakan dalam Pemilu, baik untuk memilih anggota legislatif maupun memilih Presiden dan Wakil Presiden. Terhadap hak yang demikian, Budi Muliawan menegaskan, agar kita menggunakan suara yang kita miliki secara bertanggungjawab. Karena, “Suara kita berdampak selama 5 tahun”, ujarnya.

UUD yang sekarang menjadi pegangan bangsa Indonesia, yakni UUD NRI Tahun 1945, menurut Budi Muliawan, merupakan proses amendemen yang dilakukan oleh anggota MPR sejak tahun 1999 hingga 2002. Amendemen terhadap UUD merupakan salah satu tuntutan dari gerakan reformasi yang terjadi pada 1998. Setelah amendemen dilakukan, banyak perubahan besar dalam proses ketatanegaraan. Dia menyebut, perubahan yang besar itu seperti Presiden dipilih langsung oleh rakyat, masa jabatan Presiden dibatasi hanya dua periode, dan munculnya lembaga-lembaga negara yang baru.

Sebelum amendemen dilakukan, MPR merupakan lembaga tertinggi negara.

Sebagai lembaga tertinggi negara membuat Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR. “MPR juga berhak membuat haluan negara”, ujarnya. Dari posisi yang demikian, menurut Budi Muliawan, membuat Presiden disebut sebagai Mandataris MPR.

Kepada delegasi STIA, Budi Muliawan juga menjelaskan bahwa saat ini MPR gencar melakukan Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika yang dikenal sebagai Sosialisasi Empat Pilar MPR. Empat Pilar, kata Budi Muliawan, sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. “Sehingga kami terbuka menerima kedatangan delegasi dari berbagai kelompok masyarakat”, ucapnya. □

AWG



H. Chaerudin alias Babeh Idin

Jawara dan **Penjaga Kali** Pesanggrahan

HUTAN Kota Sangga Buana di Karang Tengah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, bukanlah nama yang familiar bagi telinga sebagian warga Ibukota. Selain lokasinya terpencil, akses jalan menuju ke tempat tersebut juga sempit, membuat kawasan ini tidak banyak mendapat perhatian untuk dikunjungi. Padahal, hutan kota ini sebenarnya sangat cocok untuk menjauh dari kebisingan dan tempat yang sunyi dari

wuluh. Selain itu, ada juga tanaman kopi, porang, dan banyak lagi yang lainnya.

Keasrian Sangga Buana tak lepas dari perjuangan dan pengorbanan H. Chaerudin (66), seorang pejuang lingkungan yang sudah mendarmabaktikan waktu dan tenaganya untuk mengurangi potensi kerusakan alam yang lebih besar. Selama hampir empat dasawarsa, Babeh Idin — begitu ia biasa dipanggil — berjuang

tampak Babeh Idin baru saja membeli batako untuk membuat kolam pengembangbiakan ikan endemic sungai Pesanggrahan antara lain: ikan Cere dan Benter.

Mengenakan kaos oblong cokelat muda dengan celana pendek cokelat tua, dan sambil duduk di teras bangunan tempat pengolahan sampah, Babeh Idin pun berkisah seputar perjuangannya menjaga dan merawat sungai Pesanggrahan, selama



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

hiruk pikuk ibukota. Apalagi, posisinya yang strategis, tidak jauh dari jalan raya.

Pertengahan Maret lalu, Majalah *Majelis* berkesempatan melihat langsung suasana Hutan Kota Sangga Buana. Di sini, Majalah *Majelis* merasakan benar-benar sunyi. Apalagi, kunjungan itu dilakukan saat siang bolong pada hari kerja pula. Suasana di sana benar-benar sangat hening. Angin semilir dan udara bersih membuat siapapun akan kerasan berlama-lama berada di sana.

Suasana tenang dan teduh di Sangga Buana tentunya tak bisa lepas dari suburnya tanaman yang tumbuh di sana. Berbagai jenis tanaman ada di hutan kota ini, mulai dari ribuan batang bambu hingga tanaman buah-buahan, seperti sukun, melinjo, rambutan, mangga, nangka, aren, hingga belimbing

merawat Hutan Kota Sangga Buana, dan juga Kali Pesanggrahan yang berada tak jauh dari lokasi hutan kota tersebut.

Siang itu, setelah melihat dan menikmati kesejukan Hutan Kota Sangga Buana, Majalah *Majelis* berupaya mencari keberadaan Babeh Idin, dengan tujuan untuk mencari tahu kisah perjuangannya menjaga dan melestarikan Kali Pesanggrahan, serta Hutan Kota Sangga Buana. Beruntung, untuk bertemu Babeh Idin tidaklah sulit. Ia bisa ditemui hampir setiap saat, meski tidak melalui perjanjian untuk bertemu.

Benar, awalnya Majalah *Majelis* mendapat informasi Babeh Idin tengah berada di kawasan pengolahan sampah. Kebetulan, tempat tersebut tidak sulit dijangkau, dan saat wartawan majalah ini tiba di sana,

lebih dari 30 tahun lalu.

Inilah kisahnya. “Mulanya, saya jengkel melihat orang-orang memberlakukan sungai secara tidak semestinya. Mereka membuang sampah sembarangan, dan menjadikan sungai sebagai halaman belakang rumah, sehingga menyebabkan kerusakan. Itulah yang membuat saya jengkel dan terketuk untuk berjuang merawat serta menjaga kelestarian Sungai Pesanggrahan,” ungkap pria kelahiran 13 April 1956 itu.

Bagaimana Babeh Idin tidak jengkel, sungai yang menjadi tempat bermain semasa kecil itu semakin jorok. Melihat kenyataan itu, nuraninya pun terketuk, dan disertai semangat yang menyala, tanpa memikirkan pamrih, Babeh Idin bertekad, berjuang melestarikan sungai Pesanggrahan. Itu terjadi

pada 1980-an, ketika Babe Idin meneguhkan tekadnya untuk menjadi penjaga sungai Pesanggrahan. Tujuan tak lain ingin agar air sungai yang tampak begitu jorok, hitam dan bau, kembali seperti sedia kala, bersih dan bening, serta menjadi habitat yang menyenangkan buat segala jenis ikan.

Dari Hulu ke Hilir

Jadi, sejak saat itu (1980-an), Babe Idin setiap hari menyusuri sungai Pesanggrahan sembari memungut segala macam sampah yang terdapat di sungai. Ternyata, sampah yang dia pungut itu bukan hanya satu atau dua gerobak, melainkan bisa mencapai belasan truk setiap hari. Anehnya, apa yang dilakukan Babe Idin ternyata tak selamanya mendapat simpati warga, dan bahkan ada yang mencela dan menganggap Babe Idin orang gila.

Celakanya lagi, pekerjaan mulia yang dilakukan oleh Babe Idin ini justru dianggap mengganggu warga lain. Karena, sampah yang diangkat dari sungai itu membuat pemandangan tak elok, dan baunya tak sedap. Lantaran itu, ada yang berusaha untuk memidanakan Babe Idin, dengan melapor ke polisi. “Jadi, yang berniat melapor itu orang kaya di sini. Karena, dia merasa terganggu lalat yang masuk ke rumahnya, dan lalat itu katanya berasal dari tumpukan sampah yang saya kumpulkan untuk diolah,” cerita Babe Idin.

Itu adalah salah satu tantangan yang dihadapi oleh Babe Idin. Tantangan lainnya, ada seorang tokoh yang kesal karena sering diingatkan oleh Babe Idin, lantaran kebiasaannya membuang sampah sembarangan. Alih-alih dia sadar dan minta maaf, justru tokoh masyarakat itu sempat memarahinya, dan nyaris terjadi adu fisik dengan Babe Idin.

Namun, Babe Idin tidak pernah sakit hati terhadap orang-orang yang tak suka pada



perjuangannya. Bahkan, sebaliknya pengagum tokoh Bima dalam cerita pewayangan itu, memaafkan perbuatan orang-orang yang menyakitinya. Laiknya, sang jawara memaafkan musuh-musuhnya, dan menjadikannya sebagai teman.

Sementara banyaknya volume sampah yang dikumpulkan oleh pria asli Betawi itu, karena sampah dipungut itu tidak hanya berasal dari aliran sungai Pesanggrahan yang berada di wilayah Jakarta Selatan saja, tapi dia pungut mulai dari hulu yang berada di kaki gunung Pangrango hingga kawasan utara Jakarta, atau sejauh kira-kira 136 kilometer.

Babe Idin tidak hanya memungut sampah di sungai, tapi dia juga menghijaukan lahan-lahan kritis di sepanjang bantaran Sungai Pesanggrahan. Salah satu hasil nyata reboisasi yang dilakukan Babe Idin adalah lestariannya Hutan Kota Sangga Buana. Kawasan seluas 120 hektar itu menjadi saksi kerja keras pria yang hanya menikmati pendidikan hingga kelas empat sekolah dasar itu. Selain itu, bersama warga yang terdampak bencana longsor, Babe Idin membangun kembali kawasan yang sempat

rusak agar bisa ditempati lagi dengan aman.

Kini setelah berjuang selama 40 tahun, hasil kerja keras Babe Idin semakin banyak dinikmati orang lain. Ribuan pohon buah yang berhasil ditanamnya kini bisa dipetik dan dinikmati oleh siapapun tanpa terkecuali. Babe Idin juga membuat kawasan pemancingan, dan siapapun bebas memancing serta menangkap ikan di sana.

Bukan hanya itu, Babe Idin pula yang mengkoordinir ratusan petani yang berada di sekitar bantaran sungai Pesanggrahan menjadi pengusaha mandiri. Mereka kini menjadi petani pengusaha dari berbagai komoditas pertanian. Seperti ikan hias, kambing, madu klanceng, hingga kedai-kedai ngopi.

“Kita akan lebih mudah menjaga dan melestarikan sungai Pesanggrahan jika masyarakat sekitar menjadi Konservasi Entrepreneur. Sehingga tumbuh rasa saling ketergantungan yang saling menguntungkan antara manusia dan lingkungannya. Inilah yang terus digalakkan agar kita bisa mewariskan kepada anak cucu sungai yang bersih dan bersahabat,” kata Babe Idin. □

MBO

Ratusan Pelajar SMA Negeri 1 Jonggol Kunjungi MPR

SEKITAR 456 pelajar didampingi 16 guru pembimbing dari SMA Negeri 1 Jonggol, Jawa Barat, Kamis (5/3/2020) berkunjung ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Delegasi diterima langsung oleh Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal MPR RI Siti Fauziah, di ruang rapat Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Pimpinan rombongan, Didih Wastidjo yang juga Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan SMA Negeri 1 Jonggol dalam kata sambutannya, menyampaikan apresiasi sedalam-dalamnya atas penerimaan yang sangat hangat dari Ibu Siti Fauziah atas nama MPR RI tersebut.

Kunjungan ini adalah kunjungan kedua SMA Negeri 1 Jonggol ke gedung MPR. Anak-anak kami sangat antusias berkunjung ke MPR. Bahkan, hujan yang tak kunjung henti sejak berangkat dari Jonggol

Jonggol. “Selamat datang di Gedung Nusantara V, Kompleks Gedung MPR yang merupakan Rumah Rakyat Indonesia. Di sini adalah rumah kalian, jadi jangan sungkan-sungkan. Apalagi kalian generasi muda bangsa. Siapa tahu di masa mendatang, ada beberapa dari kalian yang duduk di sini menjadi anggota MPR, dan mungkin malah menjadi Pimpinan MPR,” spanya, disambut koor ‘aammiin’ oleh seluruh pelajar.

Dalam kesempatan itu, Siti Fauziah atau akrab disapa Ibu Titi, juga menjelaskan seputar Empat Pilar, terutama menyangkut konstitusi. Menurut Siti Fauziah, konstitusi atau UUD NRI Tahun 1945 adalah sumber hukum tertulis tertinggi di negara Indonesia.

“Yang perlu dipahami adik-adik pelajar adalah soal penyebutan UUD. Kalau dulu sebelum diamandemen penulisan dan penyebutan UUD adalah UUD 1945. Pasca amandemen, menjadi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

selepas Subuh tadi tak menyurutkan antusiasme mereka. “Karena, inilah kesempatan para anak didik menyaksikan secara nyata dan jelas pusat sistem ketatanegaraan Indonesia, tempatnya para Wakil Rakyat bersidang untuk kemakmuran rakyat,” katanya.

Tujuan utama kedatangan rombongan, lanjut Didih, adalah dalam rangka memperkuat wawasan kebangsaan para siswa. Karena di sinilah para siswa dalam mengetahui secara langsung tentang tugas-tugas dan wewenang lembaga negara, khususnya MPR, dari sumbernya langsung di MPR.

“Harapan kami, dari kunjungan ini, para pelajar bisa semakin memahami pelajaran-pelajaran tentang ketatanegaraan, tentang kebangsaan, tentang Pancasila. Dalam kata lain, para anak didik kami perkenalkan dengan dunia nyata, tempatnya orang-orang hebat bersidang. Mudah-mudahan akan menginspirasi mereka yang bercita-cita ingin menjadi wakil rakyat,” ujarnya.

Siti Fauziah di hadapan para pelajar dan para guru pendamping mengucapkan selamat datang kepada rombongan SMA Negeri 1

1945). Ini adalah pengetahuan dasar yang mesti diketahui para pelajar,” ungkapnya.

UUD NRI Tahun 1945, lanjut Ibu Titi, merupakan salah satu pilar dari Empat Pilar MPR selain Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Empat Pilar ini sedang gencar disosialisasikan oleh MPR ke berbagai elemen masyarakat dengan berbagai metode panyampaian, salah satunya melalui metode Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR untuk pelajar SMA.

Teknik pemaparan materi oleh Ibu Titi cukup unik, untuk menghilangkan kejenuhan. Materi disampaikan secara interaktif, di tengah-tengah pemaparan, Ibu Titi menyelip pancingan atau rangsangan berupa kuis. Contohnya, saat membahas materi tentang MPR, pemateri terlebih dahulu memancing dengan sebuah pertanyaan: Berapa anggota MPR dan Pimpinan MPR. Saat itulah seluruh pelajar berlomba menjawab dengan berebut menyalakan tombol mikrofon. □

DER

Sesjen MPR Pimpin Rakornis Antisipasi Penyebaran Covid-19



SEKRETARIS Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono, Senin (16/3/2020), memimpin Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) terbatas dengan agenda tunggal membahas kesiapan, antisipasi, dan upaya Sekretariat Jenderal MPR menghadapi wabah virus corona atau Covid-19, di lingkungan kerja Setjen MPR.

Rapat yang digelar di ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta tersebut dihadiri para pejabat eselon I, II, dan III di lingkungan kerja Setjen MPR. Dalam kesempatan tersebut, Ma'ruf Cahyono mengungkapkan bahwa dunia, termasuk Indonesia, saat ini sedang serius menghadapi pandemi virus corona.

Perkembangan seputar wabah virus tersebut, lanjutnya, sangat luar biasa. Kabar yang beredar bahwa penyebaran virus sudah sangat masif dan sangat sulit dihentikan. Bahkan, sampai ada negara-negara yang harus mengeluarkan kebijakan lockdown, penguncian total untuk mencegah penyebaran virus semakin meluas tak terkendali.

"Di Indonesia sendiri, sudah sama-sama kita ketahui informasi seputar virus tersebut dari media-media massa nasional, serta juga sudah ada arahan resmi dari pejabat publik mulai dari Presiden, kementerian terkait dan lain-lain. Kita di Setjen MPR sebagai institusi publik harus memiliki sensitifitas, kepedulian, dan responsif terhadap informasi-informasi tersebut," ujarnya.

Untuk itu, lanjut Ma'ruf, harus ada langkah-langkah yang tepat, nyata, dan efektif untuk saat ini dan ke depan guna mencegah dan mengantisipasi penyebaran virus tersebut di lingkungan kerja Setjen MPR. "Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk merespon kebijakan pemerintah dan agar terhindar dari wabah virus, tanpa mengganggu pelaksanaan tugas Setjen MPR sebagai supporting lembaga MPR yang tetap harus berjalan secara maksimal dengan kondisi yang ada," tambahnya. □

DER

Area Gedung MPR RI Disemprot Cairan Desinfektan



MERELISASI langkah-langkah dan upaya MPR dalam mengantisipasi penyebaran virus Corona atau Corona Virus Disease (Covid-19), Sekretariat Jenderal MPR, Selasa (17/3/2020), melakukan penyemprotan cairan desinfektan di seluruh ruangan di lingkungan kerja MPR RI.

Total ruangan yang disemprot sekitar 49 ribu meter persegi. "Cairan desinfektan yang kami gunakan adalah water base, sehingga tidak berbekas dan tidak berbau. Cairan ini sangat efektif

untuk membunuh virus," ujar Sapto, koordinator pelaksana penyemprotan.

Petugas penyemprotan terlihat hilir mudik dengan didampingi petugas dari Setjen MPR memasuki berbagai ruangan satu persatu, dan dengan teliti melakukan penyemprotan. Diharapkan, penyemprotan tersebut akan meminimalisir bahkan menghilangkan penyebaran Covid-19 yang sangat berbahaya. □

DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Muchamad Nabil Haroen, Anggota Komisi IX DPR RI

Ini Ujian Bagi Kita Semua

JIKA dihitung sejak pemerintah mengumumkan kasus pertama positif Covid-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020, jumlah kasus positif Covid-19 terus meningkat dari hari ke hari. Awalnya hanya dua kasus positif, bertambah menjadi belasan, lalu puluhan, kemudian ratusan, dan sekarang (data Sabtu, 28 Maret 2020) sudah melewati 1000 orang positif Covid-19. Artinya, terjadi lonjakan 500 kali hanya dalam waktu beberapa pekan.

Padahal masa penjangkitan penyakit ini di Indonesia masih pada fase awal. Fase ini cepat atau lambat akan segera mencapai tahap puncak. Pada bulan April ini bakal terjadi puncak penjangkitan Corona di Indonesia maka bukan mustahil jumlah kasus positif Covid-19 bisa mencapai lebih dari 2.000 kasus. Perkiraan ini bisa jadi bukan omong kosong melihat betapa masif tingkat dan wilayah persebaran virus ini. Awal mula dideteksi di Jakarta—meski kasus pertama Covid-19 adalah warga Depok—kemudian menjalar ke kota-kota lain di Jawa Barat, meluas hingga Banten, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Sumatera utara, Lampung, Riau, Kalimantan Timur, Bali, dan daerah lainnya.

Melihat kondisi seperti itu, Majelis mewawancarai anggota dewan yang membidangi masalah kesehatan (Komisi IX). Berikut wawancara Majelis dengan anggota MPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Muchamad Nabil Haroen. Petikannya.

Indonesia saat ini sedang menghadapi pandemi Corona. Jumlah kasus positif Corona sudah melebihi 1000 kasus, dengan korban meninggal melewati 100 orang. Apa komentar Bapak?

Ini tentu ujian bagi kita semua. Penyebaran virus Corona (Covid-19) sangat cepat terjadi. Di sisi lain, tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia juga datang bertubi-tubi. Ini musibah yang merata bagi warga di berbagai negara. Negara-negara besar dan kuat secara ekonomi juga kebingungan menghadapi pandemi Covid-19 ini. Dari Cina, Italia, Spanyol, Jerman, hingga Amerika Serikat. Mereka menghadapi tantangan masing-masing yang sangat berat. Di Indonesia, pemerintah sudah bekerja keras dengan segenap perangkat yang dimiliki. Banyaknya jumlah korban yang meninggal karena pandemi Covid-19 ini musibah besar,

sekaligus cambuk bagi kita semua untuk saling bekerja sama, memberikan yang terbaik untuk warga Indonesia.

Apakah ada kemungkinan jumlah kasus positif Covid-19 di lapangan lebih besar dari kasus yang dilaporkan?

Belum ada publikasi dan riset tentang jumlah kasus positif Corona, tapi yang jelas tenaga medis kita sudah bekerja sangat keras untuk memberikan yang terbaik dalam pelayanan kesehatan dan penanganan korban Covid-19. Memang sejak awal pemerintah terlihat lamban dalam mengambil kebijakan-kebijakan strategis menghadapi virus, tapi saat ini dengan dibentuknya gugus tugas, serta koordinasi lintas kementerian, pemerintah sudah bekerja keras. Saya, sebagai anggota Komisi IX, sangat mengapresiasi teman-teman tenaga medis dan warga yang membantu untuk sukarela membantu sesamanya.

Jika dilihat sejak pengumuman pemerintah tentang adanya kasus positif Corona di Indonesia pada 2 Maret 2020 terjadi peningkatan 500 kali kasus positif Corona hingga akhir Maret 2020. Mengapa hal itu bisa terjadi?

Ada beberapa faktor kalau kita mau menganalisis. Tapi, yang paling jelas adalah kita butuh ketegasan dan kejelasan kebijakan. Dengan kebijakan semisal *social distancing*, pusat data dan koordinasi, serta instruksi ke kepala daerah untuk menutup akses persebaran virus, akan sangat membantu meminimalisir persebaran Covid-19. Pemerintah Indonesia juga tidak bisa serta merta mengambil keputusan drastis, seperti negara-negara Eropa. Karena, infrastruktur digital untuk data pekerja, logistik, dan hal-hal strategis belum sepenuhnya terkoordinasi dan siap untuk kebijakan ini. Tapi, partisipasi warga dengan saling menjaga dan saling membantu di tengah pandemi harus kita hargai.

Bagaimana Bapak melihat penanganan yang dilakukan pemerintah menghadapi pandemi Corona ini?

Pemerintah sudah mengerahkan segenap kemampuan terbaik dalam penanganan Covid-19. Meski, ada beberapa hal yang harus menjadi catatan di tengah situasi darurat, semisal koordinasi dan komunikasi yang masih belum maksimal. Serta, dukungan terhadap warga masyarakat kecil yang penghasilannya berkurang atau bahkan mandek karena dampak Covid-19 ini. Saya mendorong pentingnya keterbukaan informasi agar persiapan dan penanganan yang dilakukan menjadi komprehensif.

Bagaimana Bapak melihat masyarakat menghadapi pandemi ini? Masyarakat tampak panik dengan memborong bahan kebutuhan pokok?

Kepanikan ini wajar sebagai manusia di tengah krisis. Justru yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana memastikan alur informasi yang tepat sasaran, memastikan ketersediaan logistik, serta penindakan dan pengawalan oleh aparat keamanan untuk menjaga harga di pasaran. Kita harus menindak mereka yang mengambil untung dengan keserakahan di tengah krisis. Sekaligus, memberi jaminan ketersediaan pangan dan bantuan kepada rakyat yang terdampak Covid-19.

Apakah kesadaran masyarakat masih kurang? Masyarakat tidak mematuhi imbauan pemerintah (berdiam di rumah, menjaga jarak/*social distancing*)?

Saya tidak mau menyebut kesadaran masyarakat kurang, karena terbukti banyak

sekali *campaign-campaign* dan gerakan yang dilakukan warga kita untuk menghadapi pandemi Covid-19. Sebagian ada yang menggalang dana untuk membantu tenaga medis, membantu rakyat kecil, dan membagi alat-alat pelindung diri. Kita juga bisa melihat bagaimana rakyat bergerak dengan meningkatkan kebersihan, cuci tangan, pakai masker, pakai *hand sanitizer*, dan sebagainya. Itu kesadaran warga yang harus diapresiasi. Bahwa, ada sebagian yang susah, tentu harus diberi informasi, atau dicarikan solusi. Mereka yang keluar rumah bisa jadi karena harus tetap bekerja, harus tetap jualan, harus tetap ke kebun, dan sebagainya. Ini hal yang tidak mudah, tapi saya yakin bangsa Indonesia bisa melewati.

Di sinilah perlu implementasi nilai-



nilai Pancasila: tenggang rasa, gotong-royong, solidaritas sosial, mengatasi pandemi Corona ini. Apa tanggapan Bapak?

Jelas sekali, gotong-royong itu merupakan jiwa bangsa Indonesia. Semangat ini yang harus terus dipancarkan hingga menjadi inspirasi semuanya. Kita bisa melihat sebagian besar pemuka agama menjadi pendorong untuk kebaikan warganya, dengan menutup tempat ibadah, meniadakan Jum'atan atau perayaan agama, serta terus-menerus saling mendoakan sebagai energi kebaikan. Ini upaya kita bersama untuk saling berbagi kebaikan di tengah krisis. Di antara yang penting, saya mendengar dan menyaksikan, banyak warga desa yang bersiap untuk ketahanan pangan dengan saling bantu tetangganya yang membutuhkan. Ini bentuk gotong-royong yang diimplementasi-

kan secara baik.

Diperkirakan pandemi ini bisa berlangsung lama jika tidak ada penanganan serius dan keterlibatan semua pihak. Menurut Bapak bagaimana seharusnya penanganan pandemi ini? Perlukah Indonesia melakukan lockdown?

Bersama teman-teman Komisi IX DPR-RI, saya terus mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah cepat dan strategis. Koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan instansi terkait juga terus dilakukan. Di antara yang penting, yakni menjaga epicentrum Covid-19 agar tidak meluas. Harus ada antisipasi untuk memperketat perbatasan/pelabuhan/bandara karena banyak warga kita

yang jadi TKI di berbagai negara, pulang kampung. Mereka harus mendapatkan akses tes serta isolasi diri. Juga, warga yang sebelumnya bekerja di DKI Jakarta sebagai pekerja, pedagang dan karyawan yang pulang kampung, juga harus mendapat perhatian dengan isolasi diri dan tes Covid-19.

Lockdown itu konsekuensinya sangat besar, apalagi untuk negara dengan kultur komunal seperti Indonesia. Usaha pemerintah untuk meminimalisir persebaran dengan instruksi kepada masing-masing kepala daerah untuk melakukan aksi cepat di kawasan masing-masing, merupakan bagian ikhtiar menangani Covid-19. Mari sama-sama saling menjaga diri, keluarga dan lingkungan sekitar kita dengan mengikuti prosedur kesehatan yang ditetapkan pemerintah.

Semoga kita semua dapat melalui bencana ini dengan semangat dan ketabahan. □

Saya Bangga Jadi *Duta MPR*



Kalista Iskandar

RUNNER UP III Puteri Indonesia 2020, **Kalista Iskandar**, bersama lima finalis Putri Indonesia 2020 lainnya, didaulat menjadi Duta MPR. “Wah, saya bangga sekali diangkat oleh Ketua MPR menjadi Duta MPR. Ini merupakan amanah besar buat saya, dan saya akan berusaha keras menjaga amanah tersebut,” ujarnya, di Jakarta.

Disinggung soal kegagalannya menjawab pertanyaan Ketua MPR Bambang Soesatyo pada babak Q&A Top Putri Indonesia tentang Pancasila, Kalista berkilah: “Waktu itu saya grogi dan gugup, tak menyangka mendapat pertanyaan itu. Tapi, itu menjadi pelajaran berharga buat saya, ke depan saya akan terus saya perbaiki,” ujar Kalista.

Tapi ketika dia bersama lima finalis Putri Indonesia 2020 diterima Ketua MPR dan menerima mandat sebagai Duta MPR, wakil Provinsi Sumatra Barat membuktikan dia layak menjadi Duta MPR. Di depan para wartawan Kalista menyebut urutan sila-sila Pancasila secara baik dan benar. “Sah menjadi Duta MPR,” teriak para wartawan. □

DER

Takut dan Kesel Sama Virus Corona

ARTIS blasteran **Zoe Abbas Jackson** mengaku sangat takut mendengar mewabahnya virus corona, khususnya di Jakarta. “Serem banget deh,” ujar artis kelahiran Desember 2002 itu. Corona juga bikin kesel, mengganggu semuanya. “Ya ganggu sekolah aku, jadwal syuting, pokoknya semuanya deh,” katanya di Jakarta.

Sebagai seorang siswi, Zoe Abbas memang harus melakukan KMB (kegiatan belajar mengajar) di rumah. Soalnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan menutup sementara seluruh sekolah. Dan, sebagai artis, pemeran sinetron “Cinta Karena Cinta” jadwal scene syutingnya banyak. “Aku bete,” katanya.

Tapi, dia menyadari bahwa kebijakan pemerintah itu demi kebaikan semuanya. “Ya, saya nyadar itu demi kebaikan kita sendiri, karena virus ini sangat berbahaya buat kita. Ya udah kita ikutin aja,” kata Zoe Abbas. “Semoga masyarakat Indonesia baik-baik saja, dan virus corona segera hilang serta Indonesia bisa aman kembali. □

DER

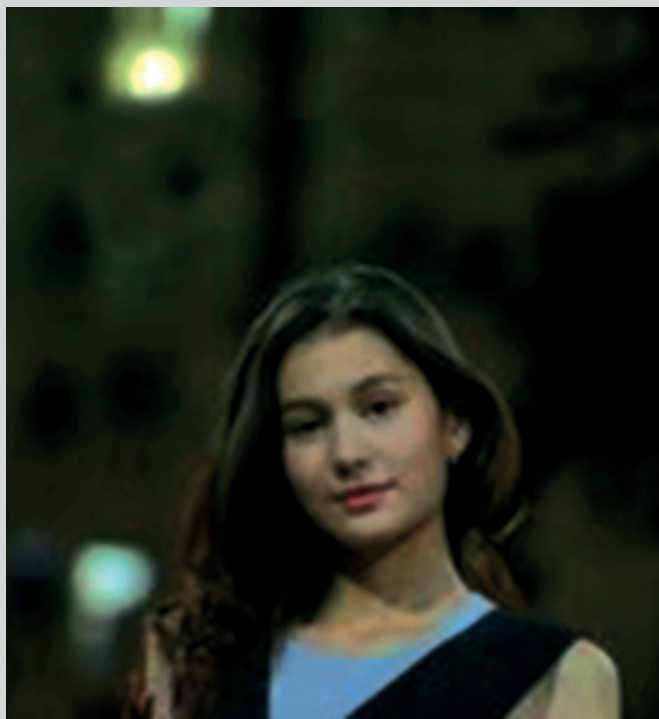


FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Zoe Abbas



Doni Monardo

Ayo Kita Perangi Virus Corona

KEPALA Badan Nasional Penganggulangan Bencana (BNPB), **Doni Monardo**, dengan tegas mengatakan, inilah momentum yang tepat untuk seluruh elemen bangsa bersatu memerangi virus Corona atau Covid-19. “Corona adalah musuh bersama seluruh bangsa Indonesia,” ungkap Doni di Jakarta belum lama.

Menghadapi wabah virus Corona kita harus bersatu, jangan saling hujat, dan jangan saling menyalahkan. “Inilah saatnya seluruh rakyat Indonesia melakukan aksi bela negara, beraksi sesuai bidang dan kemampuan masing-masing. Para dokter dan tenaga medis berjuang di rumah sakit, dan rakyat umum patuh pada anjuran dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah,” katanya.

“Virus musuh kita bersama, ayo kita perangi,” tandasnya. □

DER

Balkondes Borobudur



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Model Pengembangan Desa Wisata Layak Dicontoh

INDONESIA menjadi bagian dari duapertiga masyarakat dunia yang terpapar virus Corona, Covid-19. Serangan virus ini telah mengobrak-abrik perekonomian negara-negara di dunia. Jangankan Indonesia, negara-negara yang ekonominya terbilang lebih kuat pun ikut terhuyung akibat serangan wabah Covid-19.

Sebagai bangsa religius, tentunya masyarakat Indonesia yakin, setiap musibah tidak melulu menimbulkan kerugian. Demikian pula serangan virus Corona kali ini dipercaya ada hikmah tersembunyi. Paling tidak kesadaran akan pentingnya kemandirian ekonomi, dimulai dari daerah desa.

Saat ini praktik kemandirian ekonomi dari desa sudah bisa ditemukan, salah satunya di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Di Kabupaten Magelang, khususnya Kecamatan Borobudur, terdapat Balai Ekonomi Desa (Balkondes). Dengan program Balkondes masyarakat desa di kawasan Borobudur berhasil meningkatkan kecantikan alam pedesaan yang memang alamiah menjadi lebih eksotis, sehingga layak dikunjungi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Kegiatan tersebut turut berpengaruh terhadap pendapatan dan

kesejahteraan masyarakat desa di sana.

Terdapat 20 desa di Kecamatan Borobudur yang terlibat aktif dalam program Balkondes yang didanai oleh *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) BUMN. Ke-20 desa itu, antara lain: Giritengah, Bigaran, Kenalan, Sambeng, Giripurno, Ngargigondo, Candirejo, Karangrejo, Majaksingi, Wanurejo, Tuksongo, Karanganyar, Ngadiharjo, Kebonsari, Kembanglimus, Bumiharjo, dan Wringinputih. Melalui Balkondes, desa-desa tersebut dapat mempercantik dirinya sesuai potensi alam yang dimiliki, sehingga menarik minat wisatawan berkunjung ke sana.

Balkondes Karangrejo misalnya. Salah satu destinasi unggulan di desa wisata ini adalah Puthuk Setumbu digandrungi semua kalangan. Mulai kalangan milenial hingga orang dewasa. Baik turis lokal maupun mancanegara. Mulia dari kalangan pejabat hingga masyarakat kebanyakan. Itu terbukti saat Pimpinan MPR Lestari Moerdijat ikut menikmati keindahan *sunrise* di tempat tersebut, beberapa waktu lalu.

Nama Puthuk Setumbu sendiri semakin populer di kalangan pemburu dan penikmat matahari terbit. Itu terjadi setelah destinasi wisata ini menjadi tempat pengambilan gambar

film: *Ada Apa Dengan Cinta 2*. Sejak itu, Puthuk Setumbu semakin populer sebagai kawasan matahari terbit. Desa wisata Karangrejo ini pun semakin banyak dikunjungi wisatawan, baik lokal maupun manca-negara.

Apalagi, Desa Karangrejo juga memiliki obyek wisata lainnya yang tidak kalah menariknya dibanding Puthuk Setumbu. Berlatar belakang Bukit Menoreh – yang memang sudah kesolor lewat cerita silat “Api di Bukit Menoreh,” karya SH. Mintardjo – menjadi salah satu alasan mengapa Desa Karangrejo pantas untuk dikunjungi.

Seperti desa-desa lain di sekitar Candi Borobudur, masyarakat Karangrejo pun menggantungkan hidup dari pertanian, perkebunan, dan tentunya juga dari sektor wisata. Bertolak dari sumber daya yang ada di desa itu, disponsori oleh Perusahaan Gas Negara, Balkondes kemudian mempercantik Desa Karangrejo hingga menjadi desa wisata Kampung Organik. Dan, di desa ini dapat ditemukan kegiatan pertanian organik. Di Kampung Organik ini para pelacang dapat mencoba belajar pertanian sistem organik bersama warga sekitar.

Selain Kampung Organik, Desa Wisata Karangrejo juga menyediakan beragam



obyek wisata alam menarik lainnya. Seperti, Sendang Widodaren, Sendang Puspitosari, Puthuk Cemuris, dan Asam Pandawa Lima. Untuk mengunjungi desa wisata Karangrejo ini tidak sulit, karena posisinya tak jauh dari Taman Wisata Candi Borobudur, atau sekitar 3 km dari kawasan Candi Borobudur tersebut.

Sungai Progo dan Sileng

Tidak lengkap kiranya, apabila mengunjungi Balkondes Borobudur tanpa mampir di desa wisata Wanurejo, sebuah desa yang menyajikan destinasi wisata yang cocok bagi para penikmat seni. Di sini berkembang seni budaya tradisional khas dari Borobudur.

Salah satu obyek wisata yang menarik dan tidak boleh dilewatkan oleh para pelancong bila berkunjung ke desa wisata Wanurejo adalah Museum Gunoroso Pondok Tingal. Di Museum Gunoroso Pondok Tingal ini tersimpan berbagai jenis benda seni, antara lain: jenis wayang Nusantara dan juga mancanegara (Tiongkok, Kamboja, dan Turki). Setiap Sabtu pekan keempat tiap

bulan di tempat ini terdapat pagelaran atraktif pada jam 20.30 hingga 24.00. Sedangkan setiap Sabtu Pahing, pukul 08.00-09.00 WIB, pertunjukan dongeng anak.

Untuk para wisatawan yang berkunjung Balkondes Wanurejo tersedia tempat menginap berupa resort yang diberi nama Pondok Tingal Hotel dan Restaurant. Arsitektur Pondok Tingal Hotel dan Restaurant ini cukup unik. Disponsori oleh Bank BNI, Pondok Tingal Hotel dan Restaurant ini dikonsepsi seperti “Omah Bugis” yang dilengkapi blangkon, dan tersedia fasilitas ruang rapat, restoran, outbound area, kebun Anggrek, dan tanaman hias.

Letak Desa Wanurejo hanya berjarak 2 Km sebelah tenggara kawasan Taman Wisata Candi Borobudur. Bahkan, Desa wisata Wanurejo merupakan salah satu desa wisata yang menjadi pintu gerbang masuk ke kawasan Candi Borobudur. Persisnya, terletak di kaki pegunungan Menoreh dan diapit oleh dua sungai, yakni: sungai Progo dan sungai Sileng. Maka, tak heran kalau Desa Wanurejo menampilkan

panorama sungguh indah dan mengesankan dengan lanskap alam menakjubkan.

Selain Wanurejo dan Karangrejo, Balkondes Borobudur juga menyajikan keunikan lain, seperti yang bisa dijumpai di desa wisata Wringinputih. Berbeda dengan Wanurejo dan Karangrejo, Desa Wringinputih mengedepankan kearifan lokal dalam bentuk dunia bambu. Apalagi sejak dulu bambu sudah dikenal sebagai tumbuhan yang sangat banyak manfaatnya. Selain menyerap karbon dioksida, bambu juga sangat dikenal sebagai bahan kerajinan. Dan, hasil kerajinan bambu di Desa Wisata Wringinputih menjadi daya tarik utama wisatawan yang berkunjung ke sana.

Desa Wringinputih terletak sekitar 2,3 km dari Taman Wisata Borobudur. Mata pencaharian kebanyakan penduduknya adalah bertani dan berkebun. Karena itu, tak mengherankan jika Wringinputih jadi kawasan hijau yang ditumbuhi berbagai jenis tumbuhan, seperti rambutan, ketela, pepaya, kapulaga, dan albasia.

Sebagai destinasi wisata, sesuai kekhasannya, Desa Wringinputih mengembangkan Bale Bambu Klatakan sebagai andalan untuk daya tarik utama. Bale Bambu Klatakan merupakan kawasan kebun bambu liar yang disulap menjadi taman bambu yang indah. Maka, jadilah Bale Bambu Klatakan sebagai kawasan yang *instagram-able*, dan sangat bersahabat dengan pelancong yang gemar fotografi.

Tidak hanya taman bambu, Bale Bambu Klatakan juga dibuat menjadi bangunan berbentuk atap yang megah, berfungsi sebagai kafe untuk istirahat melepas penat. Pada waktu tertentu, tempat ini menjajikan beragam kuliner tradisional.

Nah, untuk mengunjungi seluruh destinasi wisata yang ada di 20 desa wisata yang berada di bawah Balkondes Borobudur, para wisatawan memang tidak bisa tuntas dalam waktu satu hari. Meski untuk menikmati keindahan dan keunikan seluruh desa wisata itu tersedia berbagai sarana transportasi. Mulai dari kendaraan offroad, sepeda ontel hingga mobil VW.

Berkunjung ke desa-desa wisata di kawasan Candi Borobudur sungguh pengalaman yang menyenangkan, dan membuat kita untuk sesaat melupakan virus Covid-19. □

MBO



Merawat Keragaman, Mengikuti Sunnatullah

DALAM pandangan Islam, kebhinnekaan atau keberagaman merupakan hukum alam (*sunnatullah*) yang tidak akan berubah dan tidak bisa ditolak. Allah berfirman dalam surah *Al-Hujurat* ayat 13: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu.” Oleh karena itu, pluralitas adalah keadaan yang harus kita terima dengan sikap yang positif sebagai bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Lebih jauh, kandungan ayat itu juga mengajarkan kepada kita makna persaudaraan yang dijalin melalui upaya saling kenal satu sama lain, dan makna kesamaan derajat manusia.

Sikap positif kita terhadap pluralitas seyogyanya mendorong kita untuk berlomba dalam kebaikan dan kebajikan. Bukan saling menafikan dan saling menyingkirkan. Allah berfirman: “Bagi tiap-tiap kalian Kami jadikan aturan dan jalan yang terang, dan andaikata Dia kehendaki pasti Dia jadikan kalian satu umat saja. Tetapi Dia bermaksud menguji kalian dengan apa yang Dia anugerahkan kepada kalian, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebajikan.” (Q.2: 148).

Nilai-nilai persaudaraan dan persamaan dalam konteks masyarakat majemuk ini sudah ada sejak zaman permulaan Islam. Pada masa kehidupan Nabi Muhammad SAW sudah dikenal *Piagam Madinah* yang berisi perjanjian antarkelompok agama dan etnik guna mengikat perdamaian dalam sebuah tatanan yang mencirikan sebuah negara. Kecenderungan Islam pada perdamaian terlihat pada larangan untuk menggunakan kekerasan dan memaksakan kehendak. Satu-satunya alasan yang mengizinkan umat Islam berperang adalah ketika mereka diserang atau diusir dari negerinya yang sah, seperti halnya bangsa Palestina melawan Israel.

Pesan-pesan ilahiah yang pernah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW itu begitu jelas, yakni bahwa keragaman, termasuk di dalamnya kemajuan dalam hal agama dan keyakinan,

merupakan sesuatu keniscayaan yang tidak dapat kita tolak. Yang harus kita tolak adalah berbagai bentuk dan upaya yang akan merusak takdir kebhinnekaan itu. Kebhinnekaan adalah sunnatullah; merusak kebhinnekaan berarti mengingkari sunnatullah; Cara pandang yang mengapresiasi kenyataan heterogenitas dari berbagai kelompok kepentingan sosial, yang menghargai dan mendorong tumbuhnya partisipasi untuk membentuk kehidupan bersama yang adil, harmoni, dan sejahtera ini harus kita tumbuhkan kepada anak-anak kita sejak usia dini, dan kita diseminasikan ke pelbagai lapisan masyarakat.

Hanya saja, kita harus akui, merawat kebhinnekaan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, bukanlah perkara mudah. Terlebih di era digital ini, yang juga sering dikatakan sebagai era *post-truth*, di mana segala sesuatu seolah-olah padahal tidak benar sama sekali. Pada masa ini fakta dianggap tidak terlalu berpengaruh dalam membentuk opini publik dibandingkan emosi dan keyakinan personal. Maka, tidak mengherankan dalam situasi demikian informasi-informasi *hoax* memiliki pengaruh yang lebih besar ketimbang fakta yang sebenarnya.

Hemat penulis, terdapat beberapa ancaman cukup serius terhadap kebhinnekaan, yang telah kita sepakati sebagai satu dari empat konsensus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Tanah Air. *Pertama*, menguatnya gejala intoleransi agama. *Religious intolerance* pada umumnya mewujud dalam tindakan diskriminasi, pengabaian atau larangan terhadap pemeluk agama lain. Kelompok intoleran sesungguhnya merupakan minoritas di umat masing-masing agama. Namun, mereka dikenal sebagai kelompok yang vocal dan mendapat tempat dalam liputan media. Untuk mengatasi intoleransi agama makin merebak di masyarakat, kepada para pelaku intoleransi (*zero tolerance*), bukan dengan menandingi aksi mereka tapi dengan penegakan hukum yang adil dan terukur.

Kedua, separatisme. Sejatinya gerakan pemisahan diri dari Republik Indonesia ini sudah muncul pada masa-masa awal kemerdekaan. Yakni, pada 1948 ketika muncul gerakan PKI di Madiun yang melancarkan pemberontakan terhadap pemerintah RI. Sampai

Oleh:
Asrul Sani
Wakil Ketua MPR RI



sekarang gerakan ini kerap muncul seperti yang terjadi di Papua akhir-akhir ini. *Ketiga*, konflik antaretnis. Sebagai masyarakat yang memiliki aneka suku, Indonesia amat terbuka bagi munculnya konflik antaretnis, seperti yang terjadi di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah beberapa tahun lalu.

Keempat, konflik antarpemeluk agama. Konflik dalam skala masif pernah terjadi di Maluku, yaitu antara orang Islam dan Kristen. Konflik Maluku adalah konflik agama yang paling mengerikan. Konflik ini menjerat komunitas-komunitas agama di mana hampir setiap orang Indonesia menjadi bagiannya. *Kelima*, konflik intra-umat suatu agama, yang berbeda keyakinan teologis atau mazhab atau aliran tertentu. Seperti antara penganut Sunni dengan Syi'ah yang ditandai dengan saling mengkafirkan atau saling tuduh sesat-menyesatkan.

And last but not least adalah isu pri dan non-pri. Selain konflik komunal, persoalan yang dihadapi Indonesia juga terkait dengan relasi dan/atau konflik pribumi dan non-pribumi, yang bermuara pada kerusuhan anti-Cina. Salah satu yang menjadi perhatian dari konflik relasi ini adalah peristiwa Mei 1998. Sekarang muncul dalam ungkapan peyoratif seperti *aseng* yang merujuk etnis Cina yang dianggap menguasai perekonomian negeri ini. Pertanyaannya, apa yang perlu diikhtirakan untuk mengurangi berbagai ancaman terhadap kemajuan tersebut?

Mula-mula yang harus dilakukan, hemat penulis, adalah penegakan hukum. Yakni, berupa tindakan tegas terhadap pelaku tindak kekerasan yang mengatasnamakan ikatan primordialisme seperti agama, etnik atau kedaerahan. Negara tidak boleh lagi membiarkan tindakan-tindakan kekerasan dan tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh kelompok yang menggunakan isu primordialisme tersebut.

Dalam pada itu, kita harus mendorong ormas-ormas dan organisasi keagamaan untuk mengedepankan dialog dan kerjasama dalam berbagai bidang sosial dan kebudayaan. Semakin tinggi intensitas komunikasi dan kerjasama antarkelompok agama, maka semakin bisa dihindari kesalahpahaman, dan dakwah-dakwah keagamaan yang menyebarkan sikap tidak toleran.

Toleransi adalah nilai dan tradisi yang niscaya dalam sebuah masyarakat yang majemuk dan multikultur. Tanpa toleransi, masyarakat akan selalu berada dalam suasana konfliktual yang destruktif, saling bermusuhan, penuh arogansi dan tidak stabil. Toleransilah yang bisa membuat perbedaan menjadi kekuatan, mentransformasikan keragaman menjadi keharmonisan. Toleransi memungkinkan masyarakat plural bergerak maju secara dinamis dalam situasi sosial yang damai dan stabil.

Oleh karena itu, kita perlu menanamkan secara berkelanjutan nilai-nilai toleransi kepada anak-anak sejak usia dini sampai ke tingkat usia perguruan tinggi. Toleransi perlu diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan atau setiap mata pelajaran agama dan budaya, sehingga sikap toleran tertanam kokoh dan menyatu dalam jiwa setiap siswa.

Cara penafsiran dan pemahaman yang berbeda terhadap ajaran agama, misalnya, perlu diberikan sehingga siswa terbiasa berpikir terbuka dan menghargai perbedaan. Mata pelajaran agama di sekolah misalnya, tidak cukup hanya berisi tentang tata cara peribadatan atau pengenalan tentang norma-norma agama. Karena, jika aspek tersebut yang ditonjolkan maka disadari atau tidak, siswa cenderung memahami agama secara kaku dan hitam putih.

Sejarah agama dan aspek-aspek ajaran spiritualnya juga perlu dikenalkan secara mendalam. Karena kedua aspek ini bisa mendorong tumbuhnya jiwa sosial dan visi humanistik dari seorang pemeluk agama. Visi demikian dengan sendirinya akan membuat seseorang menjadi lebih terbuka, toleran dan selalu berikhtir untuk melakukan yang terbaik dan bermanfaat bagi kehidupan.

Saya kira, kita sepakat bahwa suatu bangsa tidak mungkin bisa membangun dan menjadi maju jika terpecah-belah dan saling bermusuhan. Persatuan dan persaudaraan yang dibangun dalam kesadaran total sebagai bangsa bermartabat akan mampu mengubah perbedaan yang ada dalam masyarakat menjadi kekuatan perubahan yang luar biasa. □

Pustaka Akademik

Mengawali Kerjasama Perpustakaan MPR dan Perpustakaan Universitas Negeri Malang

MAJELIS Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dan Universitas Negeri Malang (UM) mencatat lembaran baru dalam tata kelola perpustakaan. Terukir dalam sejarah, Sabtu (14/3/2020), Perpustakaan MPR RI dan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Universitas Negeri Malang untuk pertama kalinya menjalin kerjasama dalam hal pembahasan karya ilmiah atau tesis yang ada di kampus.

Acara penandatanganan kerjasama itu berlangsung di Aula Perpustakaan UM, Kampus UM, Kota Malang, Jawa Timur, dan ditandatangani oleh masing-masing pihak. Pihak Perpustakaan MPR dilakukan oleh Kepala Biro Humas Setjen MPR Siti Fauziah, SE., MM., dan Kepala Bagian Tata Usaha Perpustakaan UM, Aa Kosasih, S.Sos., mewakili Kepala UPT Perpustakaan UM Prof. Dr. Djoko Saryono,

seraya menambahkan bahwa karya-karya yang ditulis oleh sivitas akademi UM bisa menjadi koleksi di Perpustakaan MPR. "Inilah kira-kira bentuk kerjasama ke depan," katanya.

Untuk menguatkan kerjasama ini, Kosasih menyitir ucapan seorang pimpinannya yang mengatakan bahwa sekarang ini bukan lagi zamannya kompetisi, tapi sudah saatnya kita berkolaborasi. Jadi, kerjasama ini adalah bentuk kolaborasi antara dua perpustakaan: Perpustakaan MPR dan UPT Perpustakaan UM.

Siti Fauziah pun mengakui, dalam pengembangan perpustakaan, memang harus berkolaborasi. MPR yang berikhtiar menjadi sebuah perpustakaan modern, akan terus menjalin kerjasama dengan perpustakaan di berbagai kampus di Indonesia. Sebelumnya, menurut Siti Fauziah, MPR menjalin kerjasama dengan sebuah universitas di



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

M.Pd., yang berhalangan hadir.

Upacara penandatanganan naskah kerjasama ini disaksikan oleh Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial UM, Prof. Dr. Sukowiyono, M.H., selaku Ketua Senat UM. Juga ikut menyaksikan dosen Fakultas Ilmu Sosial UM Dr. Didik Sutiono, SH.; dosen Ilmu Perpustakaan UM, Setiawan, S.Sos., M.Pd.; Kepala Bagian Perpustakaan MPR Yusniar, SH.; serta para mahasiswa Universitas Negeri Malang.

Untuk pertama kalinya kerja sama ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan Pustaka Akademik, yaitu kegiatan bedah buku yang dalam hal ini berupa tesis atau karya ilmiah dari mahasiswa Universitas Negeri Malang. Dalam Pustaka Akademik kali ini terpilih karya tulis Nisa A'rafyah Tri Wulandari, M.Pd. Karya tulis Nisa itu berupa tesis untuk Program S-2 dengan judul: *Hubungan Civic Competence dengan Partisipasi Politik Mahasiswa*.

Kepala Biro Humas MPR Siti Fauziah dalam sambutannya menyatakan, sangat mengapresiasi apa yang dikatakan oleh Aa Kosasih, S.Sos., bahwa ke depan kerjasama ini akan ditingkatkan lagi. "Apa yang dilakukan sekarang ini adalah wujud kerjasama awal. Nanti, ke depan, kerjasama akan ditingkat pada usaha-usaha pertukaran koleksi," ungkap Kosasih,

Yogyakarta, dan juga perguruan tinggi di Semarang.

Siti Fauziah mengakui, Perpustakaan MPR memang tidak terlalu besar bila dibanding perpustakaan lembaga negara lainnya. Tapi, menurut perempuan berdarah Sunda ini, Perpustakaan MPR memiliki koleksi yang tidak dimiliki oleh perpustakaan lain. Koleksi itu berupa buku-buku khas produk MPR, dan tidak diperjualbelikan. "Dan, buku-buku ini tidak ditemukan di perpustakaan lain," ungkap Siti Fauziah tentang kelebihan koleksi yang dimiliki Perpustakaan MPR.

Buku yang dimaksud oleh Siti Fauziah itu adalah buku rangkuman Risalah Sidang-sidang Amandemen UUD 1945 yang berlangsung pada 1999 hingga 2002. Buku-buku yang berisi risalah Amandemen UUD 1945 pertama hingga amandemen keempat ini, menurut Siti Fauziah, banyak dicari, terutama oleh para mahasiswa. Hanya saja, kata Siti Fauziah, buku-buku ini hanya bisa dibaca ditempat, tidak boleh dibawa ke keluar.

Tapi, dengan kerjasama antara Perpustakaan UM dan Perpustakaan MPR, bukan tidak mungkin buku-buku Risalah Amandemen UUD 1945 juga mengisi rak-rak buku di Perpustakaan Universitas di kota sejuk, Malang. □